

PELESTARIAN TERUMBU KARANG BERBASIS MASYARAKAT :

**SUATU UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Editor :
ASWATINI



**PELESTARIAN TERUMBU KARANG BERBASIS MASYARAKAT :
SUATU UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Penulis :

Mita Noveria
Dewi Harfina
Meirina Ayumi Malamassam

Editor :

Aswatini

Layout :

Puji Hartana

Desain Cover :

Puji Hartana

ISBN :

978-602-8942-50-8



LEUSER CITA PUSTAKA

PT. LEUSER CITA PUSTAKA (Anggota IKAPI)

Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 16, Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12510

Telp. (021) 7810076, Fax: (021) 7810076

Bekerjasama dengan



LIPI



COREMAP-LIPI

Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI dan COREMAP-LIPI

Jln. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430

Telp. 62-21-64713850, Fax: 62-21-64711948

Website: <http://oseanografi.lipi.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan COREMAP fase II bertujuan untuk menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu karang, agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi, diproteksi dan dikelola secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Program ini telah berjalan kurang lebih tiga tahun atau sampai pada pertengahan program. Keberhasilan COREMAP dapat dikaji dari aspek bio-fisik dan sosial ekonomi. Terjadinya peningkatan tutupan karang sebesar 2 persen per tahun merupakan indikator keberhasilan dari aspek bio-fisik. Indikator keberhasilan dari aspek sosial ekonomi adalah jumlah pendapatan yang didapat dari, dan jumlah orang yang menerima pendapatan dari berbagai kegiatan berkelanjutan yang berbasis terumbu karang meningkat sebesar 10 persen pada akhir program. Selain itu, diharapkan sedikitnya 70 persen masyarakat pesisir, terutama nelayan (penerima manfaat) merasakan dampak positif program terhadap kesejahteraan dan status ekonominya.

Untuk melihat keberhasilan tersebut perlu dilakukan penelitian benefit monitoring evaluation (BME) baik ekologi maupun sosial-ekonomi. Penelitian BME ekologi dilakukan setiap tahun untuk memonitor kesehatan karang, sedangkan BME sosial-ekonomi dilakukan pada tengah dan akhir program. BME sosial-ekonomi bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP di daerah dan mengumpulkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil BME sosial-ekonomi selain dapat dipakai untuk memantau perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya peningkatan pendapatan penduduk di lokasi COREMAP, juga dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi pengelolaan dan pelaksanaan program, baik di tingkat nasional, kabupaten maupun di tingkat lokasi. Dengan adanya evaluasi dan masukan-masukan bagi

pengelola dan pelaksana program, diharapkan dalam sisa waktu yang ada sampai akhir program fase II, keberhasilan COREMAP dari indikator bio-fisik dan sosial-ekonomi dapat tercapai.

Buku ini ditulis menggunakan data hasil BME sosial-ekonomi yang dilakukan pada tahun 2008 di dua lokasi Coremap di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Tiga isu utama yang diangkat dalam buku ini adalah pelaksanaan berbagai kegiatan COREMAP, mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan desa/kelurahan, dinamika pendapatan masyarakat yang menjadi target kegiatan, serta pengetahuan tentang COREMAP dan partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang tersebut.

Terlaksananya penulisan buku ini melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu, baik di Jakarta, di Kabupaten Pangkep dan di Desa Mattiro Bombang (Kecamatan Liukang Tupabbiring) serta di Kelurahan Pundata Baji (Kecamatan Labakkang), yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna meskipun tim penulis telah berusaha sebaik mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini.

Jakarta, November 2011

Penulis

RANGKUMAN

COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*) adalah program nasional yang dilaksanakan sebagai respon terhadap kondisi terumbu karang yang makin memburuk di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu provinsi yang menjadi lokasi implementasi COREMAP adalah Sulawesi Selatan, persisnya di Kabupaten Selayar dan Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang tersebut mulai dilaksanakan di Kabupaten Pangkep sejak tahun 2005. Program ini mencakup 37 desa/kelurahan terpilih di sepuluh kecamatan kepulauan serta pesisir dan dataran rendah di kabupaten ini. Hanya tiga kecamatan di dataran (tinggi), yaitu Minasa Te'ne, Tondong Tallasa dan Balocci, dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep yang tidak terpilih sebagai lokasi kegiatan COREMAP.

Kegiatan COREMAP tidak terbatas hanya pada pengelolaan terumbu karang dan sumber daya laut dalam arti fisik. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan aspek sosial ekonomi, seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap manfaat penting terumbu karang (dan oleh karena itu perlu dijaga kelestariannya) serta perbaikan kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi fokus kegiatan COREMAP. Kesadaran yang tinggi untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya sangat diperlukan untuk mencegah masyarakat dari berbagai kegiatan yang merusak sumber daya tersebut. Selain itu, dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, masyarakat juga dapat dijauhkan dari kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya laut yang bersifat berlebihan dan merusak.

Di dua lokasi implementasi COREMAP di Kabupaten Pangkep (Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring dan Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, manfaat langsung kegiatan COREMAP bagi kehidupan (ekonomi) masyarakat baru

dirasakan setelah sekitar tiga tahun program ini berjalan, yaitu pada pertengahan tahun 2008. Hal ini terjadi setelah cairnya dana bergulir yang dikenal dengan *seed fund* yang penggunaannya adalah untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif, khususnya penciptaan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat di lokasi COREMAP. Namun dalam kenyataannya, *seed fund* tidak selamanya digunakan untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif karena banyak penerimanya menggunakan dana bantuan untuk meningkatkan usaha yang telah mereka geluti, termasuk yang terkait dengan eksploitasi sumber daya laut. Sayangnya, dana untuk bantuan modal usaha ekonomi bagi masyarakat baru saja dicairkan sekitar satu sampai dua bulan sebelum penelitian dilaksanakan sehingga sulit untuk menilai manfaat kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan COREMAP terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Meskipun sudah berlangsung selama sekitar tiga tahun, capaian program COREMAP dapat dikatakan masih belum memadai. Hal ini terlihat dari terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan program tersebut beserta berbagai kegiatan yang dilaksanakannya. Mereka yang mengetahui tentang program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang tersebut hanya terbatas pada sebagian anggota masyarakat yang mata pencahariannya sangat bergantung pada sumber daya laut. Padahal, idealnya pengetahuan mengenai COREMAP juga harus dimiliki oleh mereka yang tidak menggantungkan kehidupan ekonomi pada sumber daya laut agar program ini mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan sedikitnya jumlah anggota masyarakat di lokasi penelitian yang mengetahui keberadaan COREMAP, mereka yang terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan program ini juga terbatas jumlahnya. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sosialisasi COREMAP tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kedua, banyak anggota masyarakat yang tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan COREMAP karena pada awal pelaksanaannya kegiatan lebih ditekankan pada hal-hal yang tidak terkait langsung dengan kondisi ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Jika faktor pertama yang lebih dominan, maka diperlukan

kegiatan sosialisasi yang lebih intensif untuk mencapai keberhasilan program di masa mendatang. Sebaliknya, jika penyebab kedua yang lebih dominan, maka setelah berjalannya kegiatan-kegiatan yang secara langsung terkait dengan (perbaikan) kondisi ekonomi masyarakat, akan lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam program ini.

Penelitian menemukan adanya peningkatan pendapatan masyarakat (yang diwakili oleh 122 dan 120 rumah tangga terpilih di Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji secara berturut-turut) dalam kurun waktu dua tahun, sejak tahun 2006 sampai dengan 2008. Peningkatan pendapatan yang signifikan ditemukan di antara rumah tangga terpilih di Desa Mattiro Bombang. Pada tahun 2006 pendapatan rata-rata rumah tangga terpilih sebesar Rp. 547.250,- per bulan, sementara dua tahun setelahnya (2008) meningkat menjadi Rp. 958.750,- setiap bulan. Jika dilihat dari pendapatan per kapita, terjadi peningkatan dari Rp. 116.960,- setiap bulan menjadi Rp. 195.350,- per bulan selama kurun waktu dua tahun tersebut. Selanjutnya, di Kelurahan Pundata Baji pendapatan rata-rata rumah tangga terpilih pada tahun 2006 adalah Rp. 1.137.570,- per bulan. Jumlah ini meningkat menjadi Rp. 1.168.725,- per bulan pada tahun 2008. Hal yang sama juga terjadi pada pendapatan per kapita, dengan peningkatan dari Rp. 222.320,- setiap bulan pada tahun 2006 menjadi Rp. 236.600,- setiap bulan pada tahun 2008.

Peningkatan pendapatan juga dapat dilihat dari distribusi pendapatan rumah tangga terpilih di lokasi penelitian, terutama di Desa Mattiro Bombang. Jika pada tahun 2006 sekitar 61 persen rumah tangga terpilih di desa ini mempunyai pendapatan rata-rata kurang dari Rp. 500.000,- per bulan, pada tahun 2008 proporsi rumah tangga dengan jumlah pendapatan tersebut berkurang menjadi 34,4 persen. Kondisi yang sebaliknya terjadi pada rumah tangga dalam kelompok pendapatan yang lebih besar. Hanya 1 persen di antara seluruh rumah tangga terpilih pada tahun 2006 yang berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,- per bulan. Pada tahun 2008 proporsi rumah tangga yang berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,- meningkat menjadi 3,3 persen. Perubahan distribusi pendapatan rumah tangga seperti tersebut

tidak terlihat di antara rumah tangga terpilih di Kelurahan Pundata Baji. Proporsi rumah tangga berpenghasilan kecil (kurang dari Rp. 500.000,- setiap bulan) bahkan sedikit lebih banyak pada tahun 2008 daripada tahun 2006, yaitu 25,8 persen dan 25 persen secara berturut-turut. Selanjutnya, proporsi rumah tangga yang berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,- per bulan juga berkurang dari 6 persen pada tahun 2006 menjadi 5,8 persen di tahun 2008.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, peningkatan pendapatan masyarakat di atas tidak dapat dikatakan semata-mata karena peranan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan COREMAP. Banyak faktor lain yang berperan menyebabkan terjadinya kondisi tersebut. Salah satu di antaranya semakin bervariasinya pekerjaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga di lokasi penelitian. Di Desa Mattiro Bombang, umpamanya, jika pada tahun 2006 mayoritas penduduk mempunyai sumber pendapatan utama dari kegiatan kenelayanan, maka pada tahun 2008 banyak di antara mereka yang melakukan kegiatan ekonomi di sektor-sektor lain. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak terpengaruh oleh kondisi cuaca, sehingga mereka bisa memperoleh pendapatan yang relatif lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2008 kesempatan kerja lebih terbuka luas, bahkan juga untuk mereka yang berumur di bawah usia kerja. Kesempatan kerja untuk anak-anak usia sekolah, khususnya di Desa Mattiro Bombang lebih terbuka luas dengan adanya beberapa usaha pengupasan kepiting (dikenal dengan sebutan *mini plan*) yang baru dibuka. Banyak anak usia sekolah yang memanfaatkan kesempatan ini, sehingga mereka bisa memperoleh pendapatan. Kegiatan yang mereka lakukan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja, termasuk anak-anak usia sekolah, memungkinkan rumah tangga untuk mengalami peningkatan pendapatan.

Selain faktor di atas, berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah (selain COREMAP) juga berperan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga di lokasi penelitian. Seperti halnya COREMAP, program-program tersebut juga bertujuan untuk

meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, melalui bantuan pinjaman modal usaha. Bagi sebagian nelayan, dana pinjaman yang diterima digunakan untuk meningkatkan kemampuan armada tangkap, misalnya membeli mesin perahu berkapasitas lebih besar, atau memperbanyak jenis dan jumlah alat tangkap. Dengan kemampuan armada tangkap yang lebih besar mereka dapat berlayar sampai jauh, sehingga volume produksi dalam setiap kegiatan melaut menjadi lebih besar. Selain itu, jenis dan jumlah alat tangkap yang lebih banyak juga memungkinkan mereka untuk memperbesar volume produksi. Kedua hal tersebut berperan besar dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka setiap bulan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
RANGKUMAN	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kerusakan Terumbu Karang	1
1.2. Upaya Pengelolaan Terumbu Karang	2
1.3. COREMAP di Kabupaten Pangkajene dan kepulauan	4
1.4. Tentang Buku Ini	5
BAB II PENGELOLAAN TERUMBU KARANG MELALUI COREMAP DI KABUPATEN PANGKEP.....	9
2.1. Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan COREMAP Di Tingkat Kabupaten	10
2.2. Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan COREMAP di Tingkat Lokasi (Desa/ Kelurahan)	21
BAB III PELAKSANAAN COREMAP: Pengetahuan, Partisipasi Masyarakat, dan Manfaat Bagi Masyarakat	41
3.1. Penduduk Desa Mattiro Bombang : Pengetahuan Mengenai COREMAP dan Partisipasi dalam Berbagai Kejadiannya	41

3.2	Penduduk Kelurahan Pundata Baji : Pengetahuan Mengenai COREMAP dan Partisipasi dalam Berbagai Kegiatannya	47
BAB IV	DINAMIKA PENDAPATAN PENDUDUK	53
4.1.	Pendapatan Kabupaten Pangkep	54
4.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkep.....	54
4.1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha : Fokus Pada Sumbangan Sektor Pertanian	55
4.1.3.	PDRB Per Kapita	59
4.2.	Pendapatan Rumah Tangga Terpilih dan Perubahannya	61
4.2.1.	Pendapatan Rumah Tangga di Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tuppabiring.....	61
4.2.2.	Pendapatan Rumah Tangga di Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang	73
4.3.	Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perubahan Pendapatan	84
4.3.1.	Faktor Struktural	84
4.3.2.	Faktor Internal	86
4.3.3.	Faktor Eksternal	89
BAB V	PENUTUP	93
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Kegiatan COREMAP, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)43
Tabel 3.2	Distribusi Responden yang Mengetahui Kegiatan COREMAP Menurut Keterlibatannya, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)45
Tabel 3.3	Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Kegiatan COREMAP, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)48
Tabel 3.4	Distribusi Responden yang Mengetahui Kegiatan COREMAP Menurut Keterlibatannya, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)49
Tabel 4.1	PDRB Kabupaten Pangkep dan Pertumbuhannya 2000-200655
Tabel 4.2	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pangkep Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Kabupaten Pangkep Tahun 2000-2006 (dengan Semen Tonasa).....56
Tabel 4.3	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Kabupaten Pangkep Tahun 2001-2006 (%) (dengan Semen Tonasa)57

Tabel 4.4	Pertumbuhan Sektor Pertanian Kabupaten Pangkep Menurut Sub-sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2001-2006 (%)	58
Tabel 4.5	Distribusi PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Pangkep Menurut Sub-sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2001-2006 (%)	59
Tabel 4.6	Rata-Rata PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Pangkep dan Sulawesi Selatan Tahun 2001-2006 (Rupiah)	60
Tabel 4.7	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (Rupiah).....	63
Tabel 4.8	Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Besar Pendapatan, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (%)	64
Tabel 4.9	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih Menurut Lapangan Kerja Utama Kepala Rumah Tangga dan Besar Pendapatan, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (Rupiah)	65
Tabel 4.10	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (Rupiah).....	68
Tabel 4.11	Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (%).....	70

Tabel 4.12	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih yang Salah Satu ART-nya Menjadi Anggota dan Bukan Anggota Pokmas/COREMAP, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkep, 2008 (Rupiah)	71
Tabel 4.13	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas/COREMAP Menurut Lapangan Pekerjaan KRT, Desa Mattiro Bombang Kabupaten Pangkep, 2008 (Rupiah)	72
Tabel 4.14	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (Rupiah)	75
Tabel 4.15	Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Besar Pendapatan Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (%)	76
Tabel 4.16	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (Rupiah).....	77
Tabel 4.17	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (Rupiah)	79
Tabel 4.18	Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (%).....	80

Tabel 4.19	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih yang Salah Satu ART-nya Menjadi Anggota dan Bukan Anggota Pokmas/COREMAP, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkep, 2008 (Rupiah).....	82
Tabel 4.20	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas/COREMAP Menurut Lapangan Pekerjaan KRT, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkep 2008 (Rupiah).....	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Kelembagaan COREMAP II – Kabupaten Pangkep	11
Gambar 2.2 Struktur Kelembagaan LPSTK	23

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 3.1	Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Tentang Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)107
Tabel 3.2	Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Kegiatan Ekonomi Menurut Sumber Informasi Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)108
Tabel 3.3	Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP dan Keterlibatannya Desa Mattiro Bombang, 2008 (%).....108
Tabel 3.4	Distribusi Responden yang Terlibat dalam Kegiatan Ekonomi COREMAP Menurut Manfaat yang Dirasakan, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)109
Tabel 3.5	Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Jenis Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)109
Tabel 3.6	Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP Menurut Keterlibatannya, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)110
Tabel 3.7	Distribusi Responden yang Terlibat dalam Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP Menurut Manfaat yang Dirasakan, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)110

Tabel 3.8	Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Tentang Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%).....	111
Tabel 3.9	Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Kegiatan Ekonomi Menurut Sumber Informasi, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%).....	111
Tabel 3.10	Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP dan Keterlibatannya, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%).....	112
Tabel 3.11	Distribusi Responden yang Terlibat dalam Kegiatan Ekonomi COREMAP Menurut Manfaat yang Dirasakan, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%).....	112
Tabel 3.12	Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Jenis Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%).....	113
Tabel 3.13	Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP Menurut Keterlibatannya, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%).....	113
Tabel 3.14	Distribusi Responden yang Terlibat dalam Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP Menurut Manfaat yang Dirasakan, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%).....	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kerusakan Terumbu Karang

Fenomena kerusakan terumbu karang telah sampai pada kondisi yang mengkhawatirkan¹. Hasil pantauan di 686 stasiun pantau di seluruh Indonesia memperlihatkan bahwa sebanyak 31,92 persen terumbu karang berada dalam kondisi kurang baik, sekitar 36,59 persen dalam kategori cukup baik, dan sisanya, 25,66 persen mempunyai kondisi baik serta 5,83 persen dengan kondisi sangat baik (Suharsono 2005 dikutip dalam Noveria dkk. 2008). Hal ini berarti hanya sekitar sepertiga lokasi terumbu karang yang dipantau termasuk dalam kondisi baik dan sangat baik.

Di wilayah perairan Sulawesi Selatan pada umumnya, serta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) khususnya, juga ditemui kondisi serupa. Ini terbukti dari hasil pemantauan terhadap kondisi terumbu karang yang dilakukan oleh tim peneliti dari Pusat Penelitian Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O –

¹ Kerusakan terumbu karang terjadi akibat faktor alami dan perilaku manusia. Faktor-faktor alam yang menyebabkan kerusakan terumbu karang antara lain adanya organisme laut yang berfungsi sebagai predator seperti bintang laut dan bencana alam, khususnya gempa bumi yang bersumber dari laut. Dari sisi manusia, faktor dominan penyebab rusaknya terumbu karang adalah praktik-praktik pemanfaatan sumber daya laut yang destruktif. Kegiatan penangkapan ikan dan sumber daya laut lainnya menggunakan armada dan alat tangkap yang merusak terumbu karang menjadi fenomena keseharian yang ditemui di berbagai wilayah perairan di Indonesia. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh nelayan dengan modal besar, meskipun tidak tertutup kemungkinan sebagian nelayan tradisional juga melakukan hal yang sama. Selain itu, beberapa perilaku penduduk kepulauan dan pesisir juga memberikan kontribusi atas kerusakan terumbu karang. Membuang sampah ke laut merupakan perilaku penduduk yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya laut, yang secara tidak langsung menimbulkan kerusakan terumbu karang.

LIPI). Dari 18 lokasi stasiun pantau di seluruh wilayah Kabupaten Pangkep, kondisi terumbu karang yang tergolong kurang baik ditemukan di 11 lokasi, sedangkan di lokasi yang lain kondisinya hanya dalam kategori cukup. Sementara itu, untuk tutupan karang hidup, terjadi penurunan dari 34,68 persen pada tahun 2006 menjadi 30,42 persen pada 2007 (Manuputty 2007).

Kerusakan terumbu karang menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan alam dan juga manusia, khususnya masyarakat yang hidup di wilayah pulau dan pesisir di sekitarnya. Terumbu karang berfungsi sebagai tempat hidup dan berkembangbiaknya berbagai jenis biota laut, seperti ikan dan jenis-jenis sumber daya laut lainnya, termasuk yang bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, kerusakannya berarti terganggunya kehidupan jenis-jenis biota laut yang hidup padanya. Hal ini selanjutnya berpotensi menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem laut. Bagi penduduk yang mata pencahariannya tergantung pada sumber daya laut, berkurangnya jenis-jenis sumber daya laut yang hidup di terumbu karang dan di sekitarnya, terutama yang bernilai ekonomi tinggi, sangat mempengaruhi penghasilan mereka. Hal ini disebabkan berkurangnya hasil tangkapan dan bahkan pada kondisi yang paling buruk, nelayan tidak lagi menangkap jenis-jenis sumber daya laut tertentu karena sangat sulit mendapatkannya. Selain itu, kerusakan terumbu karang memaksa nelayan untuk berlayar ke lokasi yang lebih jauh agar bisa memperoleh hasil tangkapan yang 'memadai' sehingga biaya produksi menjadi lebih besar.

1.2. Upaya Pengelolaan Terumbu Karang

Agar kerusakan terumbu karang tidak semakin berlanjut, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan beberapa lembaga donor, antara lain *Asian Development Bank* (ADB) dan *World Bank* (WB), telah meluncurkan program untuk menjaga dan merehabilitasi kondisi sumber daya laut tersebut. Program tersebut adalah *Coral Reef Rehabilitation and Management Program* (COREMAP), yang dilaksanakan dalam tiga fase, yaitu fase inisiasi, fase implementasi, dan fase akselerasi. Semua lokasi implementasi COREMAP dipilih

sesuai dengan kesepakatan antara kedua lembaga pemberi dana tersebut dengan pemerintah Indonesia. Pelaksanaan semua kegiatan COREMAP melibatkan berbagai *stakeholders* dari institusi-institusi terkait, mulai dari tingkat nasional, kabupaten/kota, sampai ke desa/kelurahan yang terpilih sebagai lokasi program.

COREMAP terdiri dari berbagai komponen, tidak hanya yang menyangkut kondisi bio-fisik terumbu karang serta sumber daya laut lainnya (aspek ekologi), tetapi juga mencakup komponen yang terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di perairan sekitar lokasi terumbu karang. Hal ini karena aktivitas sosial ekonomi masyarakat sangat terkait dengan kelestarian hidup sumber daya laut tersebut. Aktivitas ekonomi yang merusak, misalnya menangkap ikan menggunakan bom menyebabkan terganggunya kehidupan dan kelestarian terumbu karang. Untuk menjaga kehidupan sumber daya laut tersebut, berbagai tindakan pengrusakan terkait aktivitas pemanfaatan sumber daya laut harus dicegah. Oleh karena itu, masyarakat menjadi salah satu fokus intervensi kegiatan COREMAP, di samping rehabilitasi kondisi bio-fisik terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya.

Komponen-komponen COREMAP meliputi: (1) *Public Awareness* (PA), (2) *Community Based Management* (CBM), (3) *Marine Conservation Area* (MCA), (4) *Management, Controlling, and Surveillance* (MCS), dan (5) *Coral Reef Information, Training, and Controlling* (CRITC). Salah satu kegiatan dalam komponen CBM adalah penciptaan mata pencaharian alternatif, yang terutama bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya laut. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya laut berpotensi untuk mengurangi kerusakan terumbu karang. Adanya mata pencaharian alternatif menyebabkan berkurangnya intensitas eksploitasi sumber daya laut yang dapat berakibat pada kerusakan terumbu karang. Bersama dengan komponen COREMAP lainnya seperti MCA dan MCS, kegiatan penciptaan mata pencaharian alternatif diharapkan dapat mempertahankan serta menjaga kondisi

terumbu karang karena eksploitasi terhadap terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya menjadi berkurang.

Keberhasilan program COREMAP diukur menggunakan beberapa indikator, dari aspek bio-fisik maupun sosial ekonomi. Dari aspek sosial ekonomi, indikator capaian tujuan program ini meliputi: (1) peningkatan pendapatan dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya sebesar sepuluh persen pada akhir tahun 2009, (2) sedikitnya 70 persen dari masyarakat nelayan (*beneficiaries*) di kabupaten lokasi program merasakan dampak positif COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan dan status sosial ekonominya (World Bank 2004). Selanjutnya, dari aspek bio-fisik indikator keberhasilan program ini antara lain penambahan luas tutupan karang serta jenis-jenis biota laut lainnya, termasuk yang hidup pada terumbu karang.

1.3. COREMAP di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Di Kabupaten Pangkep kegiatan COREMAP telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Mengacu pada fase pelaksanaannya, kegiatan COREMAP di kabupaten ini termasuk dalam fase kedua, setelah kegiatan fase pertama dilakukan di Kabupaten Selayar. Sampai dengan tahun 2008 kegiatan COREMAP di Kabupaten Pangkep dilaksanakan di 10 kecamatan, yang secara keseluruhan mencakup 37 desa/kelurahan. Kecuali tiga kecamatan yang terletak di daratan dan dataran tinggi, yaitu Minasa Te'ne, Tondong Tallasa, dan Balocci, semua kecamatan di wilayah kepulauan serta wilayah pesisir dan dataran rendah di Kabupaten Pangkep merupakan lokasi kegiatan program pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang tersebut.

Seperti berbagai program (pembangunan) lainnya, pelaksanaan COREMAP juga perlu dipantau dan dievaluasi. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui kinerja program. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program dengan rancangannya. Hasil pemantauan sangat diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja program. Selanjutnya, kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian program sesuai

dengan tahapannya. Melalui kegiatan evaluasi, capaian terhadap target-target yang ditetapkan untuk semua komponen dalam jangka waktu tertentu dapat terlihat. Hal ini menjadi dasar untuk (perbaikan) penyelenggaraan program di masa selanjutnya.

Sebagai program yang direncanakan dalam jangka panjang, diperlukan informasi mengenai pelaksanaan berbagai kegiatan COREMAP serta dampak, terutama yang positif, yang ditimbulkan bagi masyarakat secara berkala. Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan COREMAP bermanfaat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana program serta faktor-faktor pendukung dan penghambat kelancaran kegiatan, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk perbaikan kinerja program di masa mendatang. Selanjutnya, informasi mengenai dampak diperlukan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan kegiatan terhadap kehidupan masyarakat di lokasi implementasi, khususnya pada aspek-aspek yang terkait dengan intervensi program.

Perbandingan kondisi masyarakat sebelum dilaksanakan dan setelah COREMAP berjalan diperlukan untuk mengetahui dampak pelaksanaan program pengelolaan terumbu karang tersebut terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa kajian pada waktu yang berbeda, yaitu sebelum COREMAP dilaksanakan dan setelah program berjalan selama beberapa waktu tertentu. Salah satu aspek yang dikaji adalah pendapatan masyarakat karena target COREMAP di antaranya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sebesar 10 persen selama masa implementasi program (lima tahun) atau dua persen per tahun.

1.4. Tentang Buku Ini

Buku ini membahas upaya rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang yang dilakukan melalui COREMAP di Kabupaten Pangkep, dengan penekanan khusus pada dua lokasi terpilih. Informasi dalam buku ini bersumber dari penelitian mengenai pelaksanaan kegiatan COREMAP yang dikaitkan dengan kehidupan ekonomi masyarakat dan juga partisipasi mereka dalam implementasi program tersebut.

Penelitian secara umum bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, setelah pelaksanaan berbagai kegiatan yang termasuk dalam cakupan COREMAP. Hal ini dimaksudkan untuk memantau dampak program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang tersebut terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat pendapatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan mengidentifikasi dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dua lokasi COREMAP di Kabupaten Pangkep, yaitu satu kelurahan di wilayah pesisir dan satu desa di daerah kepulauan terpilih sebagai lokasi penelitian tersebut. Kelurahan di daerah pesisir adalah Pundata Baji, yang termasuk wilayah Kecamatan Labakkang, sedangkan desa di kepulauan yaitu Desa Mattiro Bombang, salah satu desa di Kecamatan Liukang Tupabbiring. Data yang dikumpulkan mencakup data primer yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, sesuai dengan jenisnya. Selain itu, dikumpulkan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber.

Buku ini terdiri dari lima bab dengan fokus yang berbeda pada masing-masing bab. Bab I “Pendahuluan” berisi informasi mengenai fenomena kerusakan terumbu karang di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Pangkep pada khususnya, serta upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi kondisi sumber daya laut tersebut. Dalam Bab II disajikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan COREMAP di Kabupaten Pangkep, mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan lokasi (desa/kelurahan) implementasi. Pihak pelaksana, kegiatan sosialisasi untuk mengenalkan COREMAP kepada masyarakat, dan jalannya kegiatan masing-masing komponen COREMAP menjadi fokus utama dalam bab ini. Selain untuk mengetahui proses implementasinya, informasi dalam bab II bermanfaat sebagai *lesson learned* untuk pelaksanaan program (seperti) COREMAP di masa mendatang. Bab III membahas pengetahuan masyarakat di lokasi COREMAP tentang berbagai hal terkait program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang tersebut. Dalam bab III juga

digambarkan partisipasi masyarakat di lokasi COREMAP dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program tersebut. Selanjutnya, Bab IV menyajikan informasi mengenai pendapatan penduduk dan perubahannya mulai dari awal pelaksanaan kegiatan COREMAP sampai dengan dua tahun setelahnya. Pembahasan mengenai pendapatan disertai dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal. Buku ini ditutup dengan Bab V yang berisi kesimpulan dan bahan-bahan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan COREMAP pada tahap-tahap selanjutnya.

BAB II

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG MELALUI COREMAP DI KABUPATEN PANGKEP

COREMAP di Kabupaten Pangkep secara efektif mulai dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2005, setelah semua persyaratan administratif diselesaikan. Awalnya pelaksanaan program tersebut hanya meliputi dua kecamatan, yaitu satu kecamatan kepulauan (Kecamatan Liukang Tupabbiring) dan satu kecamatan pesisir (Kecamatan Labakkang). Seiring dengan berjalannya waktu, cakupan wilayah pelaksanaan program diperluas ke kecamatan-kecamatan lainnya. Pada tahun 2008 lokasi kegiatan COREMAP menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yaitu 3 (tiga) kecamatan di kepulauan (Liukang Tupabbiring, Liukang Tangaya, dan Liukang Kalmas) dan 6 (enam) kecamatan di pesisir, yaitu Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, dan Mandalle.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan COREMAP tidak luput dari berbagai permasalahan dan kendala. Permasalahan dan kendala muncul karena berbagai sebab, antara lain ketentuan/persyaratan administratif yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk membiayai berbagai kegiatan dan keterbatasan sumber daya manusia pelaksana program, khususnya di tingkat desa/kelurahan. Terkait dengan pelaksana kegiatan di tingkat paling bawah, hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah personil serta kemampuan mereka dalam mengelola program. Kegiatan tersebut juga baru dilaksanakan selama kurang dari tiga tahun sehingga pengalaman para pelaksana di masing-masing tingkat masih terbatas. Selain itu, kurangnya respon dari kelompok target program menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan COREMAP. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kinerja program masih kurang optimal, yang pada gilirannya dapat berpengaruh terhadap capaian target program.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi perlu dikenali untuk menemukan solusi yang tepat. Mengingat COREMAP merupakan program jangka panjang, maka kegagalan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak awal pelaksanaannya berpotensi menghambat tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan capaian program tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rancangan program.

Bab ini berisi informasi mengenai pelaksanaan kegiatan COREMAP di Kabupaten Pangkep serta berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi. Pembahasan mencakup penyelenggaraan di seluruh tingkat, mulai dari kabupaten sampai dengan desa/wilayah yang terpilih sebagai lokasi kegiatan. Khusus di tingkat desa, pembahasan dibatasi hanya pada dua lokasi penelitian, yaitu Desa Mattiro Bombang (Kecamatan Liukang Tupabbiring) dan Kelurahan Pundata Baji (Kecamatan Labakkang).

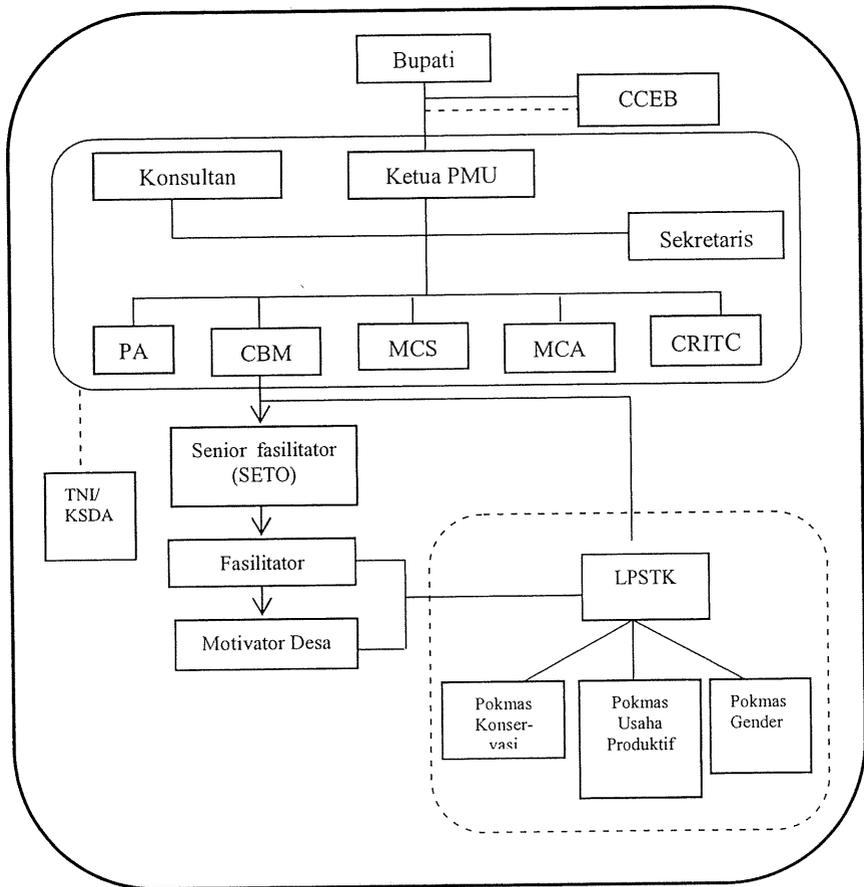
2.1. Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan COREMAP Di Tingkat Kabupaten

PMU (Project Management Unit)

Kegiatan COREMAP di Kabupaten Pangkep dilaksanakan di bawah koordinasi PMU (*Project Management Unit*), yang diketuai oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pangkep. PMU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua kegiatan COREMAP yang mencakup lima komponen, yaitu (1) PA (*Public Awareness*) – penyadaran masyarakat, (2) CBM (*Community Based Management*) – pengelolaan berbasis masyarakat, (3) MCS (*Monitoring, Controlling and Surveillance*), (4) MCA (*Marine Conservation Area*) – daerah perlindungan laut, dan (5) CRITC (*Coral Reef Information and Training Center*). Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh PMU COREMAP dikoordinasikan dengan pihak-pihak lain yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah kabupaten, yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) serta CCEB (*Coastal Community Empowerment Board*) – Dewan Pemberdayaan

Masyarakat Pesisir. Sebagaimana pelaksana kegiatan pembangunan lainnya, PMU COREMAP berada di bawah koordinasi bupati sebagai kepala daerah kabupaten.

Gambar 2.1. Struktur Kelembagaan COREMAP II Kabupaten Pangkep



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep.

Pada awal pelaksanaannya, beberapa ketua komponen COREMAP adalah pejabat dari institusi selain DKP, seperti dari Bappeda dan Kepolisian. Namun, dengan berbagai pertimbangan, seperti untuk lebih memudahkan koordinasi, maka saat ini semua koordinator dijabat oleh pejabat dari DKP. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika saat penelitian berlangsung ditemukan beberapa koordinator komponen yang baru saja menduduki posisi tersebut. Sebelum menjalankan tugasnya, para koordinator baru harus mempelajari semua kegiatan yang menjadi tugas komponen COREMAP yang dikoordinirnya. Hal ini membutuhkan waktu sehingga dapat menjadi kendala dalam pencapaian target program sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Agar kegiatan masing-masing komponen dapat dilaksanakan sesuai dengan rancangan program, diperlukan tenaga lapangan yang secara teknis mendampingi masyarakat di lokasi COREMAP. Tenaga lapangan bertanggung jawab sebagai pendamping masyarakat untuk melaksanakan semua kegiatan COREMAP, meliputi fasilitator senior, fasilitator (masyarakat) – FM dan motivator desa (MD). FM bertugas di beberapa desa lokasi COREMAP, sedangkan MD hanya bertanggung jawab mendampingi masyarakat di desa masing-masing. Sementara itu, wilayah tugas fasilitator senior (yang dikenal pula sebagai SETO – Senior Training Officer) mencakup satu kecamatan SETO bertanggung jawab pula untuk mengkoordinir kegiatan FM. Sampai pertengahan tahun 2008, terdapat 12 orang SETO dan 18 orang FM di seluruh Kabupaten Pangkep. Selanjutnya, jumlah MD adalah 42 orang pada tahun 2007 dan bertambah menjadi 74 orang pada tahun 2008 (wawancara dengan pengurus PMU).

Dalam melaksanakan tugasnya, PMU COREMAP dibantu oleh konsultan, yang direkrut dari tenaga pengajar/dosen perguruan tinggi di Kota Makassar. Sesuai dengan rancangan program, masing-masing komponen COREMAP didampingi oleh seorang konsultan, tapi sampai penelitian berlangsung hanya tiga komponen yang secara definitif memiliki konsultan. Ketiga komponen tersebut adalah PA, CBM, dan MCA. Dua komponen lainnya, yaitu MCS dan CRITC tidak memiliki konsultan sehingga tugas pendampingan dilakukan

oleh konsultan komponen lain, misalnya konsultan MCA juga merangkap sebagai konsultan CRITC. Untuk mengkoordinir kegiatan para konsultan, terdapat seorang *consultant leader* yang mempunyai kedudukan sebagai *marine management advisor* – penasehat pengelolaan laut.

Idealnya, konsultan mulai bekerja sejak awal kegiatan dilaksanakan. Namun, dalam kenyataannya keterlibatan para konsultan baru dimulai pada awal tahun 2008. Dengan demikian, lebih dari dua tahun kegiatan berlangsung tanpa supervisi dari konsultan. Hal ini menjadi salah satu penyebab beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai dengan rancangan COREMAP, sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang konsultan berikut, "... begitu kita masuk, kita harus membenahi dulu semua yang sudah dikerjakan. Jadi kesannya konsultan itu ditakuti".

Komponen COREMAP

Pelaksana teknis dari berbagai kegiatan COREMAP adalah komponen-komponen yang ada dalam program ini, sesuai dengan tugas masing-masing, dibantu oleh petugas lapangan seperti SETO, FD, dan MD. Meskipun masing-masing komponen mempunyai tugas yang berbeda satu sama lainnya, dalam kenyataannya terdapat beberapa kegiatan komponen-komponen COREMAP yang saling berhubungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sangat diperlukan koordinasi antar semua pelaksana komponen agar tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu, perlu dihindari adanya kegiatan yang sama sekali tidak dilakukan karena dianggap sudah dilaksanakan oleh komponen yang lain.

Bagian ini membahas pelaksanaan kegiatan di masing-masing komponen dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, bagian ini mengidentifikasi keberhasilan yang dicapai, yang dapat digunakan sebagai *lesson learned* untuk pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

PA (Public Awareness)

Kegiatan PA bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya memelihara kelestarian terumbu karang, khususnya, dan sumber daya laut pada umumnya. Secara garis besar, kegiatan yang dilakukan oleh komponen PA adalah (1) pengembangan materi untuk bahan penyadaran masyarakat, (2) pelatihan untuk *stakeholders* yang akan menyampaikan pesan-pesan penyadaran masyarakat, (3) sosialisasi kepada masyarakat, (4) lomba inovator muda, dan (5) lomba cerdas cermat. Uraian berikut berisi penjelasan mengenai masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh komponen PA.

o Pengembangan materi untuk penyadaran masyarakat.

Berbagai materi dirancang sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan upaya pemeliharaan terumbu karang. Materi dibuat dalam bentuk poster, *leaflet*, kalender, jam, gelas, dan kaos yang memuat pesan-pesan singkat atau ungkapan-ungkapan untuk menjaga kelestarian terumbu karang. Pesan-pesan tersebut ditulis dalam bahasa Indonesia serta bahasa daerah, khususnya bahasa Bugis dan Makassar. Penulisan pesan dalam bahasa daerah dimaksudkan agar efeknya lebih kuat di masyarakat karena disampaikan dalam bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Dengan demikian, isi pesan dapat meresap lebih dalam dan diharapkan dapat mendorong timbulnya keinginan untuk menyelamatkan kondisi terumbu karang.

Semua materi yang sudah disiapkan oleh pelaksana COREMAP di tingkat kabupaten dikirim ke berbagai lokasi COREMAP. Poster ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, seperti tempat berkumpul masyarakat (pos keamanan kampung), di samping ditempel di kantor LPSTK. Selanjutnya, *leaflet* juga diletakkan di kantor LPSTK dan dapat dilihat oleh semua orang yang datang ke sana. Kalender, jam, gelas, dan kaos dibagikan kepada masyarakat yang menjadi anggota pokmas COREMAP. Banyaknya pesan mengenai pentingnya terumbu karang serta ajakan untuk melestarikannya yang bisa dibaca di baju

kaos yang dipakai penduduk dan di kalender yang dipajang di rumah-rumah akan menimbulkan kesan yang kuat mengenai perlunya upaya-upaya pelestarian terumbu karang.

- Pelatihan untuk *stakeholders* yang akan menyampaikan pesan-pesan penyadaran masyarakat

Kegiatan pelatihan dilakukan untuk kelompok-kelompok yang mempunyai peran strategis di masyarakat. Materi yang diberikan dalam pelatihan adalah pengetahuan mengenai terumbu karang serta manfaatnya untuk menjaga ekosistem perairan. Selain itu, diberikan pemahaman bahwa terumbu karang yang terjaga kelestariannya mempunyai potensi ekonomi yang besar bagi penduduk yang mata pencahariannya mengandalkan sumber daya laut. Peserta pelatihan adalah da'i pesisir, dan guru-guru sekolah dasar (SD). Da'i diharapkan dapat menyampaikan pesan-pesan tentang pelestarian terumbu karang melalui dakwah mereka di mesjid-mesjid di lokasi COREMAP. Selanjutnya, guru-guru SD dipilih sebagai peserta pelatihan agar dapat menyampaikan materi pelajaran yang berisi pemahaman mengenai pentingnya terumbu karang serta manfaatnya bagi kehidupan masyarakat kepulauan dan pesisir. Isu tersebut merupakan materi dalam mata pelajaran muatan lokal yang telah diberikan sejak beberapa tahun terakhir untuk murid-murid SD di wilayah kepulauan dan pesisir di Kabupaten Pangkep. Selain pelatihan, dilaksanakan *workshop* bagi guru-guru SD untuk penyusunan kurikulum muatan lokal.

Selain untuk kelompok *stakeholders* di atas, pelatihan dilakukan untuk anak-anak muda yang tinggal di lokasi COREMAP. Materi yang diajarkan adalah keterampilan berkomunikasi, termasuk komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan pelestarian terumbu karang. Dengan banyaknya kelompok masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan mengenai pentingnya terumbu karang dan upaya-upaya penyelamatannya, maka diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang luas mengenai terumbu karang dan ekosistem laut pada umumnya.

- Sosialisasi kepada masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan penting untuk mendukung kelancaran kegiatan COREMAP. Sosialisasi difokuskan pada isu-isu yang terkait dengan terumbu karang, termasuk manfaat yang diperoleh dari terumbu karang yang terjaga kondisinya atau sebaliknya, kerugian yang diderita akibat kerusakan sumber daya laut tersebut. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pemutaran film dengan topik tersebut. Selain itu, dilakukan pertemuan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di lokasi COREMAP. Tenaga teknis lapangan, yaitu fasilitator dan SETO berperan penting untuk terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini.

Kegiatan sosialisasi berupa pertemuan yang melibatkan peserta dalam jumlah yang besar telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2006 dan 2007. Selain itu, direncanakan dua kali kegiatan sosialisasi lagi ke desa-desa lokasi COREMAP. Dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut sudah disediakan oleh pihak PMU.

- Lomba inovator muda

Kegiatan ini ditujukan untuk pelajar SMP dan SMA dalam bentuk lomba mengarang dengan topik terumbu karang. Lomba inovator muda ini diselenggarakan di lokasi COREMAP.

- Lomba cerdas cermat

Lomba cerdas cermat telah dilaksanakan sebanyak 2 kali di Pangkajene, ibukota Kabupaten Pangkep. Peserta lomba ini adalah murid-murid SD dan materi yang dilombakan adalah pengetahuan yang berkaitan dengan terumbu karang dan lingkungan dalam arti luas. Selain lomba cerdas cermat, untuk murid-murid SD juga dilakukan pemilihan 'duta karang' serta lomba menggambar dengan tema lingkungan hidup.

CBM (Community Based Management)

Sejak kegiatan COREMAP dilaksanakan di Kabupaten Pangkep pada tahun 2005, komponen CBM telah melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi tugasnya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain (1) pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK), (2) pelatihan untuk MD, fasilitator, dan SETO, serta (3) pelatihan pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Bersama dengan kegiatan komponen-komponen COREMAP lainnya, kegiatan yang dilakukan oleh komponen CBM sangat mendukung keberhasilan COREMAP.

LPSTK merupakan pelaksana dan penanggungjawab kegiatan COREMAP di tingkat desa/kelurahan. Lembaga ini dibentuk sebelum kegiatan program ini dilaksanakan di tingkat masyarakat. Pembentukan LPSTK dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pelaksana dan penanggung jawab komponen CBM serta SETO masing-masing lokasi COREMAP. Semua kegiatan yang dilakukan oleh LPSTK berada di bawah koordinasi komponen CBM.

Pelatihan untuk MD, fasilitator, serta SETO mencakup berbagai materi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan COREMAP. Pelatihan untuk ketiga kelompok ini tidak terbatas hanya pada awal pelaksanaan COREMAP. Selama program berjalan beberapa kali pelatihan diberikan untuk MD, fasilitator, dan SETO, sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan karena kelompok pelaksana teknis lapangan ini perlu dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk kegiatan pendampingan bagi (kelompok) masyarakat yang terlibat dalam kegiatan COREMAP. Salah satu materi yang diberikan dalam pelatihan adalah penyusunan RPTK (Rencana Pengelolaan Terumbu Karang) (COREMAP II bekerjasama dengan Eco-Natural Society Kabupaten Pangkep 2006). Selain itu, penyusunan laporan kegiatan masing-masing pelaksana (MD, fasilitator, dan SETO) merupakan salah satu materi pelatihan.

Jika kegiatan pembentukan LPSTK dan pelatihan bagi MD, fasilitator, dan SETO telah dilaksanakan pada tahun 2007 atau

sebelumnya, pelatihan pengelolaan LKM² baru dilaksanakan sekitar bulan Maret 2008. Hal ini karena dana yang akan dikelola, yaitu *seed fund* dan *village grant*³ baru cair pada tahun 2008. Dana yang cair tersebut merupakan alokasi anggaran tahun 2007, sedangkan dana untuk kegiatan tahun 2008 belum turun sampai penelitian dilaksanakan (Bulan Juni 2008). Terlambatnya pencairan kedua jenis dana tersebut menyebabkan keterlambatan pelaksanaan beberapa kegiatan COREMAP, yang akan berakibat pada terhambatnya pencapaian target program ini.

Kegiatan LKM sangat terkait dengan kegiatan Pokmas Usaha Ekonomi Produktif (UEP). LKM merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penyalur dana bergulir yang akan dipinjamkan kepada anggota Pokmas ekonomi produktif tersebut. *Seed fund* untuk masing-masing lokasi COREMAP harus diterima oleh LKM melalui rekening atas nama ketuanya, sebelum dibagikan kepada anggota Pokmas UEP. Berdasarkan kesepakatan, jumlah dana terbesar yang dipinjamkan kepada anggota pokmas adalah Rp. 2.500.000,- per orang dan jumlah pinjaman terkecil sebesar Rp. 500.000,- per orang. Jumlah pinjaman untuk masing-masing anggota Pokmas UEP ditentukan berdasarkan kebutuhan, terutama jenis usaha yang mereka lakukan.

MCS (Monitoring, Controlling, and Surveillance)

Komponen MCS beranggotakan pihak-pihak yang berasal dari multisektor. Tidak hanya pelaksana dari DKP, komponen ini juga

² Pelatihan pengelolaan LKM diikuti oleh ketua dan bendahara LKM.

³ *Seed fund* dan *village grant* merupakan dua jenis dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan COREMAP di lokasi program ini. *Seed fund* dan *village grant* masing-masing berjumlah Rp. 50.000.000,- dan setiap lokasi COREMAP mendapatkan keduanya. *Seed fund* digunakan sebagai dana bergulir untuk usaha ekonomi bagi anggota masyarakat yang terlibat dalam Pokmas UEP (usaha ekonomi produktif). Dana ini merupakan pinjaman yang harus dicitil oleh anggota UEP, untuk digulirkan pemakaiannya kepada Pokmas yang lain. Selanjutnya, *village grant* merupakan dana bantuan desa yang dapat digunakan untuk pengadaan sarana kegiatan COREMAP, termasuk pengadaan fasilitas di kantor LPSTK seperti komputer dan pengadaan kapal yang akan digunakan sebagai armada untuk patroli laut.

terdiri dari pejabat kepolisian dan kejaksaan serta PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Hal ini sesuai dengan fungsinya untuk melaksanakan pemantauan dan pengontrolan berbagai kegiatan yang terkait dengan terumbu karang khususnya dan sumberdaya laut pada umumnya. Penanggung jawab kegiatan MCS adalah pejabat dari DKP Kabupaten Pangkep.

Seperti komponen-komponen COREMAP lainnya, MCS juga telah melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada tahun 2007 dilaksanakan kegiatan “Apel Siaga” dengan peserta dari berbagai unsur yang terkait dengan pengelolaan terumbu karang (wawancara dengan pengelola komponen MCS). Kegiatan ini berupa sosialisasi dan pemberian pengetahuan mengenai isu-isu pengelolaan sumberdaya laut, antara lain Undang-Undang Perikanan, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut. Materi pelatihan disampaikan oleh pejabat dari Polres dan Kodim Kabupaten Pangkep. Target yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah berkurangnya penggunaan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Pada tahun 2008 juga telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang didanai oleh anggaran tahun berjalan. Namun, terlambatnya pencairan dana menyebabkan tidak semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun 2008 adalah (1) pelatihan Pokmaswas (Pokmas Pengawasan)⁴ yang rencananya akan dilaksanakan sebanyak 4 angkatan, (2) penyusunan statistik perikanan⁵ di Kecamatan Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya, (3) penandaan DPL (daerah perlindungan laut) di dua kecamatan tersebut, serta (4) pengadaan kapal untuk kegiatan patroli laut.

⁴ Materi yang diberikan dalam pelatihan ini mencakup aturan-aturan tentang pengelolaan sumber daya laut serta tata cara dan mekanisme pelaporan pelanggaran aturan-aturan tersebut.

⁵ Statistik perikanan berisi berbagai data yang terkait dengan usaha perikanan, misalnya armada dan alat-alat tangkap yang digunakan nelayan.

Kegiatan monitoring yang dominan dilakukan oleh komponen COREMAP ini adalah penangkapan ilegal (*illegal fishing*). Kegiatan ini mencakup penggunaan cara, armada, dan alat tangkap terlarang, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Perikanan. Laporan penemuan kegiatan penangkapan ilegal disampaikan oleh anggota pokmaswas/pokmas konservasi kepada kepala desa/kelurahan. Untuk memudahkan penyampaian laporan “petugas” pemantau dilengkapi dengan pesawat HT (*handy talky*) yang diadakan melalui dana COREMAP. Pimpinan desa/kelurahan selanjutnya menyampaikan laporan yang diterima kepada polisi melalui Babinsa. Laporan pelanggaran tersebut kemudian diteruskan ke Polsek (Kepolisian Sektor) dan Polres (Kepolisian Resor). Namun dalam kenyataannya, sangat sedikit kasus pelanggaran yang ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi hukum. Hasil wawancara dengan narasumber dari berbagai kalangan memperlihatkan bahwa hampir tidak pernah ada kasus pelanggaran yang dibawa ke pengadilan setelah pelaku tertangkap. Pada umumnya pelaku pelanggaran dilepas sebelum menjalani proses persidangan di pengadilan.

CRITC (Coral Reef Information and Training Center)

Sesuai dengan namanya, CRITC bertanggung jawab untuk menyebarluaskan berbagai informasi serta menyelenggarakan pelatihan yang terkait dengan kegiatan COREMAP. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh komponen ini adalah: (1) survey sosial ekonomi, (2) creel, serta (3) publikasi dan diseminasi hasil penelitian. Pelaksanaan survei sosial ekonomi dikontrakkan kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan konsultan, karena CRITC tidak mempunyai tenaga peneliti. Untuk memperlancar kegiatan survei, COREMAP Kabupaten Pangkep sudah dilengkapi dengan peralatan pendukung, termasuk perangkat komputer. Hasil penelitian ini kemudian disampaikan kepada masyarakat dan juga digunakan sebagai bahan untuk pembuatan leaflet dan film dalam bentuk *compact disc* (CD) yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyadaran masyarakat.

Creel adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (peningkatan) pendapatan masyarakat setelah ditetapkannya daerah perlindungan laut (DPL). Asumsinya, dengan ditetapkannya DPL, maka kondisi laut, terutama di daerah sekitarnya, menjadi lebih terjaga sehingga tercipta lingkungan yang mendukung kehidupan berbagai sumber daya laut. Sumber daya laut yang melimpah sangat berpotensi untuk menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan.

Kegiatan creel baru dilakukan sebanyak satu kali, yaitu pada tahun 2007. Seperti halnya survei sosial ekonomi, kegiatan creel juga dilakukan oleh pihak ketiga, dengan sistem kontrak. Untuk tahun anggaran 2008, sampai dengan penelitian berlangsung kegiatan creel belum dapat dilaksanakan karena dana (dari COREMAP pusat) untuk kegiatan tersebut belum turun. Dana APBD kabupaten yang merupakan dana pendamping juga belum bisa dicairkan. Keadaan ini menjadi penghambat untuk mengetahui dampak dari salah satu kegiatan COREMAP, yaitu penetapan DPL.

Selain kegiatan-kegiatan di atas, CRITC telah melakukan berbagai pelatihan. Sebagai contoh, pada tahun 2006 telah dilakukan pelatihan monitoring ekologi, pelatihan survei sosial ekonomi, pelatihan selam dan pelatihan untuk peningkatan pengelolaan CRITC. Pelatihan-pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan para pelaksana COREMAP, yang akan memberikan dampak positif terhadap berbagai kegiatan dalam program ini.

2.2. Pengelolaan dan Pelaksanaan COREMAP Di Tingkat Lokasi (Desa/Kelurahan)

Pembentukan dan Kinerja Kelembagaan di Lokasi (LPSTK, Pokmas, Pokmaswas)

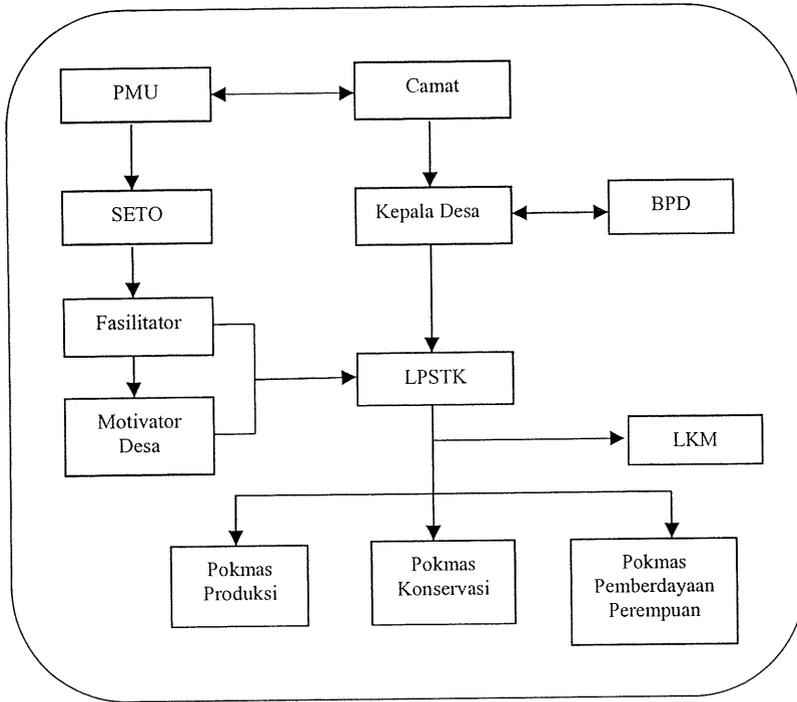
Ujung tombak pelaksanaan kegiatan COREMAP berada di desa/kelurahan yang terpilih sebagai lokasi sasaran. (Struktur) kelembagaan serta sumber daya manusia yang menjadi pelaksana dan pengelola kegiatan di tingkat yang paling rendah tersebut disesuaikan

dengan rancangan program yang bersifat nasional. Namun, sesuai dengan sifat program ini, yaitu "untuk masyarakat dan oleh masyarakat", maka para pelaksana di lokasi adalah penduduk setempat melalui kelembagaan yang dibentuk dalam kerangka kegiatan COREMAP. Pada bagian ini dibahas kelembagaan yang ada dalam kegiatan COREMAP, mulai dari pembentukan sampai dengan kinerjanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara umum lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP di lokasi adalah LPSTK. Semua kegiatan yang diselenggarakan dalam skema program ini berada di bawah koordinasi LPSTK. Struktur kelembagaan LPSTK serta hubungannya dengan kelembagaan di desa/kelurahan dapat dilihat pada gambar 2.2.

Lembaga pengelola sumber daya terumbu karang dibentuk oleh masyarakat di lokasi COREMAP dan difasilitasi oleh pengelola COREMAP di tingkat kabupaten serta di tingkat desa/kelurahan (SETO, FD, dan MD). Pembentukan LPSTK di kedua lokasi penelitian dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung SD yang terdapat di masing-masing lokasi. Setelah penyampaian materi mengenai COREMAP secara keseluruhan, yang mencakup antara lain tujuan serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya, dilakukan pembentukan LPSTK dan para pengurusnya. Proses pemilihan pengurus LPSTK di Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji dimulai dengan usulan nama-nama calon pengurus oleh mereka yang hadir dalam pertemuan sosialisasi. Calon-calon yang diusulkan menjadi pengurus lembaga pengelola terumbu karang di kedua lokasi tersebut adalah orang-orang yang biasanya aktif terlibat dalam berbagai kegiatan (pembangunan) di tempat tinggal mereka. Tokoh-tokoh informal seperti guru dan mereka yang berpendidikan tinggi merupakan calon-calon yang diusulkan sebagai pengurus LPSTK. Calon-calon yang akan mengisi posisi-posisi yang ada dalam kelembagaan LPSTK, seperti ketua dan bendahara, kemudian dipilih secara aklamasi.

Gambar 2.2. Struktur Kelembagaan LPSTK



Sumber: Pondok Informasi COREMAP Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji 2008.

Pembentukan pokmas serta pemilihan ketuanya dilakukan setelah pembentukan dan pemilihan pengurus LPSTK. Waktu yang singkat untuk pembentukan pokmas menyebabkan pemilihan anggota masing-masing pokmas tidak didasarkan pada minat dan keinginan mereka. Di Desa Mattiro Bombang, misalnya, penentuan anggota masing-masing kelompok dilakukan berdasarkan posisi duduk mereka pada saat pertemuan dilaksanakan. Salah seorang narasumber yang terlibat dalam pokmas produksi mengemukakan sebagai berikut,

Waktu mau bentuk kelompok tidak ditanya-tanya kita mau masuk kelompok mana. Cuma dibilang, "yang

duduk di bagian sini masuk kelompok produksi, yang duduk di situ kelompok pengawasan". Begitu caranya bentuk kelompok, setelah itu kita pulang dan tidak dikasih tau lagi bagaimana kerjanya.

Cara selain proses di atas dilakukan untuk pembentukan pokmas COREMAP. Hal ini terjadi pada pembentukan pokmas jender di Desa Mattiro Bombang. Pokmas dibentuk dengan terlebih menunjuk ketuanya, yaitu seorang ibu yang paling terlibat aktif dalam berbagai kegiatan di desa ini. Ketua kelompok terpilih selanjutnya memilih anggota kelompok, dengan pertimbangan keaktifan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tempat tinggal mereka.

Dalam perjalanannya, kemungkinan karena kebanyakan pokmas yang ada, terutama yang kegiatannya melibatkan usaha ekonomi produktif belum melaksanakan kegiatan mereka terjadi perubahan anggota pokmas. Ada anggota baru yang masuk dan sebaliknya, ada pula anggota yang keluar. Fenomena ini terjadi di Desa Mattiro Bombang, antara lain pada pokmas jender dan pokmas produksi. Perubahan anggota pokmas terjadi tanpa sepengetahuan ketuanya, sebagaimana dikemukakan oleh narasumber berikut, *"saya tidak tau kalau ibu X (nama seseorang) sudah tidak jadi anggota pokmas dan ibu Y (nama seseorang lainnya) masuk anggota, Siapa yang rubah itu anggota".* Selanjutnya, berikut adalah respon seorang ketua pokmas lainnya yang tidak mengetahui adanya perubahan anggota kelompoknya, *"saya tidak tau lagi siapa yang jadi anggota pokmas sekarang. Mungkin sudah berubah, tapi saya tidak tau siapa yang merubah".* Perubahan anggota pokmas diduga terjadi karena adanya kepentingan pihak-pihak tertentu, yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan COREMAP.

Layaknya berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan di banyak daerah, konflik-konflik dalam masyarakat juga terjadi dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP. Namun konflik-konflik tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk konflik terbuka. Perwujudan konflik terbatas pada prasangka-prasangka terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang dianggap ingin "menguasai" kegiatan COREMAP. Oleh karena itu, ada

kecenderungan untuk hanya melibatkan mereka yang dianggap mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok tersebut, misalnya saudara atau anggota keluarga besarnya.

Kondisi yang berbeda dengan di Desa Mattiro Bombang ditemukan di Kelurahan Pundata Baji. Kecuali untuk pokmas UEP, khususnya untuk kegiatan simpan pinjam, di kelurahan ini sulit mendapatkan anggota masyarakat yang bersedia terlibat dalam kegiatan-kegiatan COREMAP. Salah seorang narasumber yang diwawancarai di kelurahan pesisir ini mengemukakan sebagai berikut, *"Orang sini jarang yang mau diajak kegiatan, kalau diundang selalu bilang "sudah kamu saja yang ikut". Susah sekali orang sini mau berkumpul"*. Kenyataan ini kemungkinan merupakan salah satu penyebab keterlibatan seseorang pada lebih dari satu kelompok COREMAP. Tidak jarang yang terlibat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang relatif sudah berusia lanjut.

Keterbatasan anggota masyarakat yang bersedia terlibat dalam kegiatan COREMAP menyebabkan pembentukan pokmas COREMAP tidak melewati sistem pemilihan. Mereka yang bersedia untuk terlibat langsung ditunjuk sebagai ketua pokmas. Setelah itu, mereka menentukan anggotanya yang bisa jadi telah dipilih menjadi anggota pokmas yang lain. Proses ini terpaksa ditempuh untuk memenuhi struktur kelembagaan COREMAP sesuai dengan yang ditentukan dalam rancangan program.

Sejak pembentukan LPSTK sampai dengan pelaksanaan penelitian ketua lembaga ini di Desa Mattiro Bombang telah mengalami pergantian. Pergantian terjadi karena ketua LPSTK yang pertama kali terpilih pindah ke luar daerah karena alasan bekerja. Kepindahan ini juga dipengaruhi oleh tidak adanya kegiatan yang dilaksanakan setelah pembentukan LPSTK dan pemilihan pengurusnya. Sementara itu, di Kelurahan Pundata Baji terjadi kevakuman jabatan ketua LPSTK. Menurut salah seorang narasumber yang diwawancarai di kelurahan ini kevakuman terjadi karena adanya konflik dengan pengurus COREMAP yang lain di tingkat kelurahan. Konflik dipicu oleh ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dan pelaksanaannya, yang berujung pada pengunduran diri ketua lembaga

pengelola terumbu karang tersebut. Sampai penelitian dilaksanakan ketua LPSTK yang baru belum dipilih sehingga koordinasi kegiatan COREMAP dilakukan oleh pengurus LPSTK yang lain.

Kegiatan COREMAP di Lokasi

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan COREMAP di tingkat desa/kelurahan merupakan salah satu kunci keberhasilan program ini secara keseluruhan. Agar bisa mencapai keberhasilan diperlukan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, antara lain melalui keikutsertaan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam skema COREMAP. Pembahasan pada bagian ini ditujukan pada penyelenggaraan berbagai kegiatan COREMAP di tingkat desa/kelurahan.

Penyadaran Masyarakat

Kegiatan penyadaran masyarakat mencakup semua upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya terumbu karang serta sumber daya laut pada umumnya. Untuk meningkatkan kesadarannya, masyarakat perlu diberi informasi dan pengetahuan yang memadai mengenai peran dan manfaat terumbu karang terhadap ekosistem laut. Kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya sumber daya tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjaga kelestariannya melalui pengelolaan yang tepat.

Kegiatan penyadaran masyarakat di kedua lokasi penelitian diselenggarakan dalam berbagai bentuk. Salah satu di antaranya adalah menyajikan berbagai informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan terumbu karang dan sumber daya laut dalam kemasan yang bervariasi, seperti poster, *booklet*, *leaflet*, kalender, dan jam yang dibuat oleh penyelenggara COREMAP, di tingkat nasional maupun lokal (kabupaten). Bahan-bahan tersebut ditempelkan atau disediakan di berbagai lokasi yang sering dikunjungi penduduk desa/kelurahan. Poster-poster dipasang di tempat-tempat yang biasa digunakan

masyarakat (nelayan) untuk berkumpul ketika tidak melaut, misalnya pos ronda. Selanjutnya, kalender dan jam antara lain dipasang di kantor desa/kelurahan sehingga masyarakat dapat melihatnya ketika berada di kantor tersebut untuk melakukan berbagai urusan.

Di samping berbagai media yang sengaja diciptakan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat seperti di atas, terdapat "media" lain yang bisa menjalankan fungsi tersebut. Baju kaos dan topi yang biasa didapat oleh pelaksana kegiatan atau anggota pokmas COREMAP dalam kegiatan pelatihan secara tidak langsung dapat menjadi media untuk penyadaran masyarakat. Hal ini karena baju kaos biasanya ditulisi dengan pesan-pesan sederhana mengenai penyelamatan terumbu karang. Pesan ditulis dengan latar belakang gambar-gambar yang menarik perhatian. Gambar yang menarik mengundang masyarakat untuk membaca pesan dan informasi yang tertulis di baju kaos. Di Desa Mattiro Bombang dan juga di Kelurahan Pundata Baji sering ditemui anggota pokmas dan pengurus COREMAP yang memakai jenis kostum tersebut. Dengan demikian, mereka secara tidak langsung melakukan kegiatan penyadaran masyarakat melalui kostum yang dikenakan.

Motivator desa serta anggota pokmas, khususnya pokmas konservasi berperan dalam kegiatan penyadaran masyarakat. Motivator desa melakukan kunjungan pada berbagai lapisan masyarakat untuk menyampaikan informasi-informasi yang tepat mengenai terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Namun, sayangnya kegiatan ini tidak berlangsung terus menerus, antara lain karena kurangnya insentif yang diterima oleh pelaksana program di tingkat yang paling bawah tersebut. Pembayaran honor yang tidak lancar menyebabkan MD kehilangan motivasi untuk melakukan pekerjaan mereka.

Sosialisasi COREMAP

Sosialisasi merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan suatu program dan dilaksanakan sebelum program tersebut berjalan. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk memperkenalkan

program yang akan dilaksanakan. Bagi masyarakat di lokasi program, sosialisasi sangat penting dilakukan agar mereka mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai program yang akan diselenggarakan di daerah mereka. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang memadai menjadi salah satu pendukung keberhasilan suatu program.

Seperti program-program pemerintah lainnya, kegiatan sosialisasi COREMAP juga telah dilaksanakan sebelum program ini berjalan. Sosialisasi terlebih dahulu dilakukan kepada aparat pemerintah desa/kelurahan serta para pelaksana di tingkat desa/kelurahan (motivator desa/kelurahan), sebelum dilaksanakan untuk masyarakat luas. Sosialisasi kepada pihak pemerintah desa/kelurahan dilakukan di kabupaten dengan mengundang kepala desa/lurah pada pertemuan-pertemuan yang ditujukan untuk memperkenalkan program pengelolaan sumber daya terumbu karang tersebut. Hal yang sama juga dilakukan kepada motivator desa/kelurahan. Kegiatan sosialisasi bagi para pelaksana di tingkat lokasi tersebut dilakukan di kabupaten secara bersama-sama untuk semua motivator di seluruh lokasi COREMAP.

Setelah kegiatan untuk aparat pemerintah desa/kelurahan, dilakukan pula sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan ini ditujukan tidak hanya bagi mereka yang dalam kehidupannya berhubungan langsung dengan terumbu karang seperti kelompok nelayan, akan tetapi juga kelompok lainnya yang tidak terkait langsung dengan sumber daya laut tersebut, misalnya petani dan guru. Hal ini dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan memahami program yang akan dilaksanakan di lokasi tempat tinggal mereka.

Berbagai cara dilakukan untuk menyosialisasikan COREMAP kepada masyarakat di lokasi program. Di Desa Mattiro Bombang, khususnya di Pulau Salemo, sosialisasi diawali dengan pertemuan yang dilaksanakan di gedung SD di pulau itu. Selain oleh pelaksana COREMAP di tingkat kabupaten, pertemuan dihadiri oleh pemuka masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili masing-masing rukun tetangga (RT). Selanjutnya, pada tahun 2007 dilakukan pula pertemuan yang dihadiri oleh wakil masyarakat dari masing-

masing RT dan dusun yang terdapat di keempat pulau wilayah Desa Mattiro Bombang. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut, antara lain upaya pelestarian terumbu karang (melalui kegiatan COREMAP) dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat setelah program ini selesai.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tidak dapat diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini karena terbatasnya masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu, ada kecenderungan mereka yang mengikutinya tidak menyebarluaskan informasi yang mereka dapatkan kepada penduduk yang tidak ikut dalam kegiatan sosialisasi. Ada kemungkinan pula mereka yang hadir dalam pertemuan sosialisasi tidak sepenuhnya memahami materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui COREMAP, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya.

Upaya-upaya lain juga dilakukan agar COREMAP lebih tersosialisasi pada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah mendatangi masyarakat langsung ke tempat-tempat mereka melakukan kegiatan. Upaya ini dilakukan oleh fasilitator dan motivator desa, misalnya dengan mendatangi masyarakat yang sedang berkumpul untuk memberikan penjelasan mengenai COREMAP. Pos-pos ronda, warung-warung, dan bahkan rumah-rumah penduduk menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi melalui cara ini. Di Pulau Sagara, Sabangko, dan Sakuala (Desa Mattiro Bombang), khususnya, cara utama untuk menyosialisasikan kegiatan COREMAP adalah dengan mendatangi masyarakat secara langsung. Namun cara ini tidak dapat dilakukan secara efektif. antara lain karena keterbatasan waktu, terutama fasilitator desa. Wilayah kerja seorang fasilitator desa tidak hanya mencakup satu desa, melainkan dua atau tiga desa, padahal banyak desa yang wilayahnya mencakup lebih dari satu pulau yang berpenghuni. Hal ini menyebabkan fasilitator desa tidak dapat mengunjungi seluruh lokasi permukiman penduduk di desa-desa yang menjadi wilayah tugasnya. Selain itu, kunjungan langsung kepada masyarakat memerlukan biaya yang relatif besar,

misalnya untuk transportasi dan membeli rokok sebagai 'suguhan' pada setiap kunjungan. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang fasilitator berikut ini,

Kalau datang ke masyarakat kan perlu banyak uang. Untuk mengunjungi penduduk di pulau-pulau harus sewa perahu, apalagi wilayah kerja saya banyak pulaunya. Waktu kita mau ajak omong masyarakat harus keluar rokok dulu. Rokok itu untuk membuka pembicaraan. Padahal honor sering terlambat dibayar. Mana mungkin saya bisa mendatangi seluruh masyarakat.

Berbeda dengan di Desa Mattiro Bombang yang terdiri dari empat pulau, sosialisasi COREMAP di Kelurahan Pundata Baji relatif lebih mudah dilaksanakan dari sisi keterjangkauan lokasi permukiman masyarakat. Meskipun demikian kondisi ini tidak mendukung pelaksanaan sosialisasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terbukti dari masih banyaknya masyarakat, terutama yang tinggal jauh dari pesisir, yang belum mengetahui keberadaan COREMAP di wilayah tempat tinggal mereka. Di antara mereka yang mengetahui program tersebut, kebanyakan tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut.

Di kelurahan Pundata Baji beberapa kegiatan dilakukan dalam rangka sosialisasi COREMAP. Pada awalnya sosialisasi dilakukan melalui pertemuan yang dilaksanakan di gedung SD yang terletak di wilayah pesisir (Dusun Maccini Baji). Pertemuan tersebut dihadiri oleh pelaksana COREMAP di tingkat kabupaten, perangkat kelurahan, serta fasilitator dan motivator desa serta anggota masyarakat. Mayoritas penduduk yang mengikuti pertemuan tersebut adalah yang tinggal di wilayah pesisir. Tidak ada penduduk di wilayah daratan (Dusun Pundata Baji) yang hadir dalam pertemuan sosialisasi sehingga ada kesan bahwa COREMAP hanya ditujukan untuk penduduk di wilayah tersebut.

Selain pertemuan di gedung SD tersebut, diadakan sosialisasi berupa pemutaran film tentang kehidupan di laut. Kegiatan tersebut dilakukan di dusun pesisir. Pada awalnya masyarakat menyambut antusias acara pemutaran film itu, terbukti dari banyaknya mereka yang datang untuk menyaksikan film yang akan di putar. Anggota masyarakat yang datang tidak hanya yang tinggal di Dusun Maccini Baji, melainkan juga mereka yang berasal dari Dusun Pundata Baji yang pada umumnya mempunyai kegiatan ekonomi yang tidak terkait langsung dengan sumber daya laut, termasuk terumbu karang. Setelah film diputar beberapa saat dan mengetahui bahwa yang diputar adalah film tentang kehidupan di bawah laut, banyak penduduk yang kemudian meninggalkan tempat karena tidak tertarik dengan tontonan yang diputar. Salah seorang ketua pokmas COREMAP yang diwawancarai dalam penelitian ini mengemukakan keadaan ini melalui kutipan berikut:

Waktu itu COREMAP mengadakan pemutaran film di Maccini (Baji). Sebelumnya diumumkan pada masyarakat sampai ke darat sana. Malam itu banyak yang datang, orang Pundata (Baji) datang berbondong-bondong ke pantai mau nonton film. Tapi waktu film sudah mulai yang keluar gambar ikan-ikan, mereka komentar, "kok filmnya tentang ikan, buat apa kita nonton ikan, bosan". Akhirnya masyarakat banyak yang pulang, tidak mau nonton lagi. Jadi percuma putar film.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan pemutaran film tidak mencapai hasil yang diharapkan karena kesalahan strategi yang dilakukan oleh penyelenggara. Seharusnya pemutaran film disertai dengan kegiatan menarik lainnya seperti pertunjukan musik dan lagu yang disukai oleh masyarakat. Film diputar sebagai selingan acara musik dan lagu, misalnya selama penyanyi dan pengiringnya beristirahat. Dengan demikian, masyarakat dapat bertahan di lokasi dan menonton film karena menunggu lanjutan pertunjukan tersebut.

Strategi lainnya yang dapat dilakukan untuk menarik minat penduduk menonton film adalah memutar film populer dengan selingan film dokumentasi tentang sumber daya laut. Seperti halnya pertunjukan musik dan lagu, pertunjukan film populer dipotong beberapa kali untuk memutar film dokumenter. Masyarakat yang ingin menyaksikan film populer sampai selesai akan bertahan di depan layar dan "terpaksa" menonton film dokumenter. Melalui strategi ini tujuan kegiatan pemutaran film, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pelestarian terumbu karang serta sumber daya laut umumnya dapat dicapai.

Pelatihan

Pelatihan mengacu pada semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berkaitan dengan upaya pengelolaan terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Pelatihan tersebut menyangkut berbagai materi, mulai dari yang berhubungan langsung dengan kondisi bio-fisik terumbu karang seperti pelatihan investigasi praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak sampai dengan materi yang tidak terkait langsung dengan kondisi sumber daya laut tersebut, yaitu pelatihan untuk kegiatan mata pencaharian alternatif.

Pelatihan tidak ditujukan untuk semua penduduk di lokasi COREMAP, tetapi hanya untuk mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan program tersebut. Di tingkat lokasi/desa peserta pelatihan adalah motivator desa dan anggota-anggota pokmas yang ada dalam COREMAP. Materi pelatihan untuk motivator desa kebanyakan adalah yang terkait dengan administrasi pelaksanaan kegiatan, sedangkan untuk anggota pokmas materi yang diberikan adalah yang berhubungan dengan aktivitas kelompok mereka.

Dalam pelaksanaannya, frekuensi dan jenis pelatihan berbeda-beda antar berbagai pokmas yang ada, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Anggota Pokmas Pengawasan pada umumnya lebih sering mendapat pelatihan dibandingkan dengan anggota Pokmas Jender. Sebagai contoh, di Kelurahan Pundata Baji sejak COREMAP

dilaksanakan anggota Pokmas Pengawasan sudah menjalani beberapa kali pelatihan seperti menyelam, mengidentifikasi cara-cara penangkapan ikan yang merusak sumber daya laut, dan memantau kondisi terumbu karang, sementara pelatihan untuk kelompok jender terbatas pada keterampilan-keterampilan yang terkait dengan usaha ekonomi produktif. Keadaan yang sama juga ditemui di Desa Mattiro Bombang. Sampai saat penelitian ini dilaksanakan anggota pokmas jender di lokasi ini baru mendapatkan satu kali pelatihan, yaitu pembuatan berbagai jenis makanan, seperti dodol dari bahan rumput laut. Seperti yang diutarakan oleh beberapa narasumber yang diwawancarai, pelatihan untuk kelompok ini dilakukan beberapa hari sebelum dilaksanakannya peninjauan oleh tim dari *World Bank*.

Selain anggota pokmas, ketua LPSTK dan LKM juga telah mendapat pelatihan. Materi pelatihan yang diberikan untuk ketua LPSTK adalah budidaya ikan hias dan pelatihan menyelam. Selanjutnya, pelatihan yang diberikan untuk ketua LKM meliputi manajemen pengelolaan dana bergulir (dalam skema *seed fund*) untuk kegiatan pokmas UEP. Kegiatan pelatihan untuk kedua kelompok tersebut dilakukan di Pangkajene di bawah koordinasi komponen CBM. Namun karena keterlambatan turunnya *seed fund*, pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari pelatihan tidak bisa segera dimanfaatkan. Di Desa Mattiro Bombang, salah seorang pengurus LKM yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan bahkan tidak bisa menerapkan pengetahuannya karena sudah meninggalkan desa tersebut untuk bekerja di daerah lain sebelum dana bergulir turun.

Edukasi

Kegiatan edukasi mencakup semua upaya untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui berbagai cara dan media. Beberapa di antaranya adalah memberikan pengetahuan dengan cara pembelajaran secara klasikal, melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok sasaran, dan melalui media yang memuat bahan-bahan edukasi, sesuai dengan kelompok sasaran seperti buku, poster, *booklet*, dan CD (*compact disc*).

Kegiatan edukasi yang bersifat klasikal terutama dilaksanakan di SD-SD yang terdapat di Desa Mattiro Bombang dan Kelurahan Pundata Baji. Materi edukasi diberikan dalam mata pelajaran muatan lokal berfokus pada isu-isu yang terkait dengan sumber daya laut dan pengelolaannya. Bahan ajar yang digunakan berupa buku-buku untuk anak-anak sekolah tingkat SD yang diterbitkan oleh sektor kelautan dan perikanan. Meskipun berisi materi tentang sumber daya laut pada umumnya, buku-buku tersebut memuat informasi yang memadai mengenai terumbu karang dan pengelolaannya.

Kegiatan edukasi yang tidak bersifat klasikal antara lain dilaksanakan di Pondok Informasi yang didirikan di setiap lokasi COREMAP. Masyarakat bisa datang ke tempat ini untuk mencari informasi dan pengetahuan mengenai semua hal yang terkait dengan terumbu karang dan pengelolaannya. Bahan-bahan edukasi berupa buku, terutama untuk konsumsi anak-anak, poster, *booklet*, dan CD disimpan di tempat ini. Untuk memutar CD, Pondok Informasi mempunyai televisi dan pemutar CD yang bisa digunakan sesuai permintaan. Selanjutnya, poster ditempel di beberapa tempat, selain juga di Pondok Informasi. Poster juga ditempelkan di pondok informasi, di samping di berbagai lokasi strategis lainnya di desa/kelurahan lokasi COREMAP.

Pada awal berdirinya, Pondok Informasi di Desa Mattiro Bombang sering dikunjungi, kebanyakan oleh anak-anak yang ingin membaca buku-buku tentang kelautan. Buku-buku yang disediakan banyak berupa cerita pendek yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik sehingga anak-anak antusias untuk membacanya. Namun, setelah beberapa waktu kunjungan anak-anak menjadi berkurang karena tidak ada tambahan buku (baru) yang disediakan di Pondok Informasi. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang pengurus LPSTK di desa ini, " ... *anak-anak senang dengan buku-buku ini, mereka datang ramai-ramai untuk membaca. Tapi bukunya hanya itu-itu saja, tidak buku baru, mereka sekarang tidak datang lagi*".

Di samping terbatasnya informasi baru, Pondok Informasi di Desa Mattiro Bombang jarang dikunjungi penduduk karena "kantor"

LPSTK ini lebih sering ditutup. Idealnya, tempat ini dibuka setiap hari sehingga semua orang yang butuh informasi dan pengetahuan tentang COREMAP bisa mendatanginya. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan karena pengurus LPSTK juga mempunyai kesibukan lain, misalnya bekerja mencari nafkah, maka Pondok Informasi tidak bisa dibuka setiap hari.

Hal yang sedikit berbeda ditemui di Kelurahan Pundata Baji. Koleksi buku di "perpustakaan" Pondok Informasi di lokasi ini lebih banyak dan bervariasi dibandingkan dengan di Desa Mattiro Bombang. Tidak hanya bahan-bahan yang secara spesifik berisi informasi mengenai sumber daya laut, di Kelurahan Pundata Baji juga disediakan buku-buku yang bersifat umum, meskipun lebih banyak untuk segmen anak-anak. Hal ini menyebabkan Pondok Informasi di kelurahan daratan ini masih sering dikunjungi anak-anak. Selain itu, pondok informasi terletak bersebelahan dengan kantor PPL (petugas penyuluh lapangan) milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep yang mempunyai aktivitas setiap hari. Hal ini berdampak pada "hidup"nya kegiatan di pondok informasi

Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan bertujuan untuk menjaga terumbu karang dari aktivitas-aktivitas yang merusak kelangsungan hidupnya. Aktivitas-aktivitas tersebut terutama penangkapan ikan menggunakan jenis-jenis armada dan alat tangkap yang merusak, seperti kapal *trawl* dan bom yang dapat menghancurkan terumbu karang. Kegiatan pengawasan yang intensif berpotensi untuk mencegah terjadinya kerusakan sumber daya laut tempat berkembangbiaknya berbagai jenis ikan karang tersebut.

Dalam kerangka kegiatan COREMAP, kegiatan pengawasan dilakukan oleh penduduk yang terlibat sebagai anggota Pokmas Pengawasan (Pokmaswas). Kegiatan ini dilakukan melalui patroli laut menggunakan armada (perahu beserta motornya) yang pengadaannya dilakukan melalui COREMAP. Idealnya patroli dilaksanakan secara rutin untuk mencegah kegiatan-kegiatan merusak yang dilakukan

terutama oleh nelayan-nelayan yang berasal dari luar lokasi. Namun kenyataannya kegiatan patroli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada biaya operasional yang disediakan oleh COREMAP. Artinya, jika anggota pokmaswas akan melakukan kegiatan patroli, mereka harus mengupayakan sendiri dana untuk membeli bahan bakar armada patroli. Selain itu, kegiatan patroli yang dilakukan menghambat mereka untuk turun ke laut yang berimplikasi mereka tidak bisa memperoleh penghasilan. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang anggota pokmaswas di Desa Mattiro Bombang, sebagai berikut,

Saya dan anggota pokmaswas yang lain mau saja kalau disuruh patroli, tapi tidak bisa karena tidak ada biaya. Tidak ada uang untuk beli bahan bakar. Kalau patroli kita kan tidak bisa cari ikan, jadi tidak ada penghasilan. Coba kalau COREMAP bisa kasih bahan bakar atau ganti penghasilan kita waktu patroli, kan patroli bisa dilakukan.

Mengingat anggota pokmaswas tidak dapat melakukan kegiatan mereka secara khusus, maka, semua nelayan dilibatkan dalam upaya menjaga perairan di sekitar mereka dari kegiatan-kegiatan yang merusak. Pengawasan dilakukan bersamaan dengan kegiatan melaut, dengan cara mengusir orang-orang yang melakukan pengrusakan terumbu karang. Namun upaya yang dilakukan oleh nelayan setempat tidak memadai untuk menghambat kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut karena kekuatan armada tangkap yang digunakan nelayan setempat jauh lebih kecil dibanding pelaku pengrusakan. Upaya yang dilakukan oleh nelayan setempat setidaknya dapat mengurangi intensitas aktivitas pengrusakan yang dilakukan oleh nelayan dari daerah lain. Seorang anggota pokmaswas yang lain mengemukakan sebagai berikut, "... kita tidak bisa cegah mereka sepenuhnya, tapi paling tidak mereka agak takut karena tahu kita jaga laut kita".

Di samping karena keterbatasan dana, kegiatan pengawasan sulit dilaksanakan karena kegiatan pengeboman oleh nelayan dari luar lokasi sering dilakukan malam hari. Kebanyakan nelayan di lokasi penelitian tidak melaut pada malam hari karena pada umumnya

mereka adalah nelayan tradisional yang pergi melaut pagi hari dan pulang siang atau sore pada hari yang sama. Dengan demikian, tidak ada kegiatan pengawasan yang dilakukan pada malam hari. Hal ini dikemukakan oleh seorang anggota pokmaswas berikut ini,

Kalau ibu (maksudnya peneliti) ada di pantai malam hari, ibu bisa lihat lampu kapal-kapal mereka. Mereka diam di situ, pura-pura cari ikan di situ, tau-tau sebentar malan sudah terdengar suara ledakan, mereka bom. Kita mau apa, cuma bisa dengar, mau kejar mereka pakai apa. Salah-salah kita yang dilempar bom, kita yang mati.

Fenomena tidak dikenakannya sanksi hukum bagi pelanggar aturan dan perusak sumber daya laut tidak mendukung upaya pengawasan yang dilakukan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu penyebab berkurangnya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut, seperti dituturkan oleh salah seorang narasumber berikut, "... kita sudah susah-susah mengejar dan melaporkan orang yang membom, tapi apa, di polisi nanti juga bebas". Meskipun demikian, penduduk, khususnya nelayan tidak sama sekali menghentikan upaya pengawasan. Kesadaran bahwa kehidupan mereka sangat tergantung pada sumber daya laut dan penghasilan mereka juga sangat tergantung pada kondisi sumber daya tersebut menyebabkan masyarakat berupaya untuk menjaga kondisi perairan di sekitar mereka.

Kegiatan UEP

Kegiatan usaha ekonomi produktif merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan di bawah koordinasi komponen CBM. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya anggota pokmas UEP dalam meningkatkan penghasilan mereka. Peningkatan penghasilan dilakukan dengan mengurangi atau bahkan mencegah aktivitas yang merusak sumber daya laut. Dalam rancangan COREMAP, kegiatan pokmas UEP dilaksanakan secara berkelompok. Namun dalam kenyataannya, praktik tersebut sulit dilaksanakan karena masing-masing anggota pokmas UEP mengajukan pinjaman dana secara individu untuk kegiatan ekonomi yang akan dilakukan

sendiri-sendiri. Dana pinjaman yang diajukan pada umumnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Di Desa Mattiro Bombang, sampai penelitian dilaksanakan kegiatan pokmas UEP belum bisa dijalankan. Hal ini karena dana untuk kegiatan tersebut, yang ada dalam skema *seed fund* baru turun pada bulan Juni 2008, bulan yang sama dengan waktu penelitian. Dana yang turun pada pertengahan tahun 2008 itu adalah dana kegiatan tahun 2007, sedangkan untuk tahun 2008 belum ada pencairan *seed fund*. Pencairan dana belum bisa dilaksanakan untuk seluruh pokmas yang ada karena adanya hambatan administrasi. Hal ini karena *seed fund* disalurkan melalui rekening ketua LKM yang lama, yang sudah pindah ke daerah lain. Untuk itu, diperlukan waktu untuk mengganti rekening dengan nama ketua LKM yang baru.

Kegiatan UEP yang sudah dilaksanakan baru terbatas pada pembentukan kelompok (simpan pinjam) yang akan menjadi penerima *seed fund*. Sampai penelitian ini dilaksanakan telah terbentuk tiga kelompok, yaitu kelompok Hiu, Lumba-lumba (keduanya di Pulau Salemo), dan kelompok Kerapu (di Pulau Sakuala). Masing-masing kelompok tersebut terdiri dari anggota dengan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda, mulai dari nelayan, pembuat kue, dan pedagang barang-barang kebutuhan sehari-hari. Mereka adalah individu-individu yang sudah diseleksi oleh pengurus LKM sebagai calon penerima dana bantuan. Dengan demikian, kegiatan kelompok bukan berarti upaya bersama yang dilakukan oleh beberapa individu yang tergabung dalam kelompok, akan tetapi adalah usaha masing-masing individu yang tergabung dalam kelompok. Hal ini menyebabkan tidak ada ikatan kebersamaan antara tiap-tiap individu yang tergabung dalam suatu kelompok.

Usaha ekonomi pokmas UEP belum bisa dilaksanakan sehingga belum dapat dilakukan penilaian atas pelaksanaan kegiatan UEP di Desa Mattiro Bombang. Namun, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokmas Pengawasan dapat dianggap sebagai usaha ekonomi produktif meskipun tidak dalam skema pokmas UEP. Kegiatan tersebut berupa pemasangan rumpon di 6 titik mencakup keempat

pulau di Desa Mattiro Bombang. Pemasangan rumpon, yang berfungsi sebagai tempat hidup dan berkembangbiaknya ikan dimaksudkan agar hasil tangkapan nelayan dalam setiap kali melaut bisa meningkat. Tidak hanya nelayan yang tergabung dalam pokmas pengawasan, semua nelayan di seluruh Desa Mattiro Bombang dapat memanfaatkan lokasi penempatan rumpon sebagai areal penangkapan ikan mereka. Dengan demikian, kegiatan pokmas tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Keadaan yang berbeda dengan di Desa Mattiro Bombang ditemui di Kelurahan Pundata Baji. Di kelurahan yang terletak di wilayah daratan ini, *seed fund* telah turun dan dimanfaatkan sejak April 2008. Sampai dengan pelaksanaan penelitian, dana tersebut sudah dipinjamkan kepada 39 orang anggota Pokmas UEP. Laporan pengelolaan *seed fund* bulan April dan Mei 2008 yang dibuat oleh ketua LKM Kelurahan Pundata Baji memperlihatkan bahwa jumlah pinjaman yang diterima berkisar antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,-. Kegiatan ekonomi penerima bantuan juga bervariasi, mulai dari yang terkait langsung dengan sumber daya laut seperti nelayan dan jual beli ikan/udang, sampai dengan yang tidak berhubungan dengan sumber daya tersebut, yaitu usaha perbengkelan dan perdagangan barang-barang campuran. Salah seorang pengurus LKM yang diwawancarai mengemukakan bahwa sampai dua bulan setelah kegiatan berlangsung, pengembalian dana berjalan lancar. Artinya, semua peminjam membayar cicilan pinjaman sesuai dengan ketentuan (jumlah cicilan dan waktu pembayaran).

Mencermati nama-nama penerima bantuan yang tertulis dalam laporan pengelolaan *seed fund* tersebut, terdapat beberapa di antaranya yang secara ekonomi dikategorikan sebagai kelompok kaya. Sebagian diantaranya bahkan merupakan pengusaha yang mempunyai anak buah, misalnya nelayan atau petambak yang berhubungan kerja dengan mereka. Salah seorang pengurus LKM yang diwawancarai membenarkan fakta bahwa orang yang termasuk golongan ekonomi kuat di lokasi penelitian juga memperoleh pinjaman *seed fund* dengan pertimbangan adanya jaminan pengembalian dana. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa mereka mampu mengembalikan seluruh

dana yang dipinjam sehingga keberadaan dana bisa dipertahankan dalam jangka panjang.

Tidak semua kelompok kaya penerima bantuan *seed fund* menggunakan dana pinjaman untuk kepentingan pribadi. Beberapa di antaranya meminjamkannya kembali kepada kelompok yang tergolong tidak mampu untuk digunakan sebagai (tambahan) modal usaha mereka. Kelompok tidak mampu tersebut membayar cicilan kepada penerima *seed fund*, yang kemudian membayarkannya kepada pengurus LKM. Dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa mereka yang namanya tercatat sebagai penerima bantuan dana hanya berperan sebagai "penjamin" bagi kelompok tidak mampu yang benar-benar menggunakannya. Jika di kemudian hari kelompok ini tidak dapat mengembalikan dana yang mereka pinjam, maka orang yang secara administratif tercatat sebagai peminjam akan mengembalikan dana tersebut kepada pengurus LKM untuk digulirkan lagi kepada peminjam lain. Meskipun komitmen tersebut belum dapat dibuktikan karena saat penelitian dilaksanakan kegiatan UEP baru berlangsung sekitar dua bulan, setidaknya ada upaya penduduk kaya untuk membantu kelompok penduduk tidak mampu.

BAB III

PELAKSANAAN COREMAP: Pengetahuan, Partisipasi, dan Manfaat Bagi Masyarakat

Pengetahuan masyarakat tentang suatu program (pembangunan) memainkan peran penting dalam mewujudkan kesuksesan pelaksanaan serta pencapaian target program. Pengetahuan yang memadai mengenai program pembangunan menjadi salah satu pendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan di dalam suatu program, yang selanjutnya berpotensi untuk menyukseskan program tersebut. Informasi mengenai pengetahuan masyarakat tentang COREMAP dan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan di dalamnya diperlukan untuk perbaikan kinerja program di masa mendatang.

Bagian ini membahas pengetahuan masyarakat tentang COREMAP di dua lokasi implementasi kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang tersebut di Kabupaten Pangkep. Pengetahuan yang dimaksud meliputi hal-hal yang terkait dengan keberadaan COREMAP serta berbagai kegiatan yang dilaksanakannya. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan COREMAP dibahas dalam bab ini.

3.1. Penduduk Desa Mattiro Bombang : Pengetahuan Mengenai COREMAP dan Partisipasi dalam Berbagai Kegiatannya

Pengetahuan mengenai COREMAP dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatannya digali dari anggota rumah tangga terpilih/responden di Desa Mattiro Bombang. Pemilihannya dilakukan menggunakan teknik yang sesuai dengan metode penelitian. Penelitian memperlihatkan bahwa pengetahuan responden mengenai COREMAP masih terbatas. Hanya sekitar sepertiga (33,6 persen) dari anggota

rumah terpilih mengetahui bahwa COREMAP telah dilaksanakan di lokasi tempat tinggal mereka. Data ini dapat diinterpretasi dari dua sisi. Pertama, hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi COREMAP kepada masyarakat. Kedua, sedikitnya masyarakat yang mengetahui COREMAP kemungkinan karena kurangnya kepedulian mereka terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di tempat tinggal mereka, meskipun COREMAP telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Ada kemungkinan karena sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2008 (waktu pelaksanaan penelitian) kegiatan COREMAP baru terbatas pada sosialisasi dan pelatihan untuk anggota pokmas, sedangkan kegiatan pemberian bantuan dana bergulir belum dilaksanakan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak responden yang tidak mengetahui keberadaan program ini.

Tabel 3.1 menyajikan data pengetahuan anggota rumah tangga terpilih di Desa Mattiro Bombang mengenai berbagai kegiatan COREMAP yang telah dilaksanakan lebih dari dua tahun di desa mereka. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pengetahuan responden tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam COREMAP sangat terbatas. Dari 10 kegiatan COREMAP yang ditanyakan kepada mereka, proporsi terbesar (23 persen) mengetahui adanya kegiatan ‘peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang’ yang dilaksanakan COREMAP. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya, umumnya kurang dari 20 persen dari mereka yang mengetahuinya (berkisar antara 7,4 persen – 16,4 persen), seperti ditunjukkan oleh data pada Tabel 3.1.

Salah satu kemungkinan yang menyebabkan terjadinya keadaan ini adalah tidak tuntasnya sosialisasi COREMAP yang dilakukan oleh pelaksananya, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa. Artinya, pemasyarakatan program ini tidak mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan atau penjelasan mengenai berbagai kegiatan yang dilaksanakan COREMAP tidak dapat ditangkap oleh masyarakat. Kemungkinan lain yang menyebabkan kondisi tersebut adalah sebagian besar anggota rumah tangga yang terpilih untuk menjawab pertanyaan tidak terlibat dalam berbagai kegiatan

sosialisasi. Dengan demikian, mudah dimengerti jika pengetahuan mereka tentang kegiatan-kegiatan COREMAP sangat minim.

Tabel 3.1. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Kegiatan COREMAP, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)

<i>No.</i>	<i>Kegiatan COREMAP</i>	<i>Tahu</i>	<i>Tidak tahu</i>	<i>Jumlah (N=122)</i>
1.	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang	23,0	77,0	100,0
2.	Kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir dan laut	16,4	83,6	100,0
3.	Pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK)	13,1	86,9	
4.	Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	8,2	91,8	100,0
5.	Pendampingan UEP	7,4	92,6	100,0
6.	Penyusunan rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang (RPTK)	12,3	87,7	100,0
7.	Pokmas konservasi	8,2	91,8	100,0
8.	Pokmas UEP	10,7	89,3	
9.	Pokmas wanita/jender	9,8	90,2	100,0
10.	Pokmas lain	4,9	95,1	100,0

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008.

Lebih dari separuh anggota rumah tangga terpilih yang mengetahui masing-masing kegiatan yang dilaksanakan COREMAP terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Proporsi terbesar dari kelompok tersebut adalah mereka yang terlibat dalam pelatihan UEP dan pokmas konservasi (Tabel 3.2). Untuk pokmas konservasi, khususnya, hal ini mudah dimengerti karena kegiatan kelompok ini berjalan lebih awal daripada kegiatan kelompok lainnya. Ada kemungkinan responden yang terlibat dalam pelatihan UEP dan pokmas konservasi tersebut adalah orang yang sama karena sampai saat penelitian dilaksanakan kegiatan pokmas konservasi sangat terkait dengan usaha ekonomi produktif. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan pokmas konservasi yang telah dilaksanakan

adalah penempatan rumpon, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kondisi ekonomi anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, kegiatan pelatihan UEP juga bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan mereka yang terlibat dalam pokmas konservasi juga mengikuti kegiatan pelatihan UEP karena tidak ada ketentuan yang melarang seseorang mengikuti lebih dari satu kegiatan.

Sama halnya dengan berbagai kegiatan COREMAP lainnya, pengetahuan penduduk Desa Mattiro Bombang tentang kegiatan ekonomi yang diselenggarakan program ini, yang mencakup pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang, pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat, serta pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha ekonomi juga terbatas. Kurang dari seperlima responden mengetahui adanya ketiga kegiatan tersebut. Selain itu, kurang dari 10 persen di antaranya bahkan tidak mengetahui keberadaan kegiatan pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha ekonomi (lihat Lampiran Tabel 3.1). Sekali lagi, kurang tuntasnya pelaksanaan sosialisasi COREMAP merupakan salah satu kemungkinan penyebab kenyataan ini. Kemungkinan lain yang menyebabkan keadaan tersebut adalah cakupan peserta kegiatan sosialisasi yang terbatas sehingga banyak anggota masyarakat di lokasi penelitian yang tidak mengetahui secara detail kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan program ini, termasuk kegiatan ekonomi.

Informasi mengenai kegiatan ekonomi yang dilaksanakan COREMAP pada umumnya diperoleh responden dari pengurus dan penyelenggara COREMAP, seperti fasilitator dan motivator desa, serta anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan COREMAP. Keterlibatan aparat desa sampai ke tingkat RT/RW dalam menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan ekonomi COREMAP sangat minim. Kurang dari 10 persen responden memperoleh informasi mengenai pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang dari aparat desa. Sementara itu, untuk dua kegiatan ekonomi lainnya, tidak ada di antara mereka yang memperoleh

informasi dari pimpinan desa mengenai kegiatan tersebut (Lampiran Tabel 3.2). Kenyataan ini terjadi karena keterlibatan kepala desa pada umumnya hanya sekedar mengetahui keberadaan program tersebut di wilayahnya. Sebelum program ini dilaksanakan, kepala desa dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosialisasi, namun dalam pelaksanaannya mereka tidak banyak terlibat.

Tabel 3.2. Distribusi Responden yang Mengetahui Kegiatan COREMAP Menurut Keterlibatannya, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)

No.	Kegiatan COREMAP	Terlibat	Tidak terlibat	Jumlah (N)
1.	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang	51,7	48,3	100,0 (28)
2.	Kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir dan laut	52,4	47,6	100,0 (20)
3.	Pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK)	62,5	37,5	100,0 (16)
4.	Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	80,0	20,0	100 (10)
5.	Pendampingan UEP	77,8	22,2	100 (9)
6.	Penyusunan rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang (RPTK)	60,0	40,0	100 (15)
7.	Pokmas konservasi	80,0	20,0	100 (10)
8.	Pokmas UEP	69,2	30,8	100 (13)
9.	Pokmas wanita/jender	66,7	33,3	100 (12)
10.	Pokmas lain	83,3	16,7	100 (6)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008.

Anggota rumah tangga terpilih yang mengetahui jenis kegiatan ekonomi COREMAP kebanyakan juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Hampir semua yang mengetahui kegiatan pelatihan dan bimbingan keterampilan guna meningkatkan usaha ekonomi bahkan ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (lihat Lampiran Tabel 3.3). Berdasarkan data ini, dapat diartikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan tentang jenis kegiatan ekonomi COREMAP karena terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Responden yang terlibat dalam setiap kegiatan ekonomi COREMAP pada umumnya merasakan manfaat dari kegiatan yang diikuti. Kenyataan ini memberikan dampak positif bagi kelangsungan kegiatan COREMAP

di masa mendatang. Manfaat yang dirasakan oleh kelompok ini menjadi daya tarik bagi penduduk lainnya yang belum terlibat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang diselenggarakan COREMAP.

Sebanyak 29 orang dari 122 responden di Desa Mattiro Bombang mengetahui salah satu atau tiga kegiatan ekonomi yang diselenggarakan COREMAP. Ketika ditanyakan lebih lanjut, hanya sekitar 3-7 orang yang mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi yang telah dilaksanakan. Jenis-jenis usaha ekonomi tersebut adalah perdagangan/warung, perikanan budidaya, perikanan tangkap, peternakan (misalnya ayam/bebek/itik/kambing), pembuatan makanan/kue, pengolahan hasil laut/ikan asin, pembuatan kerajinan/souvenir, dan usaha ekonomi lainnya. Di antara semua jenis usaha ekonomi tersebut, yang paling banyak adalah usaha perikanan tangkap. Data ini sejalan dengan jenis kegiatan COREMAP yang sudah dilaksanakan, yaitu penempatan rumpon oleh anggota pokmas konservasi. Manfaat yang dirasakan dari kegiatan ini adalah meningkatnya hasil tangkapan nelayan yang selanjutnya menyebabkan peningkatan pendapatan mereka. Hampir semua nelayan merasakan manfaat tersebut sehingga tidak mengherankan jika lebih banyak responden yang mengetahui usaha perikanan tangkap sebagai jenis usaha ekonomi yang dilaksanakan COREMAP.

Tidak semua anggota rumah tangga terpilih yang mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi COREMAP terlibat dalam kegiatan tersebut, kecuali untuk usaha perikanan. Dari 7 orang yang mengetahui adanya usaha perikanan tangkap, semuanya terlibat dalam kegiatan itu. Hal ini karena mayoritas penduduk Desa Mattiro Bombang adalah nelayan sehingga mereka lebih memilih untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan mata pencaharian mereka. Meskipun keterlibatan responden dalam usaha ekonomi COREMAP masih sangat minim, manfaat kegiatan ini telah dirasakan oleh mereka yang terlibat. Artinya, program ini telah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, terutama dari sisi ekonomi.

3.2. Penduduk Kelurahan Pundata Baji : Pengetahuan Mengenai COREMAP dan Partisipasi dalam Berbagai Kegiatannya

Pengetahuan responden di Kelurahan Pundata Baji mengenai keberadaan COREMAP lebih baik dibanding mereka yang tinggal di Desa Mattiro Bombang. Hal ini terlihat dari hasil penelitian, yaitu sebanyak 55,8 persen dari 120 orang anggota rumah tangga terpilih di kelurahan ini mengetahui adanya COREMAP di lokasi tempat tinggal mereka, sedangkan di Desa Mattiro Bombang proporsinya sebesar 33,6 persen. Beberapa kemungkinan diduga menyebabkan keadaan ini. Pertama, posisi wilayah kelurahan yang seluruhnya berada di daratan, termasuk pesisir memudahkan penyampaian informasi mengenai keberadaan COREMAP. Kemudahan menjangkau seluruh wilayah kelurahan menyebabkan berbagai informasi juga mudah disampaikan ke seluruh pelosok daerah ini. Kedua, akses terhadap informasi yang lebih terbuka, antara lain karena kemudahan transportasi menuju dan ke luar wilayah, memungkinkan penduduk kelurahan ini lebih mudah untuk memperoleh informasi dari luar wilayah, termasuk informasi mengenai program pengelolaan terumbu karang.

Sejalan dengan lebih banyaknya responden yang mengetahui keberadaan COREMAP, proporsi mereka yang mengetahui berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut juga lebih besar. Jika di Desa Mattiro Bombang proporsi terbesar responden yang mengetahui jenis-jenis kegiatan COREMAP adalah sekitar 23 persen, di kelurahan yang terletak di pesisir ini proporsinya mencapai sekitar 45 persen. Proporsi terbesar dari mereka yang memiliki pengetahuan tentang kegiatan COREMAP di Kelurahan Pundata Baji mengetahui adanya kegiatan "peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang" (45,8 persen) dan kegiatan "perlindungan/ pengawasan pesisir dan laut" (45 persen). Kenyataan ini terjadi karena dalam pelaksanaan COREMAP, peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang termasuk kegiatan yang paling awal dilakukan. Selanjutnya, besarnya proporsi responden yang mengetahui kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir dan laut kemungkinan terjadi karena

kegiatan tersebut sangat terkait dengan sumber mata pencaharian penduduk yang menjadi target (utama) COREMAP di Kelurahan Pundata Baji, yaitu yang tinggal di Dusun Maccini Baji yang berlokasi di pinggir pantai.

Proporsi anggota rumah tangga terpilih yang mengetahui kegiatan-kegiatan COREMAP lainnya adalah kurang dari 40 persen. Jika dikaitkan dengan kegiatan sosialisasi, dapat dikatakan bahwa sosialisasi di Kelurahan Pundata Baji relatif lebih berhasil daripada yang dilaksanakan di Desa Mattiro Bombang. Kegiatan yang paling sedikit diketahui oleh masyarakat adalah pendampingan UEP, seperti juga yang ditemui di lokasi COREMAP di kepulauan (Desa Mattiro Bombang).

Tabel 3.3. Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Kegiatan COREMAP, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)

<i>No.</i>	<i>Kegiatan COREMAP</i>	<i>Tahu</i>	<i>Tidak tah</i>	<i>Jumlah (N=120)</i>
1.	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang	45,8	54,2	100,0
2.	Kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir dan laut	45,0	55,0	100,0
3.	Pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK)	37,5	62,5	
4.	Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	21,7	78,3	100,0
5.	Pendampingan UEP	16,7	83,3	100,0
6.	Penyusunan rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang (RPTK)	21,7	78,3	100,0
7.	Pokmas konservasi	20,8	79,2	100,0
8.	Pokmas UEP	21,7	78,3	
9.	Pokmas wanita/jender	18,3	81,7	100,0
10.	Pokmas lain	3,3	96,7	100,0

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008.

Pengetahuan responden tentang COREMAP dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya tidak diikuti oleh keterlibatan mereka dalam masing-masing kegiatan. Data pada Tabel 3.4 memperlihatkan bahwa kurang dari separuh responden yang mengetahui kegiatan-kegiatan COREMAP terlibat dalam berbagai kegiatan. Jika dibandingkan dengan Desa Mattiro Bombang, keterlibatan responden di Kelurahan Pundata Baji lebih rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa informasi mengenai kegiatan-kegiatan COREMAP lebih merata di kalangan penduduk Kelurahan Pundata Baji sehingga mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan program ini juga mengetahui keberadaan setiap program. Di antara sepuluh kegiatan COREMAP yang ditanyakan, keterlibatan responden yang terendah adalah pada pokmas jender. Ada kemungkinan hal ini terjadi karena pokmas jender adalah satu-satunya pokmas yang semua anggotanya perempuan, sedangkan mayoritas responden adalah laki-laki. Oleh karena itu, mudah dipahami jika proporsi terkecil responden yang terlibat dalam kegiatan COREMAP adalah pada pokmas jender.

Tabel 3.4. Distribusi Responden yang Mengetahui Kegiatan COREMAP Menurut Keterlibatannya, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)

No.	Kegiatan COREMAP	Terlibat	Tidak terlibat	Jumlah (N)
1.	Peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang	45,5	54,5	100,0 (55)
2.	Kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir dan laut	42,6	57,4	100,0 (54)
3.	Pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK)	48,9	51,1	100,0 (45)
4.	Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	46,2	53,8	100 (26)
5.	Pendampingan UEP	35,0	65,0	100 (20)
6.	Penyusunan rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang (RPTK)	42,3	57,7	100 (26)
7.	Pokmas konservasi	36,0	64,0	100 (25)
8.	Pokmas UEP	23,1	76,9	100 (26)
9.	Pokmas wanita/jender	18,2	81,8	100 (22)
10.	Pokmas lain	50,0	50,0	100 (4)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi, COREMAP 2008.

Pengetahuan responden tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi COREMAP bervariasi, berkisar antara 30,8 persen – 45,8 persen. Angka ini jauh lebih besar daripada yang ditemui di Desa Mattiro Bombang. Sekali lagi, kemudahan akses informasi di lokasi yang terletak di daratan (pesisir) ini menyebabkan banyak penduduk yang mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan COREMAP, termasuk kegiatan ekonomi. Sama halnya dengan yang ditemui di Desa Mattiro Bombang, proporsi terbesar responden memperoleh informasi mengenai kegiatan ekonomi COREMAP dari pelaksana dan pengurus COREMAP, khususnya di tingkat kelurahan, diikuti oleh mereka yang memperoleh informasi dari anggota masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan program tersebut.

Peranan aparat kelurahan dalam penyampaian informasi mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi COREMAP tidak menonjol. Hal ini ditunjukkan oleh relatif kecilnya proporsi responden yang memperoleh informasi mengenai kegiatan tersebut dari pimpinan formal Kelurahan Pundata Baji. Namun jika dibandingkan dengan keadaan di Desa Mattiro Bombang, aparat Kelurahan Pundata Baji cenderung lebih berperan dalam penyampaian informasi mengenai kegiatan ekonomi COREMAP. Hal ini terlihat dari adanya responden yang memperoleh informasi dari aparat kelurahan pada semua jenis kegiatan ekonomi, meskipun proporsinya kecil (lihat Lampiran Tabel 3.9). Sementara itu, di Desa Mattiro Bombang informasi mengenai kegiatan ekonomi COREMAP yang diperoleh responden dari aparat desa hanya pada kegiatan ”pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang” (Lampiran Tabel 3.2). Berdasarkan kenyataan ini dapat dikatakan bahwa aparat pemerintah di Kelurahan Pundata Baji lebih berperan dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan ekonomi COREMAP dibandingkan dengan kelompok yang sama di Desa Mattiro Bombang.

Keterlibatan responden (yang mengetahui jenis kegiatan ekonomi) dalam kegiatan-kegiatan tersebut relatif rendah daripada kelompok yang sama di Desa Mattiro Bombang. Jika di Desa Mattiro Bombang proporsi kelompok ini lebih dari 50 persen, bahkan pada kegiatan pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan

usaha proporsinya mencapai 90 persen (Lampiran Tabel 3.3), di Kelurahan Pundata Baji proporsi responden yang mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi COREMAP dan terlibat di dalamnya kurang dari separuh (lihat Lampiran Tabel 3.10). Keadaan ini dapat dijelaskan dengan dua kemungkinan. Pertama, responden di Kelurahan Pundata Baji kurang berkeinginan untuk mengikuti kegiatan COREMAP. Kedua, informasi mengenai kegiatan COREMAP menyebar di kalangan masyarakat luas (termasuk responden) sehingga mereka yang tidak terlibat pun juga mengetahui kegiatan-kegiatan (ekonomi) yang dilaksanakan COREMAP.

Data memperlihatkan bahwa sebanyak 56 orang dari 120 responden mengetahui salah satu dari tiga jenis kegiatan ekonomi COREMAP yang ditanyakan. Proporsi terbesar dari 56 orang responden tersebut (46,4 persen) mengetahui bahwa jenis usaha ekonomi yang pernah dilaksanakan COREMAP adalah pengolahan hasil laut/ikan asin, diikuti oleh penangkapan ikan dan kegiatan perikanan budidaya. Hal ini mudah dimengerti karena selama ini terkesan bahwa COREMAP secara khusus ditujukan untuk penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Akibatnya, responden lebih mengetahui jenis-jenis usaha yang terkait langsung dengan aktivitas ekonomi nelayan dibanding berbagai jenis usaha lainnya.

Dalam konteks manfaat kegiatan, semua responden yang terlibat mengatakan bahwa mereka memperoleh manfaat dari usaha ekonomi COREMAP yang diikuti. Meskipun jumlah responden yang terlibat dalam berbagai usaha ekonomi relatif sedikit, yaitu paling banyak 26 orang pada usaha pengolahan hasil laut, manfaat kegiatan COREMAP sudah dirasakan oleh mereka yang ikut serta dalam kegiatan program ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagi mereka yang terlibat, COREMAP memberikan dampak positif. Agar COREMAP dapat dirasakan oleh lebih banyak penduduk di lokasi kegiatan, maka di masa mendatang upaya untuk mengundang keikutsertaan masyarakat harus lebih menjadi perhatian para pengelola dan penyelenggara program ini, terutama di tingkat desa/kelurahan.



BAB IV

DINAMIKA PENDAPATAN PENDUDUK

Salah satu tujuan khusus pelaksanaan COREMAP fase II adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk (Direktorat Jenderal Kelautan dan Pesisir Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan 2007). Tingkat pendapatan merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk maka dapat semakin baik kondisi ekonomi dan semakin sejahtera penduduk tersebut. Karena itu indikator penting dalam melihat keberhasilan COREMAP adalah meningkatnya pendapatan total masyarakat yang didapat dari berbagai kegiatan berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif sebesar 10 persen, pada akhir program (Project Appraisal Document - World Bank 2004).

Bertolak dari indikator tersebut di atas, bab ini membahas dan mendiskripsikan pendapatan penduduk Kabupaten Pangkep dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. Secara khusus bab ini juga menggambarkan perubahan pendapatan rumah tangga terpilih di kedua lokasi penelitian pada tahun 2006 dan 2008. Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kedua lokasi penelitian terpilih mewakili dua karakteristik wilayah yang berbeda, yaitu kepulauan dan pesisir Kabupaten Pangkep. Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tuppabiring mewakili wilayah kepulauan dan Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang mewakili wilayah pesisir. Selain itu, bab ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan penduduk, yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pelaksanaan COREMAP dan berbagai program pemerintah lainnya.

4.1. Pendapatan Kabupaten Pangkep

Pendapatan Kabupaten Pangkep menggambarkan kondisi makro perekonomian berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Bappeda dan BPS Kabupaten Pangkep. Data yang digunakan untuk melihat perubahan perekonomian Kabupaten Pangkep adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sejak tahun 2000 sampai dengan 2006.

4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangkep

Selama kurun waktu 2000 sampai dengan 2006, perekonomian Kabupaten Pangkep terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat Tabel 4.1). Pada tahun 2000 PDRB Kabupaten Pangkep berdasarkan atas harga konstan tahun 2000 berjumlah Rp. 1.392.780.000,-. Jumlah ini mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2006 menjadi Rp. 1.967.630.000,-. Sejalan dengan peningkatan jumlah PDRB-nya, sumbangan Kabupaten Pangkep terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari 4,37 persen pada tahun 2002 menjadi 4,49 persen pada tahun 2006 (BPS Kabupaten Pangkep 2004; BPS Kabupaten Pangkep 2007a).

Meskipun secara nominal pendapatan Kabupaten Pangkep mengalami peningkatan setiap tahun, akan tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten ini cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi terendah Kabupaten Pangkep terjadi pada tahun 2003 yang mencapai 1,98 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 12,91 persen, terjadi pada tahun 2001. Dalam dua tahun terakhir (2005 – 2006) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkep tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan yaitu 5,61 persen (2005) dan 5,92 persen (2006), padahal menurut analisis ekonomi regional Provinsi Sulawesi Selatan, Pangkep merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat, selain Kabupaten Luwu (Saharudin 2006).

Tabel 4.1. PDRB Kabupaten Pangkep dan Pertumbuhannya 2000 – 2006

<i>Tahun</i>	<i>PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)</i>	<i>PDRB Harga Konstan (Milyar Rp)</i>	<i>Pertumbuhan (%)</i>
2000	1.392,78	1.392,78	-
2001	1.623,14	1.572,60	12,91
2002	1.763,97	1.624,19	3,28
2003	1.936,94	1.656,41	1,98
2004	2.145,41	1.758,99	6,19
2005	2.381,01	1.857,73	5,61
2006*)	2.735,86	1.967,63	5,92
Rata-Rata			5,98

*) Angka sementara

Sumber: BPS Kabupaten Pangkep 2007a

4.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha: Fokus Pada Sektor Pertanian

Sub-bagian ini membahas PDRB menurut lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Pangkep. Berdasarkan lapangan usaha, sumbangan PDRB terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Pangkep sejak kurun waktu 2000 sampai dengan 2006 berasal dari sektor industri pengolahan. Selama tahun 2000 sampai dengan 2004, persentase PDRB yang berasal dari sektor industri pengolahan mencapai lebih dari 50 persen setiap tahun. Namun, sejak tahun 2005 kontribusi PDRB dari sektor industri pengolahan berdasarkan harga konstan tahun 2000 mengalami penurunan, dan di akhir tahun 2006 persentasenya mencapai 33,28 persen (lihat Tabel 4.2).

Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Pangkep bertolak belakang dengan peningkatan kontribusi sektor pertanian. Sejak tahun 2000, kontribusi PDRB dari sektor pertanian berada pada peringkat kedua setelah sektor industri pengolahan. Sumbangan PDRB di sektor pertanian mengalami peningkatan yang cukup besar antara tahun 2004 dan 2006. Pada tahun 2004 sumbangan sektor pertanian sebesar 18,29 persen, sedangkan pada tahun 2006 meningkat mencapai lima puluh persen lebih besar, yaitu menjadi 27,27 persen. Keadaan tersebut

kemungkinan mencerminkan adanya pergeseran pembangunan di Kabupaten Pangkep yang sebelum tahun 2004 lebih menekankan pada pembangunan di sektor industri pengolahan, akan tetapi setelah tahun 2004 pembangunan di sektor pertanian terus mengalami peningkatan. Selain kedua sektor tersebut, hampir tidak terlihat peningkatan sumbangan sektor-sektor lainnya terhadap PDRB Kabupaten Pangkep sejak tahun 2000 sampai dengan 2006. Sektor pembangunan yang memberikan distribusi PDRB terkecil dan cenderung tidak mengalami perubahan adalah sektor listrik, gas, dan air bersih, dengan persentase kurang dari satu persen. Selain itu, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan serta sektor bangunan memberikan sumbangan yang relatif kecil terhadap PDRB, yaitu kurang dari lima persen. Sumbangan sektor-sektor tersebut memperlihatkan peningkatan sejak dua tahun terakhir (2005 – 2006), meskipun persentase peningkatannya masih sangat rendah.

Tabel 4.2. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pangkep Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000, Kabupaten Pangkep Tahun 2000 – 2006 (dengan Semen Tonasa)

<i>Lapangan Usaha</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005*)</i>	<i>2006*)</i>
Pertanian	19.53	18.38	19.01	18.88	18.29	27.24	27.27
Pertambangan dan penggalian	5.02	4.82	4.86	4.99	5.07	7.95	7.98
Industri pengolahan	54.57	57.10	55.89	55.18	55.73	33.51	33.28
Listrik, gas dan air bersih	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36	0.55	0.55
Bangunan	2.88	2.75	2.81	2.90	2.93	4.27	4.25
Perdagangan, hotel dan restoran	4.53	4.27	4.35	4.60	4.55	6.78	6.76
Angkutan dan komunikasi	3.98	3.42	3.52	3.64	3.63	5.34	5.10
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	2.04	2.10	2.23	2.53	2.72	3.84	3.67
Jasa- jasa	7.10	6.81	6.98	6.92	6.71	10.53	11.14
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*) Angka sementara

Sumber: BPS Kabupaten Pangkep 2007a

Selama kurun waktu 2000 – 2006, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 memperlihatkan adanya fluktuasi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2001 mencapai 18,16 persen. Sektor ini mengalami penurunan pertumbuhan terbesar di tahun 2003, menjadi 0,68 persen, namun di tahun 2005 kembali mengalami peningkatan mencapai 7,17 persen. Akan tetapi, pada tahun 2006 pertumbuhan sektor industri pengolahan kembali mengalami penurunan menjadi 5,65 persen, masih lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan sektor pertanian pada tahun yang sama (lihat Tabel 4.3). Pertumbuhan sektor pertanian juga cenderung mengalami penurunan pada tahun 2001 (6,31 persen) sampai dengan 2003 (1,30 persen), dan kembali menggeliat pada tahun 2004 (2,86 persen) dan pada tahun 2006 pertumbuhan sektor pertanian mencapai 5,98 persen. Dengan demikian, dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2006 terlihat adanya peningkatan pertumbuhan pertanian dibandingkan dengan periode 2000 sampai dengan 2004.

Table 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Kabupaten Pangkep Tahun 2001 - 2006 (%) (dengan semen Tonasa)

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	2006*)
Pertanian	6.31	6.81	1.30	2.86	2.77	5.98
Pertambangan dan penggalian	8.39	4.11	4.75	7.90	8.16	6.32
Industri pengolahan	18.16	1.09	0.68	7.26	7.17	5.65
Listrik, gas dan air bersih	7.68	4.93	4.80	5.82	4.67	7.10
Bangunan	7.71	5.55	5.38	7.28	0.54	5.52
Perdagangan, hotel, dan restoran	6.38	5.35	7.73	5.04	2.85	5.55
Angkutan dan komunikasi	2.79	6.15	5.53	6.03	1.34	1.14
Kuangan, persewaan dan jasa perusahaan	16.26	9.59	15.76	14.28	0.97	1.35
Jasa – jasa	8.26	5.84	1.09	3.01	8.30	12.03
PDRB	12.91	3.28	1.98	6.19	5.61	5.92

*) Angka sementara

Sumber: BPS Kabupaten Pangkep 2007a

Berdasarkan dua indikator yaitu sumbangan terhadap PDRB kabupaten dan pertumbuhan ekonomi, terlihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang signifikan dibanding dengan sektor industri pengolahan. Sektor

pertanian memberikan manfaat ekonomi yang lebih langsung dirasakan oleh penduduk Kabupaten Pangkep dibanding dengan sektor industri pengolahan. Manfaat ekonomi dari sektor industri pengolahan yang didominasi oleh PT. Semen Tonasa lebih banyak dirasakan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, dilihat dari penyerapan tenaga kerja, sektor industri pengolahan hanya sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu 5,20 persen (2005) dibanding dengan sektor-sektor perdagangan dan jasa-jasa lainnya (BPS Kabupaten Pangkep 2007b). Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk yang memperoleh manfaat secara langsung dari sektor industri pengolahan melalui pendapatan dari pekerjaan-pekerjaan di sektor tersebut juga sangat terbatas. Di pihak lain, sektor pertanian masih merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar yaitu mencapai 49,54 persen pada tahun 2005 (BPS Kabupaten Pangkep 2007b). Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang memperoleh manfaat ekonomi yang cukup besar, maka sektor pertanian dapat dikatakan sebagai sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap kesejahteraan penduduk Kabupaten Pangkep.

Tabel 4.4. Pertumbuhan Sektor Pertanian Kabupaten Pangkep Menurut Sub-sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2001 – 2006 (%)

Sub-sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006*)
Tanaman Bahan Makanan	4,15	1,06	2,81	0,99	1,77	6,68
Tanaman Perkebunan	2,40	0,06	1,27	0,05	2,65	6,38
Peternakan	2,93	7,19	0,43	1,48	3,19	1,97
Kehutanan	4,82	2,70	1,46	8,77	8,53	3,72
Perikanan	8,39	10,41	0,74	4,71	3,14	5,98
Sektor Pertanian	6,31	6,81	1,30	2,86	2,77	5,98

*) Angka sementara

Sumber: BPS Kabupaten Pangkep 2007a

Pada tahun 2006, pertumbuhan sektor pertanian memperlihatkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 2,77 persen di tahun 2005 menjadi 5,98 persen di tahun 2006. Dilihat menurut sub-sektornya, tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Pangkep. Pertumbuhan ketiga sub-sektor tersebut berturut-turut adalah 6,68 persen, 6,38 persen, dan 5,98 persen.

Walaupun tidak mengalami pertumbuhan tertinggi setiap tahun, sejak tahun 2000 sampai dengan 2006 sub-sektor perikanan terus berada di peringkat pertama dalam besarnya jumlah kontribusi yang diberikan terhadap PDRB sektor pertanian. Pada akhir tahun 2006 sumbangan sub-sektor perikanan mencapai 11,35 persen. Dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi PDRB sektor pertanian, maka perikanan dapat dikatakan sebagai salah satu sub-sektor yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Pangkep. Selain karena memberikan kontribusi yang besar terhadap sektor pertanian, sub sektor perikanan memberikan manfaat langsung terhadap kesejahteraan penduduk Kabupaten Pangkep pada umumnya.

Tabel 4.5. Distribusi PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Pangkep Menurut Sub-sektor atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2001 – 2006 (%)

<i>Sub-sektor</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005*)</i>	<i>2006*)</i>
Tanaman Bahan Makanan	5.39	5.11	4.93	4.94	4.61	4.44	4.47
Tanaman Perkebunan	1.77	1.68	1.66	1.66	1.55	1.48	1.50
Peternakan	1.01	0.95	0.99	0.93	0.91	0.90	0.85
Kehutanan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Perikanan	11.33	11.03	11.31	11.22	11.46	11.33	11.35
Sektor Pertanian	19.53	18.80	19.01	18.78	18.55	18.18	18.19

*) Angka sementara

Sumber: BPS Kabupaten Pangkep 2007a

4.1.3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah/wilayah. Sejak kurun waktu 2001 sampai dengan 2006,

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangkep terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2006, terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Pangkep dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2004, PDRB per kapita Kabupaten Pangkep mencapai Rp. 6.490.823,- yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2006 sehingga mencapai Rp.6.800.365,-. Jika dibanding dengan rata-rata PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan, jelas terlihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Pangkep lebih tinggi daripada PDRB per kapita tingkat provinsi. Namun, PDRB per kapita kabupaten ini masih lebih rendah dibanding dengan PDRB per kapita Kota Makasar. Sebaliknya, dibanding dengan kabupaten/kota di sekitarnya, seperti Kota Parepare, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Maros, PDRB per kapita Kabupaten Pangkep jauh lebih tinggi (BPS Kabupaten Pangkep 2007a). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Pangkep relatif lebih tinggi dibanding dengan penduduk kabupaten/kota tetangganya dan bahkan juga kesejahteraan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan secara umum.

Tabel. 4.6. Rata-Rata PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Pangkep dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 – 2006 (Rupiah)

Tahun	Kabupaten Pangkep		Provinsi Sulawesi Selatan	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
2001	6.118.363	5.927.858	4.362.110	4.056.498
2002	6.602.203	6.079.039	4.730.028	4.132.855
2003	7.198.371	6.155.791	5.150.214	4.257.334
2004	7.916.742	6.490.823	5.746.545	4.414.727
2005	8.031.746	6.266.589	6.943.005	4.859.319
2006 *)	9.455.459	6.800.365	7.982.347	5.094.273

*) Angka sementara

Sumber: BPS Kabupaten Pangkep 2007a

4.2. Pendapatan Rumah Tangga Terpilih dan Perubahannya

Pendapatan dalam penelitian ini dihitung dari pendapatan rumah tangga yang terpilih sebagai sampel. Pendapatan rumah tangga mengacu pada jumlah seluruh pendapatan rumah tangga yang berasal dari semua anggotanya yang bekerja. Dengan demikian, pendapatan rumah tangga tidak hanya berasal dari kepala rumah tangga (KRT) akan tetapi juga dari anggota rumah tangga lainnya yang bekerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika KRT tidak bekerja berarti rumah tangga tidak mempunyai sumber pendapatan atau pendapatan rumah tangga berasal dari anggota rumah tangganya, seperti anak yang bekerja. Analisis perubahan pendapatan rumah tangga terpilih berguna untuk melihat apakah terjadi peningkatan atau penurunan pendapatan rumah tangga secara umum antara tahun 2006 dan 2008, yaitu sebelum kegiatan COREMAP dilaksanakan dan setelah kegiatan program tersebut berjalan sekitar 3 tahun.

4.2.1. Pendapatan Rumah Tangga di Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring

Seperti wilayah kepulauan pada umumnya, mata pencaharian mayoritas penduduk Desa Mattiro Bombang bersumber dari kegiatan kenelayanan. Hal ini terlihat dari pekerjaan anggota rumah tangga terpilih, yaitu sekitar 77 persen di antara mereka bekerja di sektor perikanan tangkap. Mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan penangkap kepiting baik dilakukan sendiri ataupun bersama dengan orang lain. Selain nelayan penangkap kepiting, ada pula nelayan penangkap ikan tenggiri dan ikan gamasi. Jenis tangkapan nelayan dari tahun 2006 dan 2008 cenderung tidak memperlihatkan perbedaan yang berarti. Kepiting masih merupakan hasil tangkapan dominan sepanjang tahun (wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat dan nelayan). Akhir-akhir ini peranan pendapatan dari kegiatan kenelayanan ini semakin berkurang. Pada tahun 2006, kegiatan kenelayanan masih menjadi sumber mata pencaharian bagi 94 persen rumah tangga, tetapi pada tahun 2008 turun menjadi hanya 81 persen dari rumah tangga sampel.

Selain kegiatan kenelayanan, sumber pendapatan rumah tangga lainnya adalah sektor perdagangan, jasa, dan industri pengolahan sumber daya laut (pengupasan kepiting). Sektor perdagangan berupa perdagangan bahan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan kegiatan kenelayanan.



Gambar 4.1. Mini Plan di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang

Dibanding dengan kondisi tahun 2006, berdasarkan observasi di lapangan saat ini terlihat peningkatan jumlah warung-warung besar yang menjual beragam kebutuhan rumah tangga dan peralatan untuk kegiatan kenelayanan. Pada tahun 2006 hanya terdapat dua warung besar/toko, akan tetapi pada tahun 2008 jumlah warung besar/toko mengalami peningkatan dua kali lipat. Di sisi lain, industri pengolahan kepiting atau lebih dikenal dengan sebutan *mini plan* di Desa Mattiro Bombang bertambah sebanyak dua buah, bahkan pada akhir Juni 2008 akan bertambah satu lagi *mini plan* di Pulau Salemo (wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat). Peranan sektor jasa juga meningkat. Pada tahun 2006 hanya tiga persen rumah tangga yang mempunyai sumber mata pencaharian di sektor jasa, akan tetapi saat ini meningkat menjadi lebih dari dua kali lipat (7,1 persen). Peningkatan ini khususnya terjadi pada sektor jasa transportasi laut. Perubahan tersebut jelas menggambarkan adanya peningkatan perekonomian masyarakat Desa Mattiro Bombang yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk

Lebih dari 50 persen rumah tangga terpilih pada tahun 2008 memiliki pendapatan per bulan sebesar Rp. 734.167,- atau lebih rendah, dengan pendapatan rata-rata rumah tangga per bulan sebesar Rp. 958.260,-. Tingginya pendapatan rata-rata rumah tangga tersebut

dikarenakan variasi pendapatan yang cukup besar, berkisar dari nol rupiah per bulan sampai dengan sembilan juta rupiah per bulan. Rumah tangga yang tidak memiliki pendapatan (nol rupiah) adalah rumah tangga (khususnya pasangan muda) yang masih dibiayai oleh orang tua dari kedua belah pihak (suami/istri) karena keduanya belum bekerja. Variasi tersebut juga memperlihatkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan yang cukup besar antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin.

Dibanding dengan tahun 2006, pada tahun 2008 jelas terlihat terjadinya peningkatan pendapatan rumah tangga terpilih di Desa Mattiro Bombang (Tabel 4.7). Akan tetapi perlu dicermati bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut tidak secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan pendapatan terjadi karena kenaikan harga jual ikan, namun jika diperhitungkan dengan biaya produksi, terutama karena kenaikan harga BBM, maka peningkatan pendapatan hanya untuk menutupi biaya produksi. Namun demikian, secara umum fenomena tersebut dapat menggambarkan terjadinya peningkatan kesejahteraan penduduk Desa Mattiro Bombang.

Tabel 4.7. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (Rupiah)

<i>Pendapatan per Bulan</i>	<i>2006</i>	<i>2008</i>
Rata-rata	547.250	958.751
Median	402.083	734.167
Minimum	30.167	0*
Maksimum	3.333.333	9.650.000
Per kapita	116.963	195.359

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2006.
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008.

Di samping peningkatan pendapatan, selama periode 2006 – 2008 telah terjadi perubahan distribusi pendapatan rumah tangga terpilih di Desa Mattiro Bombang. Pada tahun 2006, sekitar 61 persen

rumah tangga berpendapatan kurang dari Rp. 500.000,- per bulan, sedangkan pada tahun 2008 proporsi ini menurun menjadi hanya 34,4 persen. Pada tahun 2008, sebanyak 14,3 persen rumah tangga berpendapatan di bawah Rp. 200.000,- per bulan, dan 32 persen rumah tangga berpendapatan antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- per bulan. Rumah tangga dengan penghasilan antara Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 1,49 juta per bulan mencapai 18 persen (lihat Tabel 4.8). Secara umum, data pada Tabel 4.8 menunjukkan terjadinya pergeseran pendapatan rumah tangga sampel di Desa Mattiro Bombang ke arah yang lebih tinggi dan juga semakin kecilnya perbedaan proporsi rumah tangga dengan pendapatan terendah dan tertinggi. Keadaan ini mengindikasikan terjadinya pemerataan yang lebih baik pada tingkat kesejahteraan penduduk pada tahun 2008, dibanding dengan tahun 2006.

Tabel 4.8. Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Besar Pendapatan, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (%)

Besar pendapatan	2006 <i>n = 100</i>	2008 <i>n=122</i>
< Rp. 500.000,-	61,0	34.4
Rp. 500.000,- - Rp. 999.000,-	28,0	32.0
Rp. 1.000.000,- – Rp. 1.499.000,-	7,0	18.0
Rp. 1.500.000,- – Rp. 1.999.000,-	2,0	9.8
Rp. 2.000.000,- – Rp. 2.499.000,-	1,0	0.8
Rp. 2.500.000,- – Rp. 2.999.000,-	0	1.6
Rp. 3.000.000,- +	1,0	3.3
Jumlah	100,0	100.0

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2006
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008.

Peningkatan pendapatan rumah tangga terpilih antara lain terjadi karena semakin beragamnya lapangan pekerjaan penduduk di Desa Mattiro Bombang. Namun demikian, ketergantungan penduduk pada kegiatan kenelayanan juga masih besar. Pada tahun 2006, dua sektor

utama lapangan pekerjaan kepala rumah tangga (KRT) adalah perikanan laut dan jasa. Sementara pada tahun 2008 terjadi penambahan sektor pekerjaan yang memberikan pendapatan rumah tangga, dengan masuknya sektor perdagangan, jasa kemasyarakatan, industri pengolahan dan transportasi. Rumah tangga yang dulu hanya memanfaatkan sumber pendapatan dari sektor perikanan mulai merambah ke sektor lainnya, terlihat dari sektor jasa dan perdagangan yang semakin banyak ditekuni oleh kepala rumah tangga terpilih.

Tabel 4.9. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (Rupiah)

Pekerjaan Utama KRT	Rata-rata		Minimum		Maximum	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008
Perikanan tangkap	555.504	984.414	30.167	21.667	3.333.333	9.650.000
Perdagangan	-	1.804.400	-	212.000	-	5.210.000
Jasa	344.000	491.666	280.000	275.000	472.000	700.000
Kemasyarakatan						
Industri	-	560.000	-	560.000	-	560.000
Transportasi		693.333		100.000		1.500.000
KRT tidak bekerja	491.889	529.208	184.000	-	758.333	1.100.000

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2006
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008.

Pada tahun 2008 pendapatan rata-rata rumah tangga yang tertinggi ditemukan pada rumah tangga dengan KRT yang bekerja di sektor perdagangan, diikuti sektor perikanan tangkap. Pendapatan rumah tangga terkecil (Rp. 21.667,-) dan yang terbesar (Rp. 9.650.000,-) juga ditemukan pada rumah tangga dengan KRT yang bekerja di sektor perikanan tangkap. Selanjutnya, perbedaan pendapatan yang mencolok terdapat pada rumah tangga dengan KRT yang bekerja di sektor perikanan tangkap. Perbedaan pendapatan rumah tangga di sektor perikanan tangkap sangat berkaitan dengan perbedaan kepemilikan sarana produksi kegiatan kenelayanan, yaitu perahu bermotor (*jolloro/ketinting*) dan perahu tanpa mesin (*lepa-lepa*). Selain karena perbedaan penggunaan armada tangkap,

perbedaan pendapatan sangat dipengaruhi oleh perbedaan jenis alat tangkap, yaitu jaring dengan bubu. Kedua hal tersebut tentunya akan mempengaruhi hasil produksi tangkapan nelayan.

Secara umum, pendapatan rata-rata rumah tangga terpilih dari sektor perikanan tangkap meningkat dari Rp. 555.504,- pada tahun 2006 menjadi Rp. 984.414,- di tahun 2008. Hal tersebut juga tercermin dari pendapatan tertinggi yang ditemukan pada rumah tangga dengan mata pencaharian yang bersumber dari sektor perikanan tangkap. Keadaan sebaliknya terlihat pada penurunan pendapatan rumah tangga terendah dari Rp. 30.167,- per bulan di tahun 2006 menjadi Rp. 21.667,- per bulan di tahun 2008. Kemungkinan besar penurunan tersebut sebagai akibat dari penurunan produksi (hasil tangkap) perikanan di perairan sekitar wilayah desa karena armada dan alat tangkap yang tidak mengalami perubahan. Penurunan produksi perikanan dirasakan oleh banyak penduduk Desa Mattiro Bombang yang memerlukan waktu lebih lama dan jarak yang semakin jauh ketika melaut mencari ikan (wawancara mendalam dengan nelayan).

Peningkatan pendapatan yang signifikan ditemukan pada rumah tangga dengan pendapatan yang bersumber dari sektor jasa kemasyarakatan, yaitu dari Rp. 344.000,- pada tahun 2006 menjadi Rp. 491.666,- pada tahun 2008. Sektor jasa kemasyarakatan di sini adalah pekerjaan yang berkaitan dengan



Gambar 4.2. Pengerinan Rumput Laut di Desa Mattiro Bombang

administrasi perkantoran atau guru. Selain kedua sektor tersebut, pada tahun 2008 ditemukan rumah tangga dengan mata pencaharian utama yang berasal dari sektor-sektor lain yang tidak ditemukan pada tahun

2006, antara lain sektor transportasi. Berkembangnya sektor transportasi ini sangat berkaitan dengan meningkatnya mobilitas penduduk antarpulau di Desa Mattiro Bombang dengan daratan Kabupaten Pangkep, yang memerlukan jasa transportasi. Seiring dengan makin beragamnya mata pencaharian KRT di Desa Mattiro Bombang, pendapatan rumah tangga mengalami peningkatan. Makin beragamnya mata pencaharian juga berkontribusi terhadap pengurangan ketergantungan pada kegiatan kenelayanan, meskipun masih menjadi aktivitas ekonomi utama bagi penduduk Desa Mattiro Bombang. Peningkatan pendapatan berpengaruh terhadap perekonomian di desa, yang dapat diperkirakan dari berkembangnya sektor perdagangan. Pada tahun 2006, sektor perdagangan hanya menjadi sumber mata pencaharian tambahan bagi KRT, tetapi pada tahun 2008 sudah menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama rumah tangga di Desa Mattiro Bombang.

Rumah Tangga Kegiatan Kenelayanan

Di antara seluruh rumah tangga terpilih, sebanyak 71,1 persen mempunyai sumber pendapatan utama dari kegiatan kenelayanan. Pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh musim atau gelombang laut dan jenis komoditas tangkapannya. Jenis komoditas tangkapan nelayan di Desa Mattiro Bombang tidak memperlihatkan perubahan dari tahun 2006 sampai dengan 2008. Pada musim gelombang kuat (musim barat) yang berlangsung dari bulan Desember sampai dengan Maret atau April, pada umumnya nelayan menangkap kepiting yang ditangkap di sekitar perairan desa. Pada musim tersebut penduduk tidak mungkin pergi melaut lebih jauh, tetapi perubahan terjadi pada alat tangkap yang digunakannya. Dulu nelayan menggunakan jaring namun sekarang menggunakan bubu kepiting (*rakkang*). Dibanding dengan musim lainnya, musim barat merupakan puncak produksi kepiting di Desa Mattiro Bombang. Kuatnya gelombang menyebabkan kepiting keluar dari sarang/rumahnya dan naik ke permukaan sehingga hasil kepiting sangat menjanjikan meskipun nelayan tidak jauh melaut pada musim ini. Selain itu, nelayan yang tidak mempunyai *jolloro* pada musim ini tidak dapat melaut dan tidak bisa memperoleh

penghasilan. Musim gelombang kuat juga merupakan musim ketika pendapatan rumah tangga mencapai titik terendah dibanding dengan musim lainnya (lihat Tabel 4.10).

Pada musim timur atau dikenal dengan musim gelombang tenang, nelayan melaut sampai jarak yang lebih jauh dibanding dengan musim lainnya. Pada musim ini, jenis tangkapan juga semakin bervariasi, tidak hanya kepiting, namun juga ikan tenggiri dan hiu yang memiliki nilai ekonomis jauh lebih tinggi dibanding dengan kepiting. Pada umumnya kondisi laut tenang terjadi pada bulan Juni – September sehingga nelayan dapat melaut sampai di perairan Makasar (laut dalam) dengan lama melaut 3 sampai 7 hari sebelum kembali ke desa asal. Meskipun nelayan yang menangkap ikan tenggiri dan hiu jumlahnya terbatas, namun dengan tetap menangkap kepiting yang dapat dilakukan dua kali dalam sehari, secara umum pendapatan pada musim ini menjadi sedikit lebih besar dibanding dengan musim barat. Selain itu, untuk dapat meningkatkan pendapatan dari sektor perikanan, sebagian nelayan menangkap ikan gamasi meskipun nilai ekonominya rendah. Kegiatan lainnya yang dapat memberikan pendapatan tambahan, yang juga dilakukan pada musim timur adalah memancing ikan kerapu yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Nelayan juga memanfaatkan waktu dengan mencari dan mengeringkan rumput laut. Dengan demikian pendapatan rumah tangga pada musim timur dapat dimaksimalkan oleh nelayan yang memiliki alat tangkap dan perahu bermotor, tetapi tidak demikian bagi nelayan *lepa-lepa* (lihat Tabel 4.10).

Tabel 4.10. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (Rupiah)

Pendapatan	Musim					
	Gelombang Lemah		Pancaroba		Gelombang Kuat	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008
Rata-rata	539.104	885.396	343.219	854.186	486.958	1.023.069
Median	335.000	750.000	250.000	687.500	400.000	600.000
Minimum	7.000	0	30.000	0	0	0
Maksimum	3.000.000	5.850.000	2.000.000	4.000.000	2.550.000	8.600.000

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2006
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008

Masa sulit bagi nelayan di Desa Mattiro Bombang adalah masa pancaroba yang berlangsung antara bulan April sampai dengan Mei dan bulan Oktober sampai dengan November. Pada masa ini pendapatan rumah tangga yang bersumber dari perikanan tangkap mengalami penurunan dibandingkan dengan musim timur dan barat. Penurunan pendapatan rumah tangga perikanan sangat terkait dengan penurunan hasil tangkapan kepiting. Selain itu, penurunan ini dipengaruhi nilai jual ikan gamasi yang sangat rendah akibat jumlah tangkapan ikan gamasi⁶ yang meningkat. Kedua keadaan tersebut jelas tidak menguntungkan bagi nelayan. Di sisi lain, kondisi cuaca yang tidak menentu semakin mempersulit nelayan untuk melaut yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan rumah tangga.

Dilihat dari kondisi musim dan cuaca, tidak ada perubahan pola pendapatan antara tahun 2006 dan 2008. Pendapatan rumah tangga perikanan tertinggi pada musim gelombang lemah yang diikuti pada gelombang kuat. Pendapatan rumah tangga paling rendah adalah pada musim pancaroba. Tidak adanya perbedaan tersebut juga mencerminkan tidak adanya perubahan jenis tangkapan nelayan. Hal yang mencolok terjadi pada peningkatan pendapatan rumah tangga di setiap musim. Peningkatan harga bahan pokok di tingkat desa yang merupakan dampak dari peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) di tingkat nasional menyebabkan peningkatan harga jual komoditas tangkapan, tidak hanya di tingkat nelayan bahkan juga di tingkat pasar. Sebagai contoh, harga jual kepiting meningkat dari Rp. 20.000,- per kg pada tahun 2006 menjadi Rp. 26.000,- per kg di tahun 2008. Selain itu, bertambahnya perusahaan *mini plan* di Desa Mattiro Bombang menyebabkan harga jual kepiting menjadi kompetitif karena tidak ada monopoli.

⁶ Harga jual ikan gamasi di tingkat desa pada musim pancaroba adalah Rp. 70,-/ekor sedangkan pada musim timur harga jual ikan mencapai Rp. 150,-/ekor.

Tabel 4.11. Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (%)

Besarnya Pendapatan	Musim					
	Gelombang Lemah		Pancaroba		Gelombang Kuat	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008
< Rp. 500.000,-	61,4	31,0	85,4	34,8	67,7	38,6
Rp. 500.000,- - Rp. 999.000,-	20,8	35,4	8,3	32,9	20,8	24,1
Rp. 1.000.000,- - Rp. 1.499.000,-	9,4	20,3	4,2	17,7	7,3	13,9
Rp. 1.500.000,- - Rp. 1.999.000,-	5,2	3,2	1,0	5,1	2,1	10,8
Rp. 2.000.000,- - Rp. 2.499.000,-	1,0	5,1	1,0	4,4	1,0	6,3
Rp. 2.500.000,- - Rp. 2.999.000,-	1,0	3,0	-	1,9	1,0	1,3
Rp. 3.000.000,- - Rp. 3.499.000,-	1,0	1,3	-	2,5	-	-
Rp. 3.500.000,- - Rp. 3.999.000,-	-	0,6	-	-	-	2,5
Rp. 4.000.000,- +	-	-	-	0,6	-	1,0
Jumlah	100,0		100,0		100,0	

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2006
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008.

Dilihat dari distribusi pendapatan rumah tangga perikanan, terjadi penurunan persentase rumah tangga yang berpendapatan kurang dari Rp. 500.000,- per bulan, meskipun persentase terbesar masih pada kelompok tersebut. Sepanjang tahun dan sepanjang musim, terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga dari perikanan tangkap, baik pada musim gelombang lemah, gelombang kuat dan musim pancaroba. Peningkatan pendapatan rumah tangga perikanan yang paling mencolok terjadi pada musim gelombang kuat, dengan rata-rata pendapatan rumah tangga meningkat setengah sampai satu kali lipat dari pendapatan rumah tangga perikanan per bulan pada tahun 2006 (lihat Tabel 4.10 dan 4.11). Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga perikanan adalah penggunaan alat tangkap bubu untuk menangkap kepiting yang dianggap lebih tahan lama dan tidak mudah rusak atau hilang sebagai pengganti jaring.

Rumah Tangga Anggota Pokmas COREMAP

Meskipun COREMAP telah diperkenalkan kepada masyarakat Desa Mattiro Bombang sejak tahun 2005, akan tetapi pelaksanaan

COREMAP sampai di tingkat desa baru dirasakan oleh penduduk pada tahun 2008. Pada saat itu program ini baru menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti pengadaan pondok informasi, pembelian kapal untuk patroli, pembuatan rumpon dan pelatihan singkat dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pangkep. Kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan pendapatan masyarakat belum dilaksanakan. Sulit untuk mengatakan bahwa kegiatan COREMAP telah berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga anggota pokmas, dalam arti meningkatkan pendapatannya. Hal ini karena kegiatan COREMAP masih terbatas dan baru dilaksanakan selama beberapa bulan sebelum penelitian.

Tabel 4.12. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih yang Salah Satu ART-nya Menjadi Anggota dan Bukan Anggota Pokmas/COREMAP, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkep, 2008 (Rupiah)

<i>Pendapatan</i>	<i>Anggota Pokmas/COREMAP</i>	<i>Bukan Anggota Pokmas/COREMAP</i>
Rata-rata	1.170.606	879.524
Median	950.000	616.667
Minimum	212.000	0
Maksimum	4.603.333	9.650.000
per kapita	256.288	172.655
N	33	89

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008.

Rata-rata pendapatan rumah tangga yang salah satu anggota rumah tangganya menjadi anggota pokmas atau terlibat dalam kegiatan COREMAP sebesar Rp. 1.170.606,- per bulan. Pendapatan tersebut relatif lebih besar dibanding dengan pendapatan rumah tangga yang tidak mempunyai anggota yang terlibat dalam kegiatan COREMAP (Rp. 879.524,- per bulan). Tingginya pendapatan rumah tangga anggota pokmas juga terlihat dari nilai tengah dan pendapatan terendah (Rp. 212.000,-) yang jauh lebih besar dibanding dengan pendapatan terendah rumah tangga yang anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan pokmas COREMAP, yaitu nol rupiah. Perbedaan pendapatan juga dapat dilihat dari pendapatan per kapita per bulan. Rumah tangga yang salah satu anggotanya merupakan anggota pokmas mempunyai pendapatan per kapita sebanyak 50 persen lebih besar daripada pendapatan per kapita per bulan rumah tangga bukan

anggota pokmas (lihat Tabel 4.12). Dengan mempertimbangkan keberadaan COREMAP di Desa Mattiro Bombang dan lebih tingginya pendapatan rumah tangga anggota pokmas, dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga anggota pokmas relatif lebih baik. Namun demikian, sulit untuk mengatakan bahwa hal itu merupakan dampak positif dari kegiatan COREMAP. Hal ini karena mereka belum mendapatkan manfaat langsung dari pinjaman modal yang diberikan COREMAP. Pinjaman dana tersebut, yang dikenal dengan sebutan *seed fund*, baru cair di tingkat desa pada Bulan Juni 2008.

Dilihat dari jenis pekerjaannya, mayoritas KRT dalam rumah tangga anggota pokmas/COREMAP mempunyai kegiatan sebagai nelayan (68,8 persen), tenaga penjualan (12,5 persen) tenaga profesional/administrasi (6,3 persen), dan tenaga jasa (12,5 persen). Seperti kondisi umumnya, sektor perikanan tangkap (68,8 persen) masih menjadi sektor utama sumber pendapatan rumah tangga anggota pokmas/COREMAP di Desa Mattiro Bombang. Mata pencaharian KRT yang terlibat dalam kegiatan pokmas/COREMAP, juga bervariasi. Rumah tangga anggota pokmas/COREMAP yang mempunyai pendapatan rata-rata tertinggi per bulan adalah yang dikepalai oleh KRT yang bekerja di sektor perikanan tangkap (Rp. 1.327.636,-), yang kemudian diikuti oleh transportasi dengan pendapatan rata-rata per bulan sebesar Rp. 962.500,-. Keadaan yang sama juga terlihat dari rata-rata pendapatan per kapita per bulan (lihat Tabel 4.13).

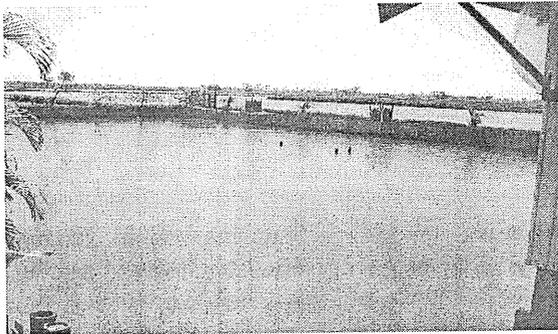
Tabel 4.13. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas/COREMAP Menurut Lapangan Pekerjaan KRT, Desa Mattiro Bombang, Kabupaten Pangkep 2008 (Rupiah)

Lapangan Pekerjaan KRT	Rata-rata Pendapatan RT/bulan	Rata-rata Pendapatan perkapita/bulan
Perikanan tangkap	1.327.636	285.302
Perdagangan	953.000	174.714
Jasa kemasyarakatan	600.000	152.381
Transprotasi	962.500	274.306
KRT tidak bekerja	560.000	80.000

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008.

4.2.2. Pendapatan Rumah Tangga di Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang

Sumber mata pencaharian penduduk di Kelurahan Pundata Baji lebih bervariasi dibandingkan dengan di Desa Mattiro Bombang. Secara umum, dari tahun 2006 sampai dengan 2008 tidak terjadi perubahan



Gambar 4.3. Kegiatan Budidaya Ikan (Tambak) di Kelurahan Pundata Baji

sumber mata pencaharian penduduk di Kelurahan Pundata Baji. Selain perikanan tangkap, penduduk Kelurahan Pundata Baji cukup banyak yang bekerja di sektor perikanan budidaya, khususnya ikan bandeng dan udang. Dibanding dengan kondisi tahun 2006, terjadi peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki sumber mata pencaharian utama di sektor perikanan tangkap, yaitu dari 14 pesen pada tahun 2006 menjadi 27 persen pada tahun 2008. Sebaliknya, proporsi rumah tangga yang memiliki sumber mata pencaharian utama di sektor perikanan budidaya sedikit menurun, khususnya pada budidaya udang. Kegiatan ekonomi lainnya yang dilakukan penduduk di Kelurahan Pundata Baji adalah pertanian tanaman pangan, industri pengolahan, perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan transportasi. Satu kegiatan ekonomi yang hanya ada di kelurahan ini (dan tidak terdapat di Desa Mattiro Bombang) adalah peternakan ayam. Selain itu, pada tahun 2008 tidak ditemukan lagi rumah tangga yang mempunyai sumber mata pencaharian utama di sektor bangunan, seperti yang masih ditemukan pada tahun 2006.

Selama setahun terakhir kegiatan perikanan tangkap di wilayah Kelurahan Pundata Baji mulai memperlihatkan peningkatan (informasi dari masyarakat di Kelurahan Pundata Baji). Hal tersebut

dapat terlihat dari semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan seperti yang diuraikan pada bagian sebelumnya. Diperkenalkannya alat tangkap baru di kalangan nelayan menjadi daya tarik bagi mereka untuk kembali melaut. Dua tahun yang lalu nelayan hanya menggunakan jaring untuk menangkap kepiting, akan tetapi alat tangkap baru (bubu/*rakkang*) yang diperkenalkan memberikan hasil yang relatif lebih baik dibanding dengan hanya menggunakan jaring. Pembaruan alat tersebut juga terkait dengan dukungan bantuan permodalan dari pedagang pengumpul kepada sawi-sawinya dalam pengadaan bubu. Bantuan keuangan tersebut tidak terlepas pula dari kegiatan COREMAP karena ada pedagang pengumpul yang memperoleh bantuan dana bergulir dari COREMAP yang kemudian meminjamkan lagi dana tersebut kepada nelayan sawinya untuk membeli bubu (wawancara mendalam dengan pedagang pengumpul dan pengurus COREMAP).

Selain kegiatan perikanan, penduduk yang bekerja sebagai pedagang cukup banyak ditemukan di Kelurahan Pundata Baji. Meskipun secara umum terjadi penurunan persentase penduduk yang bekerja di sektor tersebut, namun perdagangan masih menjadi salah satu sumber pendapatan rumah tangga. Penurunan proporsi pedagang pengumpul di Kelurahan Pundata Baji sangat terkait dengan hasil tangkapan nelayan yang hanya terkonsentrasi pada satu jenis sumber daya laut, yaitu kepiting. Pada tahun 2006, nelayan menangkap jenis ikan yang lebih bervariasi yaitu ikan bete-bete, lurek, dan gamasi. Tahun 2008, nelayan lebih cenderung menangkap kepiting karena memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding dengan jenis hasil laut lainnya.

Tidak berbeda dengan wilayah pesisir lainnya, Kelurahan Pundata Baji memiliki variasi kesempatan kerja yang sangat beragam. Keadaan ini juga berdampak pada bervariasinya sumber pendapatan rumah tangga. Hanya sebagian kecil rumah tangga yang memiliki satu macam/jenis sumber pendapatan rumah tangga. Pada umumnya pendapatan rumah tangga di Kelurahan Pundata Baji berasal dari dua jenis pekerjaan, misalnya dari jasa kemasyarakatan dan budidaya perikanan. Dengan demikian, musim atau gelombang laut tidak serta

merta mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Hanya rumah tangga yang sepenuhnya bergantung pada perikanan tangkap yang mengalami fluktuasi pendapatan berdasarkan musim, seperti penduduk di Desa Mattiro Bombang.

Secara umum, pendapatan rumah tangga terpilih di Kelurahan Pundata Baji masih lebih besar dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga terpilih di Desa Mattiro Bombang. Hal tersebut terlihat dari nilai tengah pendapatan rumah tangga di Kelurahan Pundata Baji yaitu Rp. 833.333,- per bulan, yang lebih besar dibanding dengan nilai tengah pendapatan rumah tangga di Desa Mattiro Bombang yang berjumlah Rp. 734.167,- per bulan. Tingginya pendapatan rumah tangga di Kelurahan Pundata Baji terkait dengan beragamnya kesempatan kerja di wilayah tersebut sehingga pendapatan rumah tangga tidak hanya bersumber dari satu pekerjaan. Selain itu, mata pencaharian penduduk tidak hanya tergantung pada hasil laut sehingga pendapatan rumah tangga tidak dipengaruhi oleh keadaan musim dan gelombang laut.

Tabel 4.14. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (Rupiah)

Pendapatan per Bulan	2006	2008
Rata-rata	1.137.574	1.168.727
Median	975.000	833.333
Minimum	60.000	41.667
Maksimum	4.796.667	8.070.000
Per kapita	222.319	236.602

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2006.
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008.

Dibanding dengan tahun 2006, rata-rata pendapatan rumah tangga terpilih di Kelurahan Pundata Baji pada tahun 2008 sedikit lebih baik, dengan laju pertumbuhan per tahun adalah 1,35 persen. Meskipun demikian, terjadi penurunan pada nilai tengah pendapatan rumah tangga dari Rp. 975.000,- per bulan pada tahun 2006 menjadi Rp. 833.333,- per bulan pada tahun 2008. Penurunan tersebut juga terlihat dari pendapatan rumah tangga minimum yang juga semakin

menurun (lihat Tabel 4.14). Peningkatan yang signifikan juga terlihat dari pendapatan per kapita per bulan. Perubahan pendapatan rumah tangga yang relatif rendah di Kelurahan Pundata Baji terkait dengan tidak adanya perubahan jenis pekerjaan dan juga tidak hanya tergantung pada sumber daya laut.

Tabel 4.15 berikut ini menyajikan distribusi pendapatan rumah tangga terpilih di Kelurahan Pundata Baji. Dari data tersebut terlihat bahwa 25,8 persen rumah tangga mempunyai pendapatan kurang dari Rp. 500.000,- setiap bulan. Secara umum, terjadi pergeseran distribusi menuju arah pendapatan rumah tangga yang lebih rendah, antara lain dapat dilihat dari meningkatnya proporsi rumah tangga dengan pendapatan kurang dari Rp. 500.000,-, yaitu dari 25 persen pada tahun 2006 menjadi 25,8 persen pada tahun 2008. Keadaan ini juga terjadi pada kelompok pendapatan antara Rp. 500.000,- - Rp. 999.000,-, yang meningkat dari 26 persen pada tahun 2006 menjadi 31,7 persen pada tahun 2008. Selanjutnya, pada kelompok pendapatan tinggi, di atas Rp. 1.000.000,-, terjadi penurunan proporsi, kecuali untuk kelompok pendapatan Rp. 2.000.000,- - Rp. 2.499.000,- yang meningkat dari empat persen pada tahun 2006 menjadi 5,8 persen pada tahun 2008. Keadaan ini cenderung menunjukkan perubahan distribusi pendapatan ke arah pendapatan yang lebih rendah antara tahun 2006 dan 2008.

Tabel 4.15. Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Besar Pendapatan, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (%)

Besar Pendapatan	2006 <i>n=100</i>	2008 <i>n= 120</i>
< Rp. 500.000,-	25,0	25,8
Rp. 500.000,- - Rp. 999.000,-	26,0	31,7
Rp. 1.000.000,- - Rp. 1.499.000,-	21,0	20,0
Rp. 1.500.000,- - Rp. 1.999.000,-	14,0	9,2
Rp. 2.000.000,- - Rp. 2.499.000,-	4,0	5,8
Rp. 2.500.000,- - Rp. 2.999.000,-	4,0	1,7
Rp. 3.000.000,- +	6,0	5,8
Jumlah	100,0	100,0

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2006.
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008.

Beragamnya jenis pekerjaan yang terdapat di Kelurahan Pundata Baji tercermin dari lapangan pekerjaan KRT terpilih. Sumber pendapatan rumah tangga terpilih di Kelurahan Pundata Baji berasal dari enam sektor pekerjaan (lihat Tabel 4.16). Sektor perikanan budidaya masih menjadi sumber pendapatan utama yang terpenting, yang diikuti oleh perikanan laut dan sektor jasa kemasyarakatan. Pada tahun 2008, rumah tangga dengan pendapatan rata-rata yang tergolong tinggi adalah yang mempunyai KRT yang bekerja di sektor jasa kemasyarakatan dan perdagangan. Meskipun rata-rata pendapatan rumah tangga untuk KRT yang bekerja di sektor industri pengolahan juga termasuk yang paling tinggi, akan tetapi KRT yang bekerja di sektor tersebut sangat sedikit sehingga tidak dapat menggambarkan kondisi umum di Kelurahan Pundata Baji.

Tabel 4.16. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (Rupiah)

Lapangan Pekerjaan Utama KRT	Rata-rata		Minimum		Maximum	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008
Perikanan tangkap	974.226	929.292	191.667	212.500	2.116.667	2.138.333
Perikanan budidaya	1.216.513	1.090.530	155.833	41.667	4.796.667	7.100.000
Pertanian tanaman pangan	388.667	511.083	100.000	187.500	716.667	1.238.750
Industri Pengolahan	4.090.278	2.523.333	270.833	700.000	11.000.000	6.000.000
Perdagangan	1.194.764	1.176.042	284.000	240.000	3.240.000	2.521.667
Jasa Kemasyarakatan	1.545.145	1.518.157	600.000	400.000	2.300.000	4.894.500
Transportasi	760.917	429.458	371.250	80.000	1.833.333	870.000
Peternakan	3.083.333	725.000	3.083.333	125.000	3.083.333	1.325.000
Lainnya (Bangunan)	1.220.278	-	289.167	-	2.891.667	-
KRT tidak bekerja	920.000	2.211.333	60.000	396.667	2.500.000	8.070.000

Sumber : - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2006.
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008.

Secara umum, terjadi penurunan pendapatan rata-rata rumah tangga pada setiap lapangan pekerjaan KRT antara tahun 2006 – 2008. Di sisi lain, pendapatan rumah tangga di sektor pertanian tanaman pangan mengalami peningkatan (lihat Tabel 4.16). Penurunan pendapatan rumah tangga terbesar terjadi pada rumah tangga dengan KRT yang bekerja di sektor industri pengolahan. Penurunan ini tentunya terkait dengan penurunan hasil sumber daya laut, khususnya kepiting di perairan di sekitar Kecamatan Labakkang. Berkurangnya hasil tangkapan nelayan juga berpengaruh terhadap penurunan pendapatan rumah tangga dari perikanan tangkap, dari Rp. 974.266,- per bulan menjadi Rp. 929.292,- per bulan. Meskipun begitu,

penurunan rata-rata pendapatan rumah tangga perikanan tangkap tidak terlihat pada nilai minimum dan maksimum pendapatan rumah tangga. Pada tahun 2006 pendapatan rumah tangga terendah adalah Rp. 191.667,- per bulan dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 212,500,- per bulan.

Penurunan pendapatan rumah tangga juga terjadi pada rumah tangga yang mata pencaharian utamanya bersumber dari sektor budidaya perikanan, dengan besar penurunan dari Rp. 1.216.513,- pada tahun 2006 menjadi Rp. 1.090.530,- pada tahun 2008. Penurunan pendapatan rumah tangga pada sektor budidaya perikanan sangat terkait dengan peningkatan biaya operasional budidaya seperti bibit, pakan ikan, pupuk dan bahan bakar minyak. Ketergantungan bibit dari luar Kabupaten Pangkep memaksa petani budidaya mengeluarkan biaya yang semakin tinggi. Selain itu, biaya perawatan mengalami peningkatan akibat semakin tingginya kebutuhan hidup *sawi*, sebagai orang yang dipercaya untuk melakukan perawatan. Dengan demikian, biaya kebutuhan *sawi* merupakan salah satu komponen biaya perawatan. Peningkatan biaya-biaya operasional tersebut tidak secara signifikan meningkatkan harga jual ikan bandeng di pasar lokal dan domestik. Meskipun terjadi penurunan pendapatan rumah tangga yang bersumber dari perikanan budidaya, pendapatan rumah tangga tersebut masih lebih tinggi dibanding dengan pendapatan rumah tangga yang bersumber dari perikanan tangkap. Masih tingginya pendapatan rumah tangga budidaya perikanan sangat terkait dengan luasnya lahan dan nilai ekonomi ikan dan udang yang relatif stabil dan cukup tinggi.

Secara umum, terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga yang bersumber dari sektor pertanian tanaman pangan pada tahun 2008. Peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut sangat terkait dengan penambahan aliran irigasi dari pemerintah Kabupaten Pangkep. Hal ini terlihat pada pola tanam yang hanya sekali setahun pada tahun 2006 meningkat menjadi dua kali penanaman pada tahun 2008, meskipun tidak terjadi perluasan lahan tanam. Peningkatan frekuensi penanaman padi dalam satu tahun tentunya mempengaruhi hasil panen dan pendapatan rumah tangga.

Selain peningkatan pendapatan pada rumah tangga sektor pertanian tanaman pangan, peningkatan pendapatan terjadi pada rumah tangga yang KRT-nya tidak bekerja. Keadaan ini terjadi karena tanggung jawab KRT sebagai pencari penghasilan rumah tangga tergantikan oleh anggota rumah tangga lainnya. Pada umumnya rumah tangga terpilih dengan KRT yang tidak bekerja memiliki ART yang bekerja di sektor jasa seperti jasa kemasyarakatan, transportasi, dan perdagangan, ataupun bekerja di sektor industri sebagai buruh di industri pengupasan kepingan atau industri pertambangan yang terdapat di sekitar Kecamatan Labakkang. Oleh karena itu, peningkatan penghasilan di sektor-sektor tersebut akan meningkatkan pendapatan rumah tangganya.

Rumah Tangga Kegiatan Kenelayanan

Pendapatan rumah tangga terpilih yang berasal dari kegiatan kenelayanan dengan armada tangkap yang sangat sederhana bervariasi menurut musim. Musim gelombang lemah memberikan peluang bagi nelayan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar karena mereka dapat melaut sampai ke lokasi yang jauh dari pantai. Pada tahun 2008, pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan pada musim gelombang lemah hampir sama dibanding dengan pendapatan rumah tangga nelayan pada musim gelombang kuat dan satu setengah kali lipat dibanding dengan musim pancaroba. Rendahnya pendapatan rumah tangga pada musim gelombang kuat diakibatkan kondisi alam yang tidak memungkinkan nelayan untuk melaut.

Tabel 4.17. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (Rupiah)

Pendapatan	Musim					
	Gelombang Lemah		Pancaroba		Gelombang Kuat	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008
Rata-rata	1.378.611	943.875	457.222	757.125	135.000	490.675
Median	870.000	1.000.000	500.000	675.000	75.000	355.000
Minimum	250.000	0	200.000	0	0	0
Maksimum	4.000.000	3.500.000	9.550.000	1.600.000	500.000	1.750.000

Sumber : - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2006
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008.

Secara umum, pendapatan rumah tangga terpilih dari kegiatan kenelayan mengalami peningkatan antara tahun 2006 dan 2008 pada musim pancaroba dan gelombang kuat, tetapi tidak meningkat pada musim gelombang lemah. Pada musim gelombang lemah, pendapatan rumah tangga cenderung memperlihatkan penurunan sampai 22 persen dibanding dengan dua tahun sebelumnya. Meskipun begitu, penurunan tersebut tidak signifikan apabila dilihat dari nilai tengah (median) pendapatan rumah tangga musim gelombang lemah yang cenderung meningkat. Pada musim gelombang kuat dan pancaroba, peningkatan pendapatan rumah tangga masing-masing mencapai tiga kali lipat dan dan tiga perempat kali lipat secara berturut-turut (lihat Tabel 4.17).

Tabel 4.18. Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan dan Musim, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 2006 dan 2008 (%)

Besar Pendapatan	Musim					
	Gelombang Lemah		Pancaroba		Gelombang Kuat	
	2006	2008	2006	2008	2006	2008
< Rp. 500.000,-	16,7	16,0	44,4	30,0	94,4	58,0
Rp. 500.000,- - Rp. 999.000,-	44,4	28,0	55,6	28,0	5,6	16,0
Rp. 1.000.000,- - Rp. 1.499.000,-	5,6	38,0	-	22,0	-	22,0
Rp. 1.500.000,- - Rp. 1.999.000,-	11,1	6,0	-	10,0	-	4,0
Rp. 2.000.000,- - Rp. 2.499.000,-	5,6	6,0	-	-	-	-
Rp. 2.500.000,- - Rp. 2.999.000,-	-	2,0	-	-	-	-
Rp. 3.000.000,- +	16,7	4,0	-	-	-	-
Jumlah	100,0		100,0		100,0	

Sumber: - Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia 2006.
 - Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008.

Peningkatan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayan juga terlihat dari distribusi pendapatan rumah tangga menurut musim (Tabel 4.18). Data pada Tabel 4.18 memperlihatkan bahwa pada musim gelombang kuat ada pergeseran pendapatan rumah tangga menuju kelompok pendapatan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, proporsi rumah tangga dengan pendapatan di bawah Rp. 500.000,- per bulan, berkurang dari 94 persen pada tahun 2006 menjadi 58 persen pada tahun 2008. Pergeseran terbesar terjadi pada kelompok pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 1.000.000,- hingga

Rp. 1.499.000,- per bulan yang pertambahannya mencapai 22 persen. Peningkatan pendapatan rumah tangga juga terjadi pada musim pancaroba pada kelompok pendapatan rumah tangga kurang dari Rp. 1.000.000,- per bulan yang mengalami peningkatan hingga 32 persen atau sepertiga dari rumah tangga terpilih. Pada musim gelombang lemah, pendapatan rumah tangga secara umum juga memperlihatkan pergeseran ke arah pendapatan yang lebih besar. Meskipun terjadi penurunan pendapatan rumah tangga pada musim gelombang lemah, secara umum terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan.

Secara umum, kegiatan kenelayanan di Kelurahan Pundata Baji relatif lebih sederhana dibanding dengan nelayan di Desa Mattiro Bombang. Keberagaman sumber daya alam di kelurahan ini mengakibatkan hanya sebagian kecil rumah tangga yang menggantungkan kehidupan rumah tangga terhadap hasil laut. Kegiatan kenelayanan yang umumnya terjadi di perairan Maccini Baji adalah nelayan pukat atau *lampara* dan nelayan bubu. Nelayan pukat atau *lampara* umumnya melaut pada musim gelombang tenang dan musim pancaroba. Dari jenis tangkapan oleh nelayan di sekitar Kelurahan Pundata Baji, tidak terlihat adanya perubahan komoditas tangkapan yaitu kepiting dan ikan-ikan kecil seperti *lurek* atau *bête-bete* dibanding dengan kondisi dua tahun lalu. Dilihat dari kapasitas tangkapannya, kepiting masih menjadi tangkapan utama nelayan. Hal tersebut semakin didukung dengan adanya alat tangkap baru yaitu *rakkang*. *Rakkang* diperkenalkan pada penduduk pada awal tahun 2008. Keberadaan alat ini cukup membantu nelayan untuk memudahkan proses penangkapan kepiting (hasil wawancara dengan pedagang pengumpul). Oleh karena itu, meskipun secara umum terjadi penurunan produksi/hasil tangkapan nelayan di Kelurahan Pundata Baji, penggunaan alat tangkap baru dan peningkatan harga jual akibat peningkatan harga bahan bakar minyak akan berdampak pada meningkatnya pendapatan nelayan. Selain sebagai nelayan pada umumnya, sebagian penduduk di sekitar dermaga Maccine Baji bekerja sebagai buruh angkut ikan yang mengangkat ikan-ikan hasil tangkapan dari kapal-kapal besar yang merapat di dermaga tersebut untuk dijual ke pasar di Kabupaten Pangkep. Kegiatan kenelayanan

yang cukup banyak dilakukan oleh penduduk di sekitar demaga adalah sebagai ABK pada kapal-kapal besar tersebut yang merupakan milik penduduk pulau-pulau di Desa Mattiro Baji. Pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh penduduk usia muda.

Rumah Tangga Anggota Pokmas/COREMAP

Sama halnya dengan Desa Mattiro Bombang, masyarakat di Kelurahan Pundata Baji mulai diperkenalkan pada program COREMAP tahun 2005. Meskipun begitu, pengucuran dana bergulir atau *seed fund* di tingkat masyarakat baru terlaksana pada bulan April 2008. Masih barunya pemanfaatan dana tersebut di tingkat masyarakat menyebabkan sulit untuk melihat dampak dari COREMAP terhadap pendapatan rumah tangga anggota pokmas. Secara umum, rata-rata pendapatan rumah tangga anggota pokmas di Kelurahan Pundata Baji lebih rendah dibanding dengan pendapatan rumah tangga bukan anggota pokmas. Hal ini juga terlihat dari pendapatan per kapitanya, meskipun nilai tengah (median) pendapatan rumah tangga anggota pokmas sama dengan rumah tangga bukan anggota pokmas (lihat Tabel 4.19).

Tabel 4.19. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Terpilih yang Salah Satu ART-nya Menjadi Anggota dan Bukan Anggota Pokmas/COREMAP, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkep, 2008 (Rupiah)

<i>Pendapatan</i>	<i>Anggota Pokmas/COREMAP</i>	<i>Bukan Anggota Pokmas/COREMAP</i>
Rata-rata	965.300	1.236.537
Median	833.333	834.167
Minimum	83.333	41.667
Maksimum	2.323.333	8.070.000
Per kapita	235.439	236.990
N	30	90

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008.

Dana yang baru bergulir selama dua bulan di tingkat masyarakat saat penelitian ini dilakukan menyebabkan sulit untuk menilai apakah bantuan yang diberikan oleh COREMAP telah memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan rumah tangga anggota pokmas. Tingginya pendapatan rumah tangga anggota pokmas tidak bisa dikatakan sebagai dampak dari bantuan dana bergulir yang diterima. Meskipun begitu, pendapatan rumah tangga anggota pokmas tergolong cukup baik, walaupun masih lebih rendah dibanding dengan pendapatan rumah tangga bukan anggota pokmas.

Tabel 4.20. Statistik Pendapatan Rumah Tangga Anggota Pokmas/COREMAP Menurut Lapangan Pekerjaan Utama KRT, Kelurahan Pundata Baji, Kabupaten Pangkep, 2008 (Rupiah)

<i>Lapangan Pekerjaan Utama KRT</i>	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>
Perikanan tangkap	976.410	947.500	212.500	2.138.333
Perikanan budidaya	1.038.889	833.333	83.333	2.323.333
Perdagangan	280.000	280.000	280.000	280.000
Jasa	947.952	700.000	140.667	2.300.000

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation Sosial-Ekonomi COREMAP 2008.

Dilihat dari sumber pendapatan utama kepala rumah tangga anggota pokmas/COREMAP di Kelurahan Pundata Baji, mayoritas bersumber dari perikanan tangkap. Rumah tangga anggota pokmas/COREMAP memiliki pendapatan yang relatif tinggi, kecuali rumah tangga yang lapangan pekerjaan KRT-nya di sektor perdagangan. Rata-rata pendapatan rumah tangga tertinggi anggota pokmas/COREMAP berasal dari sektor perikanan budidaya. Keadaan tersebut sangat terkait dengan sifat pendapatan yang relatif stabil dibandingkan sektor perikanan tangkap. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang mendapatkan bantuan *seed fund* mempunyai pendapatan rata-rata yang relatif lebih baik dibanding dengan rumah tangga lainnya, tercermin dari rata-rata pendapatan rumah tangga menurut lapangan pekerjaan kepala rumah tangga

anggota pokmas/COREMAP di Kelurahan Pundata Baji (lihat Tabel 4.20).

4.3. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perubahan Pendapatan

Berdasarkan analisis pendapatan di kedua lokasi penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2008 rumah tangga sampel penelitian mengalami peningkatan pendapatan dibanding dengan kondisi pada tahun 2006. Peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut dapat terlihat hampir di semua rumah tangga yang terpilih. Adanya peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga terpilih di kedua lokasi penelitian dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Tiga faktor utama yang mempengaruhi perubahan pendapatan tersebut yaitu faktor struktural, internal, dan eksternal. Lebih lanjut, pada sub-bab ini akan mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan rumah tangga tersebut.

4.3.1. Faktor Struktural

Faktor struktural mencakup aturan/kebijakan/program pemerintah, baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan COREMAP maupun program-program pemerintah lainnya yang berperan, baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perubahan pendapatan rumah tangga. Meskipun kegiatan COREMAP telah diperkenalkan kepada masyarakat di kedua lokasi penelitian sejak akhir tahun 2005, implementasi kegiatan di tingkat masyarakat baru terlaksana pada bulan April 2008 berupa bantuan dana bergulir atau *seed fund*. Dengan demikian, adanya peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga di kedua lokasi tidak dapat dinyatakan sebagai akibat langsung dari kegiatan COREMAP, melainkan dari faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap perubahan tersebut.

Banyaknya program pemerintah lain yang dilaksanakan di kedua lokasi penelitian diduga mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga. Program pemerintah tersebut adalah Koperasi Usaha Bersama (KUB) yang diselenggarakan oleh Dinas

Keluatan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dan Koperasi Syariah. KUB merupakan program yang memberikan bantuan modal bagi nelayan untuk pengadaan armada atau alat tangkap, sedangkan PPK merupakan program bantuan modal untuk berbagai kegiatan usaha masyarakat atau peningkatan infrastruktur desa. Semua program tersebut juga memberikan bantuan pinjaman dana seperti halnya kegiatan COREMAP. Bantuan dana yang dapat digunakan untuk pengadaan armada atau alat tangkap dirasakan sangat membantu oleh sebagian nelayan di kepulauan maupun di pesisir dalam meningkatkan pendapatan mereka dari kegiatan kenelayanan (wawancara mendalam dengan nelayan dan tokoh masyarakat di kedua lokasi penelitian). Dengan demikian, keberadaan kegiatan-kegiatan dan berbagai program pemerintah selain COREMAP mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga di lokasi penelitian.

Bagi rumah tangga yang mempunyai sumber pendapatan utama dari kegiatan kenelayanan, penguasaan teknologi (armada dan alat tangkap) sangat berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh. Semakin beragamnya jumlah dan jenis alat tangkap yang dimiliki rumah tangga menyebabkan semakin besar kemungkinan rumah tangga untuk meningkatkan pendapatannya. Pengenalan alat tangkap baru berupa bubu kepiting pada awal tahun 2008 di kalangan nelayan semakin memudahkan kegiatan penangkapan sumber daya laut tersebut dan meningkatkan volume hasil tangkapan mereka. Peningkatan kepemilikan jumlah dan jenis alat tangkap terkait dengan program-program pemerintah yang memberikan bantuan dana untuk modal usaha di kalangan nelayan (wawancara mendalam dengan beberapa nelayan di kedua lokasi penelitian). Sebagian nelayan penerima bantuan modal tersebut menggunakannya untuk membeli mesin perahu atau menambah jumlah serta jenis alat tangkap. Kepemilikan armada tangkap yang dilengkapi dengan mesin sangat mempengaruhi wilayah penangkapan yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi tangkapan nelayan. Dengan demikian, keberadaan sarana produksi yang lebih baik dan jangkauan wilayah

tangkap yang semakin luas menyebabkan pendapatan nelayan semakin meningkat.

Perluasan wilayah tangkap di kalangan nelayan sangat dirasakan oleh sebagian besar penduduk, tidak hanya yang tinggal di pesisir namun juga penduduk di kepulauan. Sebagai contoh, wilayah penangkapan ikan tenggiri pada tahun 2008 mengalami perluasan dibandingkan dengan tahun 2006. Pada tahun 2006, wilayah tangkap ikan tenggiri umumnya hanya di sekitar perairan laut dalam di Desa Mattiro Bombang sehingga kegiatan melaut dapat dilakukan setiap hari, yaitu pergi malam dan pulang menjelang subuh (Noveria dkk. 2006). Meskipun begitu, dua tahun kemudian (2008) terjadi perluasan wilayah tangkap karena semakin berkurangnya populasi ikan tenggiri di sekitar perairan laut dalam Desa Mattiro Bombang. Untuk mendapatkan hasil yang sama dengan tahun 2006, nelayan harus melaut sampai wilayah yang makin jauh dari desa mereka. Perubahan wilayah tangkap tersebut juga terkait dengan waktu melaut yang lebih lama, yaitu dua sampai dengan tiga hari (wawancara mendalam dengan nelayan). Keadaan tersebut menggambarkan bahwa perluasan wilayah tangkap di kalangan nelayan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan rumah tangga nelayan. Perluasan wilayah tangkap dapat dilakukan nelayan setelah mereka mempunyai armada tangkap dengan kekuatan mesin yang lebih baik, yang sebagian diperoleh melalui bantuan program-program pemerintah.

4.3.2. Faktor Internal

Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga, yaitu sumber pendapatan, teknologi dan wilayah penangkapan serta biaya produksi. Keberagaman sumber pendapatan rumah tangga berperan penting dalam meningkatkan jumlah pendapatan rumah tangga. Semakin beragam sumber pendapatan rumah tangga, pendapatan rumah tangga juga cenderung semakin meningkat. Secara umum, sumber pendapatan rumah tangga di kedua lokasi penelitian relatif bervariasi. Desa Mattiro Bombang yang merupakan wilayah kepulauan mengalami peningkatan variasi

sumber pendapatan rumah tangga dibandingkan pada kondisi tahun 2006. Pada tahun 2006, mayoritas penduduk Desa Mattiro Bombang mengantungkan kehidupannya pada hasil laut, dalam arti sumber mata pencaharian utama mereka berasal dari kegiatan kenelayanan. Di tahun 2008, terjadi peralihan sumber pendapatan penduduk kepulauan dari kegiatan perikanan ke sektor jasa transportasi, perdagangan eceran dan usaha budidaya rumput laut. Tingginya kebutuhan terhadap alat transportasi yang menghubungkan pulau-pulau di wilayah perairan serta pulau-pulau dengan daratan mendorong masyarakat untuk meningkatkan jumlah armada angkutan umum dan sebagian di antaranya beralih usaha ekonomi dari kegiatan kenelayanan menjadi jasa angkutan laut. Di sektor perdagangan, berdasarkan hasil observasi di Pulau Salemo terlihat adanya peningkatan jumlah warung dan toko yang menjual bahan-bahan kebutuhan rumah tangga dan kegiatan kenelayanan. Selain dari kedua jenis aktivitas di atas, kegiatan ekonomi yang mulai dikembangkan oleh sebagian masyarakat di Pulau Salemo adalah usaha budidaya rumput laut, meskipun dalam jumlah yang masih sangat terbatas. Penghasilan yang diperoleh dari hasil panen budidaya rumput laut merupakan sumber tambahan pendapatan rumah tangga selain dari kegiatan melaut (wawancara mendalam dengan nelayan yang juga mengusahakan kegiatan budidaya rumput laut). Bagi penduduk pesisir, keberagaman sumber pendapatan telah dirasakan sejak dahulu. Hal tersebut tercermin dari pendapatan rumah tangga di Kelurahan Pundata Baji (tahun 2006 dan 2008) yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga di Desa Mattiro Bombang. Dengan demikian, keberagaman sumber pendapatan rumah tangga menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga baik di wilayah kepulauan maupun di pesisir.

Meningkatnya rata-rata pendapatan rumah tangga di kedua lokasi penelitian terkait pula dengan bertambahnya jumlah anggota rumah tangga yang memasuki pasar kerja. Fenomena penduduk berusia 15 tahun ke bawah yang bekerja sangat terlihat di wilayah kepulauan. Perubahan status anggota rumah tangga yang berusia 15 tahun ke bawah dari “sekolah” menjadi pekerja pengupas kepiting mengakibatkan kegiatan sekolah menjadi pilihan kedua. Menurut

pengakuan seorang guru di Desa Mattiro Bombang, pekerjaan tersebut mengakibatkan anak-anak (perempuan) usia sekolah bekerja sejak pulang sekolah sampai dengan malam hari. Dengan keadaan tersebut, tak jarang keesokan harinya anak-anak yang bekerja tidak bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal karena kelelahan dan mengantuk. Pada mulanya, pekerjaan mengupas kepiting dilakukan oleh perempuan usia kerja, akan tetapi semakin tingginya kebutuhan akan tenaga pengupas kepiting menyebabkan anak-anak perempuan usia sekolah juga terdorong untuk melakukan pekerjaan tersebut. Penambahan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja sebagai pengupas kepiting akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga mereka. Meningkatnya jumlah anggota rumah tangga yang bekerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga, khususnya di wilayah kepulauan.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM yang rendah tidak hanya terkait dengan penangkapan sumber daya laut (SDL), tetapi juga budidaya dan pengolahan SDL. Adanya pengetahuan mengenai budidaya SDL di kalangan penduduk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga. Pengetahuan tentang budidaya SDL yang telah dikembangkan di kedua lokasi penelitian adalah budidaya rumput laut. Kegiatan budidaya rumput laut masih dilakukan oleh sebagian kecil penduduk di awal tahun 2008. Dalam perkembangannya pengolahan rumput laut memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, apalagi potensi wilayah juga mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain budidaya rumput laut, pengetahuan tentang pengolahan rumput laut menjadi sirup dan dodol merupakan potensi yang cukup besar bagi penduduk di Desa Mattiro Bombang sebagai alternatif usaha ekonomi untuk peningkatan pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan penduduk pada umumnya.

4.3.3. Faktor Eksternal

Pendapatan rumah tangga khususnya yang berasal dari kegiatan kenelayanan tidak dapat dilepaskan dari faktor pengaruh yang berasal di luar lingkungan masyarakat (faktor eksternal). Degradasi lingkungan, rantai/jalur pemasaran, biaya produksi, permintaan terhadap hasil tangkapan, dan musim merupakan faktor eksternal utama yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Degradasi lingkungan dirasakan oleh nelayan di perairan Kabupaten Pangkep dalam penurunan volume produksi tangkapan mereka yang selanjutnya berpengaruh terhadap pendapatan melaut. Hasil penelitian CRITC COREMAP II (2007) juga menyatakan bahwa telah terjadi penurunan persentase tutupan karang hidup di perairan Kabupaten Pangkep dari 34,68 persen pada tahun 2006 menjadi 30,42 persen di tahun 2007.

Keberadaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bagan rambo dan *mini trawl* di sekitar perairan lokasi penelitian semakin memperparah kerusakan terumbu karang di perairan lokasi penelitian. Penggunaan bahan peledak oleh nelayan bagan rambo tidak hanya merusak terumbu karang akan tetapi juga mengakibatkan matinya ikan-ikan kecil. Penggunaan *mini trawl* juga menyebabkan tertangkapnya semua jenis ikan, sampai dengan yang berukuran kecil. Selain itu, penggunaan bius/potas oleh sebagian nelayan yang berasal desa-desa lainnya di Kecamatan Liukang Tuppabiring semakin memperparah kerusakan terumbu karang. Meskipun beberapa nelayan lokal dan masyarakat setempat telah menegur pelaku pemboman, baik secara langsung dan tidak langsung, akan tetapi penggunaan bahan-bahan tersebut untuk menangkap sumber daya laut tetap berlangsung di lokasi penelitian. Pet-Soede, Cesar dan Pet (1999) menyatakan bahwa apabila penangkapan hasil laut dengan menggunakan bahan peledak di perairan Indonesia terus berlangsung maka diperkirakan dalam jangka waktu 20 tahun Indonesia akan kehilangan nilai ekonomi sebesar US \$ 306.800 per km² terumbu karang yang berpontesi tinggi dan US \$ 33.900 per km² terumbu karang yang pontesi rendah. Dengan perhitungan tersebut, kerusakan terumbu karang di perairan Spermonde berdampak terhadap penurunan hasil

tangkapan nelayan dari tahun ke tahun. Penurunan hasil tangkapan tersebut sangat dirasakan oleh sebagian besar nelayan lokal, seperti yang diungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat Desa Mattiro Bombang sebagai berikut :

Jawab: Iya, tapi kalau sekarang masyarakatnya mencari ikannya aja susah, ga boleh lagi kepiting kecil harus dilepas yah buat apa ya?.....Cuma dapat 2 ekor. Nah perbandingan bu waktu periode saya awal-awal itu yang ngambil 10 kilo sekarangnya untung 2 kilo. Dari tahun ke tahun menurun, yang ngambil 10 kilo dalam 1 hari toh, 1 kali panen untung-untung cukup 2 kilo sekarang untuk sekali perbandingannya

Tanya: Perbandingannya 1 banding 5. itu yang 10 kilo berapaan tuh?

Jawab: Yah 10 tahun yang lalu.... 10 tahun yang lalu sudah dapat 10 kilo

Tanya: Dulu juga sekali ngambil ya pak, ikan ya? Sekali ngambil ya?

Jawab: Iya sekali ngambil 1x panen, 1 hari itu

Iya masih sempat ada kalau ga salah saya ingat itu ada dapat-dapat 1 orang nelayan itu 10 atau 8 kilo, sekarng uda ndak bisa. Paling enggak 2 kilo atau 1 kilo

Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga nelayan adalah pasar. Pasar yang dimaksud adalah permintaan komoditas SDL dan harga yang secara langsung memegang peran penting terhadap pendapatan rumah tangga. Meningkatkannya permintaan terhadap kepiting di pasar lokal di kedua lokasi penelitian semakin mendorong masyarakat untuk menangkap jenis SDL tersebut. Bertambahnya jumlah *mini plan* di lokasi penelitian juga semakin memperbesar permintaan kepiting di tingkat lokal. Selain kepiting yang memiliki permintaan tinggi di tingkat lokal, ikan bandeng merupakan komoditas yang cukup banyak diusahakan oleh petani budidaya di wilayah pesisir. Pada umumnya, permintaan ikan bandeng

cenderung tidak mengalami perubahan (stabil). Hal tersebut terkait dengan jangkauan pasar yang lebih luas, tidak hanya di tingkat Kabupaten Pangkep akan tetapi menjangkau pasar di tingkat Propinsi Sulawesi Selatan dan provinsi-provinsi lainnya (Noveria dkk. 2008). Dengan demikian, permintaan komoditas baik di tingkat lokal dan kabupaten juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan rumah tangga nelayan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain permintaan pasar yang tinggi, pendapatan rumah tangga dipengaruhi harga komoditas. Secara umum, kedua komoditas yang memiliki permintaan pasar yang tinggi (kepiting dan ikan bandeng) memiliki kecenderungan harga yang relatif stabil di sepanjang tahun. Meskipun begitu, harga kepiting cenderung stabil jika dibanding dengan harga ikan bandeng. Hal tersebut dikarenakan harga ikan bandeng lebih dipengaruhi kuantitas hasil tangkapan ikan laut. Harga ikan bandeng akan meningkat apabila produksi tangkapan hasil laut menurun dan harga menurun pada kondisi sebaliknya. Dilihat dari harga kedua komoditas tersebut pada dua tahun yang lalu, terlihat adanya kenaikan harga jual kepiting dari Rp. 16.000,- per kg (2006) menjadi Rp. 26.000,- per kg (2008) di kedua lokasi penelitian. Sementara itu, harga jual ikan bandeng cenderung tidak mengalami perubahan yaitu Rp. 12.000,- sampai dengan Rp. 14.000,- per kg untuk yang berukuran dua ekor dalam satu kilogram. Dengan demikian, peningkatan harga jual kepiting lebih mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga dibanding dengan harga jual ikan bandeng.

Biaya produksi juga mempengaruhi peningkatan dan penurunan pendapatan rumah tangga nelayan. Secara umum, saat ini biaya produksi yang dikeluarkan oleh seorang nelayan cenderung mengalami peningkatan dibanding dengan kondisi dua tahun yang lalu. Peningkatan terbesar terjadi pada biaya bahan bakar minyak (BBM) terkait dengan meningkatnya harga BBM di Indonesia. Untuk mengatasi kendala tersebut, nelayan berupaya melakukan pencampuran bahan bakar, yaitu solar dan minyak tanah guna menekan pengeluaran bahan bakar. Dengan kondisi demikian,

peningkatan biaya produksi, khususnya BBM secara tidak langsung mempengaruhi perubahan pendapatan rumah tangga nelayan.

Seperti halnya nelayan pada umum, musim merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan. Nelayan Desa Mattiro Bombang cenderung mengalami peningkatan pendapatan pada musim gelombang kuat. Pada musim gelombang kuat hasil tangkapan kepiting jauh lebih banyak dibandingkan pada musim lainnya. Hal tersebut dikarenakan pada musim tersebut ombak yang kuat menyebabkan kepiting keluar dari sarangnya sehingga nelayan lebih mudah menangkapnya. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan di Desa Mattiro Bombang tetap melakukan aktivitas melaut pada musim gelombang kuat dengan lokasi penangkapan yang relatif lebih dekat dibandingkan pada musim lainnya. Keadaan sebaliknya terjadi pada nelayan di Kelurahan Pundata Baji yang pada musim gelombang kuat cenderung mengalami penurunan pendapatan rumah tangga. Nelayan di Kelurahan Pundata Baji sama sekali tidak bisa melaut pada masa gelombang kuat karena angin yang kuat menyebabkan mereka tidak mampu menembus ke tengah laut. Kondisi tersebut jelas mempengaruhi pendapatan rumah tangga nelayan pada musim gelombang kuat. Akan tetapi, jika dibandingkan kondisi tahun 2006 dan 2008, musim tidak menyebabkan perubahan besar terhadap pendapatan rumah tangga. Hal ini karena tidak adanya perubahan musim yang signifikan dalam dua tahun terakhir yang secara langsung mempengaruhi pendapatan nelayan.

Dengan memperhatikan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa perubahan pendapatan rumah tangga berdasarkan faktor eksternal di kedua lokasi penelitian lebih didominasi oleh kerusakan terumbu karang yang berdampak terhadap penurunan hasil tangkapan, penggunaan teknologi melalui peningkatan kepemilikan armada dan alat tangkap, serta permintaan yang tinggi akan komoditas unggulan (kepiting dan ikan bandeng). Faktor-faktor tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pendapatan rumah tangga dan tingkat kesejahteraan penduduk lokasi COREMAP pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

Perairan Kabupaten Pangkep dikelilingi oleh terumbu karang yang mempunyai nilai ekologi dan ekonomi tinggi. Sayangnya, sebagaimana juga terjadi di berbagai wilayah perairan di Indonesia, sebagian besar terumbu karang tersebut berada dalam kondisi kurang baik. Kondisi ini terutama disebabkan oleh perilaku manusia yang "tidak bersahabat" dengan terumbu karang, seperti menangkap ikan menggunakan armada, bahan dan alat tangkap yang menimbulkan kerusakan sumberdaya laut tempat hidup berbagai jenis ikan dan biota laut tersebut. Armada tangkap yang bersifat merusak terumbu karang yang biasanya digunakan oleh sebagian nelayan adalah *trawl* atau *mini trawl*. Selain itu, tidak jarang nelayan menggunakan bom dan racun dalam kegiatan penangkapan ikan. Kedua jenis bahan tersebut bersifat menghancurkan dan mengganggu kelangsungan hidup sumber daya terumbu karang.

Kerusakan terumbu karang berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkurang atau bahkan hilangnya jenis-jenis biota laut tertentu yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk yang tinggal di sekitarnya. Hal ini terutama dirasakan oleh mereka yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut melalui kegiatan kenelayanan (perikanan laut). Di lokasi penelitian, yaitu Desa Mattiro Bombang (Kecamatan Liukang Tupabbiring) mayoritas penduduknya bekerja di sektor perikanan laut dan kebanyakan mereka adalah nelayan kecil yang biasa melaut sendiri dengan armada tangkap yang sederhana. Mereka melaut menggunakan perahu motor berkekuatan kecil sehingga mengalami kesulitan untuk berlayar sampai jauh ke tengah laut. Dengan kondisi terumbu karang yang rusak, mereka terpaksa mencari ikan sampai wilayah yang jauh dari pantai karena sumber daya laut di sekitar pantai sudah semakin berkurang.

Pemerintah telah meluncurkan program untuk mengelola dan merehabilitasi terumbu karang agar kondisi sumber daya laut tersebut tidak bertambah buruk. Dalam konteks masyarakat pesisir dan kepulauan, khususnya, pemerintah juga berusaha untuk mempertahankan dan jika memungkinkan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka di tengah menurunnya kondisi terumbu karang dan sumber daya laut pada umumnya. Program yang diluncurkan adalah COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*) yang mencakup beragam jenis kegiatan, baik yang ditujukan untuk lingkungan bio-fisik maupun untuk sosial ekonomi penduduk yang tinggal di sekitar terumbu karang. Program ini melibatkan *stakeholders* dari berbagai institusi (pemerintah) mulai dari tingkat nasional sampai dengan kelurahan/desa yang terpilih sebagai lokasi kegiatan. Melalui COREMAP, dilakukan usaha-usaha penyelamatan terumbu karang serta sumber daya laut pada umumnya dan juga upaya-upaya peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama melalui penciptaan mata pencaharian alternatif.

Keberhasilan COREMAP diukur dari berbagai aspek sesuai dengan jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan. Dalam program ini juga terdapat kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan dan memelihara kondisi bio-fisik terumbu karang, sehingga bertambahnya luas tutupan karang serta keragaman jenis biota laut yang hidup di sekitarnya menjadi salah satu ukuran keberhasilan COREMAP. Dari aspek sosial ekonomi, indikator capaian tujuan program ini meliputi: (1) peningkatan pendapatan dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya sebesar sepuluh persen pada akhir tahun 2009, (2) sedikitnya 70 persen dari masyarakat nelayan (*beneficiaries*) di kabupaten lokasi program merasakan dampak positif COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan dan status sosial ekonominya (World Bank, 2004). Capaian ini tidak hanya diukur pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan COREMAP, tetapi juga pada waktu-waktu di antaranya (dalam periode satu atau dua tahun). Untuk itulah dilakukan pemantauan agar capaian program ini selama satu atau dua tahun dapat diketahui.

COREMAP secara resmi dilaksanakan di Kabupaten Pangkep pada tahun 2005. Semua kecamatan di kabupaten ini, kecuali yang terletak di dataran tinggi, yaitu Kecamatan Minasa Te'ne, Todong Tallasa dan Balocci, terpilih menjadi lokasi pelaksanaan COREMAP. Secara keseluruhan, program ini dilaksanakan di 37 desa/kelurahan di wilayah kepulauan serta pesisir dan dataran rendah. Program ini dimulai dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi, edukasi, penyadaran masyarakat, dan pelatihan-pelatihan untuk para pelaksananya di tingkat desa/kelurahan (SETO, fasilitator desa, dan motivator desa). Terkait dengan mata pencaharian penduduk, namun masih berkaitan dengan sektor perikanan, kegiatan yang telah dilakukan adalah penanaman rumput yang bertujuan menyediakan tempat untuk berkumpulnya ikan sehingga nelayan tidak perlu berlayar sampai jauh ke tengah laut untuk memperoleh hasil tangkapan yang memadai. Selain itu, kegiatan pengawasan telah dilakukan meskipun tidak secara rutin karena keterbatasan dana dalam pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan telah memperlihatkan hasilnya, yaitu mencegah nelayan dari luar lokasi melakukan penangkapan ikan menggunakan armada, bahan, dan alat tangkap yang merusak terumbu karang. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan produksi tangkapan nelayan di lokasi penelitian, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan mereka.

Kegiatan COREMAP untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif, yaitu yang tidak terkait dengan eksploitasi sumber daya laut, baru dilaksanakan pada tahun 2008, setelah *seed fund* (dana bantuan untuk kegiatan ekonomi produktif – UEP) cair. Di antara dua lokasi penelitian, dana tersebut baru dimanfaatkan di Kelurahan Pundata Baji (Kecamatan Labakkang). *Seed fund* dipinjamkan kepada anggota pokmas UEP untuk mengembangkan usaha, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 500.000,- - Rp. 2.000.000,- per orang. Sebagian penerima *seed fund* adalah mereka yang sebelumnya sudah mempunyai berbagai jenis usaha ekonomi, mulai dari berjualan (makanan), usaha perbengkelan, sampai pada usaha perikanan darat. Bantuan uang yang diterima digunakan untuk mengembangkan atau menambah skala usaha, misalnya memperbanyak jenis dan jumlah alat tangkap. Namun demikian ada pula beberapa penerima *seed fund* yang

belum mempunyai usaha ekonomi dan baru akan memulai usahanya dengan modal dana bantuan.

Seed fund bersifat dana bergulir, dalam arti uang yang diterima harus dikembalikan dengan cara mencicil, untuk kemudian digulirkan kepada anggota pokmas yang belum menerima bantuan. Penerima bantuan diseleksi oleh pengurus LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dengan pertimbangan kelayakan usaha serta kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Namun dalam praktiknya, penerima *seed fund* lebih didasarkan pada pertimbangan kemampuan untuk mengembalikan cicilan sehingga banyak di antara mereka adalah penduduk yang tergolong mampu secara ekonomi. Beberapa penerima dana kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota masyarakat lainnya yang dipandang lebih membutuhkan. Jika mereka tidak bisa membayar cicilan, maka anggota pokmas UEP yang namanya tercatat sebagai penerima *seed fund* bertanggungjawab untuk membayar cicilannya kepada pengurus LKM. Dalam kasus ini, mereka berperan sebagai "penjamin" dana yang dipinjam. Cara ini ditempuh agar dana dapat bertahan dalam jangka panjang agar lebih banyak penduduk dengan bisa memperoleh manfaat dari dana tersebut.

Berbeda dengan di Kelurahan Pundata Baji, sampai dengan pelaksanaan penelitian (bulan Juni 2008) *seed fund* di Desa Mattiro Bombang (Kecamatan Liukang Tupabbiring) belum bisa dimanfaatkan calon penerimanya. Hal ini karena masih ditemukan kendala administrasi akibat pergantian ketua LKM. Menurut ketentuan program, rekening penampung *seed fund* harus atas nama ketua LKM. Oleh karena ketua LKM yang pertama terpilih telah pindah ke luar desa, maka harus dilakukan pergantian rekening dengan nama ketua LKM yang baru. Pencairan dana selanjutnya menunggu proses pergantian nama pemilik rekening penerimanya.

Terlepas dari belum turunnya dana untuk kegiatan ekonomi produktif, kegiatan masing-masing pokmas COREMAP masih sangat terbatas, untuk mengatakan tidak ada sama sekali. Sebagai contoh, pokmas jender di Desa Mattiro Bombang baru memperoleh satu kali pelatihan, yaitu pengolahan rumput laut menjadi sirup dan dodol. Pelatihan tersebut dilakukan dua hari sebelum adanya peninjauan oleh

tim dari *World Bank*. Keadaan yang hampir serupa juga terjadi pada pokmas lainnya, antara lain pokmas pengawasan. Tidak ada kegiatan pengawasan yang secara khusus dilakukan oleh anggota pokmas dalam kerangka kegiatan COREMAP. Kenyataan ini menimbulkan kesan bahwa kegiatan pokmas-pokmas COREMAP hanya terbatas pada pembentukan kelompok. Setelah kelompok terbentuk, hampir tidak ada kegiatan lain yang dilakukan masing-masing pokmas.

Dalam konteks pendapatan rumah tangga, penelitian ini menemukan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga yang terpilih sebagai sampel. Peningkatan pendapatan yang signifikan ditemukan di antara rumah tangga sampel di Desa Mattiro Bombang. Pada tahun 2006 pendapatan rata-rata rumah tangga terpilih sebesar Rp. 547.250,- per bulan, sementara dua tahun setelahnya (2008) meningkat menjadi Rp. 958.750,- per bulan. Jika dilihat dari pendapatan per kapita, terjadi peningkatan dari Rp. 116.960,- setiap bulan menjadi Rp. 195.350,- per bulan selama kurun waktu dua tahun tersebut. Selanjutnya, di Kelurahan Pundata Baji pendapatan rata-rata rumah tangga sampel pada tahun 2006 adalah Rp. 1.137.570,- per bulan. Jumlah ini meningkat menjadi Rp. 1.168.725,- setiap bulan pada tahun 2008. Hal yang sama juga terjadi pada pendapatan per kapita, dengan peningkatan dari Rp. 222.320,- per bulan pada tahun 2006 menjadi Rp. 236.600,- per bulan pada tahun 2008.

Di Desa Mattiro Bombang, khususnya, dapat dikatakan bahwa peningkatan pendapatan terjadi pada hampir semua rumah tangga sampel. Hal ini terlihat dari kecenderungan perubahan distribusi pendapatan ke arah yang lebih besar. Jika pada tahun 2006 sekitar 61 persen rumah tangga sampel mempunyai pendapatan rata-rata kurang dari Rp. 500.000,- setiap bulan, pada tahun 2008 proporsi rumah tangga dengan jumlah pendapatan tersebut berkurang menjadi 34,4 persen. Kondisi yang sebaliknya terjadi pada rumah tangga dalam kelompok pendapatan yang lebih besar. Hanya 1 persen di antara seluruh rumah tangga sampel pada tahun 2006 yang berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,- per bulan. Pada tahun 2008 proporsi rumah tangga yang berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,- per bulan meningkat menjadi 3,3 persen. Perubahan distribusi pendapatan

rumah tangga seperti tersebut tidak terlihat di antara rumah tangga-rumah tangga sampel di Kelurahan Pundata Baji. Proporsi rumah tangga berpenghasilan kecil (kurang dari Rp. 500.000,- setiap bulan) bahkan sedikit lebih banyak pada tahun 2008 daripada tahun 2006, yaitu 25,8 persen dan 25 persen secara berturut-turut. Selanjutnya, proporsi rumah tangga yang berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,- per bulan juga berkurang dari 6 persen pada tahun 2006 menjadi 5,8 persen di tahun 2008.

Jika membandingkan antara rumah tangga yang salah satu atau lebih anggotanya terlibat dalam kegiatan COREMAP dan rumah tangga tanpa anggota yang terlibat sebagai anggota pokmas, terlihat perbedaan pendapatan di antara kedua kelompok tersebut. Keadaan ini terutama ditemui di Desa Mattiro Bombang. Rumah tangga dengan anggota yang terlibat dalam pokmas COREMAP mempunyai pendapatan rata-rata per bulan lebih tinggi daripada rumah tangga yang anggotanya sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan pokmas COREMAP. Namun keadaan ini tidak ditemui di lokasi penelitian yang terletak di wilayah pesisir. Pendapatan rumah tangga anggota pokmas COREMAP di Kelurahan Pundata Baji bahkan lebih rendah dibanding pendapatan rumah tangga yang anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan pokmas program tersebut.

Peningkatan pendapatan rumah tangga sampel selama periode dua tahun (2006-2008), terutama di Desa Mattiro Bombang, disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu di antaranya adalah lebih bervariasinya jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga. Jika pada tahun 2006 hampir semua rumah tangga memperoleh pendapatan dari kegiatan kenelayanan, dua tahun sesudahnya sumber pendapatan mereka lebih bervariasi. Sebagai contoh, pada tahun 2008 lebih banyak rumah tangga yang melakukan usaha ekonomi berupa perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari dibanding tahun 2006. Selain itu, pada tahun 2008 beberapa rumah tangga mengusahakan budidaya rumput lain, usaha ekonomi yang tidak dilakukan oleh masyarakat di lokasi penelitian pada tahun 2006.

Lebih banyaknya anggota rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Pada tahun 2008 setelah beroperasinya beberapa usaha pengupasan kepiting (*mini plan*) baru di Desa Mattiro Bombang banyak anak usia sekolah yang bekerja sebagai buruh pengupas kepiting di *mini plan* tersebut. Mereka bekerja sejak pulang sekolah sampai larut malam. Pekerjaan yang mereka lakukan menghasilkan upah yang selanjutnya diserahkan kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Anak-anak pengupas kepiting memberi kontribusi yang berarti terhadap pendapatan rumah tangga.

Di luar faktor internal rumah tangga, ada pula faktor struktural yang memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga sampel. Termasuk dalam faktor ini adalah program-program dari berbagai institusi (pemerintah) yang antara lain berupa bantuan pinjaman modal usaha bagi masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi mereka. Bagi sebagian nelayan, bantuan modal yang diterima dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas armada tangkap, misalnya membeli mesin perahu yang berkekuatan lebih besar, atau menambah jenis dan jumlah alat tangkap. Dengan armada tangkap berkekuatan lebih besar serta alat tangkap yang lebih banyak dan bervariasi, nelayan dapat memperbesar volume produksi yang pada gilirannya memberikan penghasilan yang lebih besar pula bagi mereka. Bagi penduduk yang bukan nelayan, bantuan modal yang diperoleh melalui berbagai program pemerintah tersebut digunakan juga untuk meningkatkan skala usaha sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa COREMAP, khususnya kegiatan ekonomi produktif, belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini terlihat dari tidak adanya perbedaan pendapatan antara rumah tangga yang anggotanya terlibat sebagai anggota pokmas (UEP) dengan rumah tangga tanpa anggota yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Di Desa Mattiro Bombang, pendapatan rata-rata rumah tangga yang mempunyai anggota yang terlibat dalam pokmas COREMAP lebih tinggi daripada rumah tangga yang tidak mempunyai anggota yang

terlibat dalam pokmas COREMAP. Namun, kondisi yang sebaliknya terjadi di Kelurahan Pundata Baji. Di kelurahan pesisir ini, rumah tangga anggota pokmas COREMAP mempunyai pendapatan rata-rata yang lebih rendah dibanding rumah tangga yang anggotanya terlibat dalam kegiatan pokmas COREMAP. Hal ini terutama karena bantuan modal yang berasal dari COREMAP baru diterima sekitar satu bulan sebelum penelitian sehingga belum memberikan pengaruh terhadap perbaikan pendapatan rumah tangga, bahkan ada kelompok UEP yang belum menerima dana bantuan dari kegiatan COREMAP. Oleh karena itu, masih diperlukan waktu untuk mengetahui keberhasilan COREMAP dalam kegiatan mata pencaharian alternatif.

Walaupun telah dilaksanakan sekitar tiga tahun, keberhasilan yang dicapai COREMAP di tingkat desa/kelurahan tampaknya masih jauh dari memadai. Hal ini terlihat dari kecilnya proporsi masyarakat, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh individu yang menjadi responden penelitian, yang mengetahui berbagai kegiatan yang dilakukan COREMAP. Hanya sekitar sepertiga responden di Kelurahan Pundata Baji dan separuh responden di Desa Mattiro Bombang yang mengetahui bahwa COREMAP telah dilaksanakan di tempat tinggal mereka. Sedikitnya responden yang mengetahui keberadaan COREMAP berakibat pada sedikitnya pula responden yang terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut.

Kenyataan di atas merupakan salah satu indikasi bahwa sosialisasi COREMAP tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dianalisis dari dua sisi. Pertama, karena program ini mencakup wilayah yang luas, sementara tenaga pelaksana di lapangan, khususnya fasilitator dan motivator desa, terbatas jumlahnya. Akibatnya, kegiatan-kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan kurang atau tidak mencapai seluruh masyarakat yang tinggal di pelosok lokasi COREMAP. Hal ini utamanya terjadi di wilayah kepulauan, ketika satu desa terdiri dari tiga sampai empat pulau, sosialisasi adakalanya hanya dilakukan di pulau-pulau yang banyak penduduknya dan menjadi pusat desa. Mereka yang tinggal di pulau lainnya tidak tersentuh kegiatan sosialisasi. Selain itu, hambatan cuaca memberi

sumbangan yang berarti terhadap kurangnya sosialisasi COREMAP. Tidak jarang ketika sosialisasi dilakukan cuaca dan gelombang laut tidak memungkinkan penduduk untuk melakukan perjalanan sehingga mereka yang tinggal di pulau-pulau lain tidak bisa menghadiri kegiatan tersebut. Kedua, kurangnya kepedulian masyarakat kemungkinan menyebabkan kegiatan COREMAP tidak diketahui secara luas. Hal ini terutama ditemukan di lokasi-lokasi yang penduduknya mempunyai mata pencaharian beragam, seperti di Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkang. Mereka yang kegiatan ekonominya tidak secara langsung berkaitan dengan terumbu karang atau sumber daya laut pada umumnya, kurang tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh COREMAP. Hal ini tidak mengherankan karena selama ini memang kegiatan COREMAP lebih difokuskan pada masyarakat pesisir yang mempunyai mata pencaharian yang sangat terkait dengan sumber daya laut.

Disadari bahwa hasil yang dicapai COREMAP setelah program ini dilaksanakan lebih kurang selama tiga tahun masih kurang memadai. Keterlambatan pelaksanaan program yang secara langsung terkait dengan (perbaikan) kondisi ekonomi masyarakat, khususnya pencairan dana bantuan modal usaha, menyebabkan sampai saat ini keberhasilan program ini belum terlihat secara nyata. Namun demikian, program ini berpotensi untuk mencapai keberhasilan, sepanjang pelaksanaannya tidak menyimpang dari rancangan program dan mendapat dukungan dari berbagai *stakeholders* yang terlibat.

Mengacu pada hasil pemantauan dan evaluasi mengenai implementasi COREMAP di tingkat lapangan yang dilaksanakan melalui kegiatan penelitian ini, maka beberapa saran diajukan untuk pelaksanaan program pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang ini ke depan, yaitu:

- ✦ Upaya sosialisasi COREMAP agar lebih ditingkatkan karena banyak anggota masyarakat di lokasi penelitian yang tidak mengetahui keberadaan program ini di daerah tempat tinggal mereka. Kegiatan sosialisasi seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya mereka yang sepenuhnya menggantungkan kehidupan pada sumber daya laut. Selama ini

ada kesan bahwa COREMAP hanya ditujukan bagi penduduk yang mempunyai mata pencaharian dari kegiatan kenelayan dan eksploitasi sumber daya laut pada umumnya. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan COREMAP juga semakin luas.

- ✦ Agar kegiatan sosialisasi bisa dilakukan lebih intensif diperlukan kerja keras dari para pelaksana teknis di lapangan, terutama fasilitator masyarakat dan motivator desa. Dengan jumlah tenaga yang terbatas, sementara wilayah kerja mereka mencakup tiga sampai empat pulau yang sulit dijangkau terutama pada musim angin dan gelombang laut yang kuat, fasilitator masyarakat mengalami kesulitan untuk lebih sering mendatangi masing-masing wilayah kerja mereka. Jika memungkinkan, tenaga fasilitator masyarakat bisa diperbanyak agar mereka dapat konsentrasi bekerja di satu atau dua pulau saja. Dengan demikian, mereka dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di pelosok lokasi COREMAP.
- ✦ Motivator desa juga harus lebih dipacu dalam melaksanakan pekerjaannya. Kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pekerja teknis lapangan tersebut harus dilaksanakan sehingga memaksa mereka untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Bila perlu mekanisme *reward and punishment* bisa diberlakukan untuk memberi penghargaan kepada mereka yang telah bekerja keras dan sebaliknya memberikan disinsentif bagi mereka yang gagal dalam melaksanakan pekerjaannya.
- ✦ Terkait dengan kegiatan pokmas UEP, ada baiknya usaha ekonomi yang dilakukan berkelompok lebih diutamakan daripada usaha yang dilakukan secara individu. Hal ini bertujuan agar dana yang digulirkan untuk usaha ekonomi bisa berjumlah lebih besar sehingga skala usaha juga menjadi lebih besar. Daripada meminjamkan dana dalam jumlah yang sedikit, misalnya Rp. 500.000,- kepada individu, lebih baik mengumpulkannya untuk kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam suatu kelompok sehingga modal usaha menjadi lebih besar. Dengan modal yang lebih besar, maka usaha yang dilakukan juga bisa lebih besar. Selain itu,

dengan bekerja berkelompok terbangun kerjasama di antara sesama anggota pokmas dan semangat untuk berhasil juga menjadi lebih terpacu.

- ✚ Tiap pokmas COREMAP agar menggalakkan pelaksanaan berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawab mereka. Ini terutama untuk menghindari anggapan masyarakat bahwa pokmas COREMAP tidak melakukan kegiatan apa pun sehingga masyarakat menjadi tidak tertarik untuk terlibat dalam program ini.



DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2006. *Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan : Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005*. BPS Indonesia, Jakarta.
- BPS Kabupaten Pangkep. 2004. *Produk Domestik Bruto Regional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1999-2003*. BPS Kabupaten Pangkep, Pangkajene.
- BPS Kabupaten Pangkep. 2007a. *Produk Domestik Bruto Regional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2000-2006*. BPS Kabupaten Pangkep, Pangkajene.
- BPS Kabupaten Pangkep. 2007b. *Kabupaten Pangkep Dalam Angka 2007*. BPS Kabupaten Pangkep, Pangkajene.
- BPS Provinsi Sulawesi Selatan. 2007. *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2006*, diunduh dari <http://sulsel.bps.go.id/> tanggal 1 November 2008.
- BPS & Bappeda Kabupaten Pangkep. 2006. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkep 2006*. BPS Kabupaten Pangkep, Pangkajene.
- COREMAP II dan Eco-Natural Society. 2006. *Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi COREMAP II Kabupaten Pangkep*. Pangkajene.
- CRITC COREMAP II. 2007. *Monitoring Ekologi Pangkep*. Coral Reef Information and Training Center, Coral Reef Rehabilitation and Management Program, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- CV Melania Consultant. 2005. *Laporan Akhir Draft Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) Tingkat Desa Kabupaten Pangkep Sulsel*, CV Melania Consultant, Makassar.

- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2007. *Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK)*. Direktorat Jendral Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep. 2007. Statistik Perikanan.
- Noveria, Mita, dkk. 2008. *Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II. Kasus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. LIPI Press, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Pangkep. 2008. *Potensi Daerah*, diunduh dari www.pangkep.go.id tanggal 20 Oktober 2008.
- Pet-Soede, C., H.S. J. Cesar, dan N. D J. S. Pet. 1999. "An economic Analysis of Blast Fishing on Indonesian Coral Reefs". *Environmental Conservation* Vol. 26 . Issu : 2 : p.83-93. Conservation and Community Investment Forum (CCIF) Publication.
http://www.cciforum.org/pdfs/Blast_Fishing.pdf.
- Saharudin, S. 2006. *Analisis Ekonomi Regional Propinsi Sulawesi Selatan*, Vol. 3 No. 1.
http://www.pascaunhas.net/jurnal_pdf/an_3_1/02-Syahrul%20saharuddin%20Oke.pdf.
- UNDP. 1992. *Human Development Report 1992* UNDP, New York.
- Wahyudin, Y. 2002. *Budidaya Rumput Laut: Prospek Mata Pencaharian Alternatif di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan*. Indonesia Coastal Universities Network Edisi No. 02/Th II.
http://www.komitmenku.files.wordpress.com/2008/05/20020413-incune-budidaya-rumput-laut_prospek-mpa-di-kabpangkep-sulsel.pdf -.
- World Bank. 2004. *Project Appraisal Document*.

LAMPIRAN

Lampiran Tabel 3.1
Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Tentang Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)

<i>Jenis kegiatan ekonomi</i>	<i>Tahu</i>	<i>Tidak tahu</i>	Jumlah (N=122)
Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang	19,8	80,2	100,0
Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat	18,2	81,8	100,0
Pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha	9,2	90,8	100,0

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

Lampiran Tabel 3.2

Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP Menurut Sumber Informasi Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)

<i>Jenis kegiatan ekonomi</i>	<i>Sumber informasi</i>					<i>Jumlah (N)</i>
	<i>Fasilitator/motivator/pengurus COREMAP</i>	<i>Kepala aparat desa/dusun/kampung/RT/RW</i>	<i>Pimpinan informal di desa/pulau/kampung</i>	<i>Anggota masyarakat yang terlibat/turut serta dalam kegiatan COREMAP</i>	<i>Anggota masyarakat lainnya</i>	
Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang	70,8	8,3	-	20,8	-	100,0 (24)
Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat	77,3	-	-	18,2	4,5	100,0 (22)
Pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha	81,8	-	-	18,2	-	100,0 (11)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

Lampiran Tabel 3.3

Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP dan Keterlibatannya Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)

<i>Jenis kegiatan ekonomi</i>	<i>Terlibat</i>	<i>Tidak terlibat</i>	<i>Jumlah (N)</i>
Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang	54,2	45,8	100,0 (24)
Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat	72,7	27,3	100,0 (22)
Pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha	90,9	9,1	100,0 (11)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

Lampiran Tabel 3.4
Distribusi Responden yang Terlibat dalam Kegiatan Ekonomi COREMAP
Menurut Manfaat yang Dirasakan, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)

<i>Jenis kegiatan ekonomi</i>	<i>Bermanfaat</i>	<i>Tidak bermanfaat</i>	Jumlah (N)
Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang	84,6	15,4	100,0 (13)
Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat	81,3	18,7	100,0 (16)
Pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha	80,0	20,0	100,0 (10)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

Lampiran Tabel 3.5.
Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Jenis Usaha
Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)

<i>Jenis usaha ekonomi</i>	<i>Tahu</i>	<i>Tidak tahu</i>	Jumlah (N=29)
Perdagangan/warung	10,3	89,7	100,0
Perikanan budidaya	10,3	89,7	100,0
Perikanan tangkap	24,1	75,9	100,0
Ternak ayam/bebek/itik/kambing/dll.	10,3	89,7	100,0
Pembuatan makanan/kue/minyak kelapa	10,3	89,7	100,0
Pengolahan hasil laut/ikan asin	10,3	89,7	100,0
Kerajinan/souvenir	10,3	89,7	100,0
Lainnya	6,9	93,1	100,0

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

Lampiran Tabel 3.6

Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP Menurut Keterlibatannya, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)

<i>Jenis usaha ekonomi</i>	<i>Terlibat</i>	<i>Tidak Terlibat</i>	Jumlah (N)
Perdagangan/warung	66,7	33,3	100,0 (3)
Perikanan budidaya	66,7	33,3	100,0 (3)
Perikanan tangkap	100,0	0,0	100,0 (7)
Ternak ayam/bebek/itik/kambing/dll.	66,7	33,3	100,0 (3)
Pembuatan makanan/kue/minyak kelapa	66,7	33,3	100,0 (3)
Pengolahan hasil laut/ikan asin	66,7	33,3	100,0 (3)
Kerajinan/souvenir	66,7	33,3	100,0 (3)
Lainnya	50,0	50,0	100,0 (2)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

Lampiran Tabel 3.7

Distribusi Responden yang Terlibat dalam Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP Menurut Manfaat yang Dirasakan, Desa Mattiro Bombang, 2008 (%)

<i>Jenis usaha ekonomi</i>	<i>Bermanfaat</i>	<i>Tidak bermanfaat</i>	Jumlah (N)
Perdagangan/warung	100,0	0,0	100,0 (2)
Perikanan budidaya	100,0	0,0	100,0 (2)
Perikanan tangkap	100,0	0,0	100,0 (7)
Ternak	100,0	0,0	100,0 (2)
ayam/bebek/itik/kambing/dll.			
Pembuatan makanan/kue/minyak kelapa	100,0	0,0	100,0 (2)
Pengolahan hasil laut/ikan asin	100,0	0,0	100,0 (2)
Kerajinan/souvenir	100,0	0,0	100,0 (2)
Lainnya	100,0	0,0	100,0 (1)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

Lampiran Tabel 3.8
Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Tentang Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)

<i>Jenis kegiatan ekonomi</i>	<i>Tahu</i>	<i>Tidak tahu</i>	Jumlah (N=120)
Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang	41,7	58,3	100,0
Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat	45,8	54,2	100,0
Pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha	30,8	69,2	100,0

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

Lampiran Tabel 3.9
Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP Menurut Sumber Informasi, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)

<i>Jenis kegiatan ekonomi</i>	<i>Sumber informasi</i>					Jumlah (N)
	Fasilitator/ motivator/ pengurus COREMAP	Kepala/ aparap desa/ dusun/ kampung /RT/RW	Pimpinan informal di desa/ pulau/ka mpung	Anggota masyarakat yang terlibat /turut serta dalam kegiatan COREMAP	Anggota masyarak at lainnya	
Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang	82,0	2,0	-	12,0	4,0	100,0 (50)
Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat	80,0	3,6	-	14,5	1,8	100,0 (55)
Pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha	75,7	2,7	-	18,9	2,7	100,0 (37)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

Lampiran Tabel 3.10**Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Kegiatan Ekonomi COREMAP dan Keterlibatannya, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)**

<i>Jenis kegiatan ekonomi</i>	<i>Terlibat</i>	<i>Tidak terlibat</i>	Jumlah (N)
Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang	38,0	62,0	100,0 (50)
Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat	47,3	52,7	100,0 (55)
Pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha	45,9	54,1	100,0 (37)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

Lampiran Tabel 3.11**Distribusi Responden yang Terlibat dalam Kegiatan Ekonomi COREMAP Menurut Manfaat yang Dirasakan, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)**

<i>Jenis kegiatan ekonomi</i>	<i>Bermanfaat</i>	<i>Tidak bermanfaat</i>	Jumlah (N)
Pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang	100,0	-	100,0 (19)
Pemberian dana bergulir/kredit untuk mengembangkan UEP masyarakat	100,0	-	100,0 (26)
Pelatihan dan bimbingan keterampilan untuk meningkatkan usaha	100,0	-	100,0 (17)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

Lampiran Tabel 3.12**Distribusi Responden Menurut Pengetahuan Mengenai Jenis Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)**

<i>Jenis usaha ekonomi</i>	<i>Tahu</i>	<i>Tidak tahu</i>	Jumlah (N=56)
Perdagangan/warung	3,6	96,4	100,0
Perikanan budidaya	12,5	87,5	100,0
Perikanan tangkap	25,0	75,0	100,0
Ternak ayam/bebek/itik/kambing/dll.	1,8	98,2	100,0
Pembuatan makanan/kue/minyak kelapa	1,8	98,2	100,0
Pengolahan hasil laut/ikan asin	46,4	53,6	100,0
Kerajinan/souvenir	0,0	100,0	100,0
Lainnya	0,0	100,0	100,0

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

Lampiran Tabel 3.13**Distribusi Responden yang Mengetahui Jenis Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP Menurut Keterlibatannya. Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)**

<i>Jenis usaha ekonomi</i>	<i>Terlibat</i>	<i>Tidak Terlibat</i>	Jumlah (N)
Perdagangan/warung	0,0	100,0	100,0 (2)
Perikanan budidaya	42,9	57,1	100,0 (7)
Perikanan tangkap	50,0	50,0	100,0 (14)
Ternak	0,0	100,0	100,0 (1)
ayam/bebek/itik/kambing/dll.			
Pembuatan makanan/kue/minyak kelapa	100,0	0,0	100,0 (1)
Pengolahan hasil laut/ikan asin	84,6	15,4	100,0 (26)
Kerajinan/souvenir	-	-	100,0 (0)
Lainnya	-	-	100,0 (0)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.

Lampiran Tabel 3.14**Distribusi Responden yang Terlibat dalam Usaha Ekonomi yang Pernah Dilakukan COREMAP Menurut Manfaat yang Dirasakan, Kelurahan Pundata Baji, 2008 (%)**

<i>Jenis usaha ekonomi</i>	<i>Bermanfaat</i>	<i>Tidak bermanfaat</i>	<i>Jumlah (N)</i>
Perdagangan/warung	0,0	0,0	100,0 (0)
Perikanan budidaya	100,0	0,0	100,0 (3)
Perikanan tangkap	100,0	0,0	100,0 (7)
Ternak	-	-	100,0 (0)
ayam/bebek/itik/kambing/dll.			
Pembuatan makanan/kue/minyak kelapa	100,0	0,0	100,0 (1)
Pengolahan hasil laut/ikan asin	100,0	0,0	100,0 (22)
Kerajinan/souvenir	-	-	100,0 (0)
Lainnya	-	-	100,0 (0)

Sumber: Survei Benefit Monitoring Evaluation (BME) Sosial-Ekonomi, 2008.



